

Jurnal

Demokrasi Sosial

Daftar Isi

Editorial [2]

Laporan Utama

Mencari Peta Jalan Penghapusan Kemiskinan [6]

Laporan Utama

Mencari Peta Jalan Penghapusan Kemiskinan di Indonesia [28]

Artikel

Akses Bagi Orang Miskin, Ivan Hadar [34]

Artikel

THOMAS PAINE, KEMISKINAN DAN KE BASIC INCOME, Sugeng Bahagijo [36]

Artikel

Inisiatif Lokal dalam Kebijakan Sosial: Pelajaran dari Makassar, Arie Sudjito [44]

Wawancara

Romo Sandiyawan: Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia: Perjuangan Melawan Kekuasaan [50]

Laporan

HAKI: ALAT IMPERIALISME NEGARA-NEGARA MAJU? [58]

Serial Sejarah Sosdem

Ivan A. Hadar: Pencarian "Jalan ketiga" di Indonesia [60]

Profil

UNISOSDEM [62]

Peristiwa

Peluncuran Jurnal dan Dikusi, Pemimpin Tanpa Visi [65]

Resensi

Menggugat Sistem Pendidikan Model Sekolah [67]

Resensi

ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI: KESAKSIAN SEORANG AKTIVIS PERGERAKAN [69]



Dewan Redaksi:

Amir Effendi Siregar (Ketua),
Ivan Hadar (Wakil Ketua),
Faisal Basri,
Mian Manurung,
Nur Iman Subono,
Ari Sudjito.

Pelaksana Redaksi:

Azman Fajar (Koordinator),
Puji Riyanto (Redaksi),
Launa (Redaksi).

Alamat Redaksi:

Jl. Kemang Selatan II
No. 2A, Jakarta 12730
Tel: 021 - 7193711 (hunting)
Fax: 021 - 71791358

Jl. Mampang Prapatan XIX No. 34
Mampang - Jakarta Selatan
Telefax. 21 7984559

Ilustrasi:

Kuss Indarto
© Friedrich-Ebert-Stiftung
(Dilarang meng-copy dan memperbanyak ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stiftung)

Penerbit

Pergerakan Indonesia dan Komite
Persiapan Yayasan Indonesia Kita

ISSN: 1978-9084



SALAM JUMPA

KEMISKINAN adalah realitas sosial aktual yang sulit dibantah sosoknya di negeri ini. Sejak zaman kolonial Belanda hingga kini, Indonesia tak pernah lepas dari stempel negara miskin. Dari waktu ke waktu, data orang miskin di negeri ini—terlepas dari perdebatan metodologi dan indikator yang digunakan—tidaklah membanggakan. Data BPS per Maret 2007 menunjukkan adanya tren penurunan jumlah orang miskin (dengan standar pendapatan Rp. 166.697,-) yang bertengger di angka 37,17 juta jiwa, dibandingkan dengan data BPS per Maret 2006 dimana angka orang miskin (dengan standar

pendapatan Rp. 151.997,-) berjumlah 17,8 persen atau 39,30 juta jiwa.

Namun, jika kita gunakan ukuran garis kemiskinan menurut versi Bank Dunia, dengan ukuran pendapatan 1 dollar AS (sekitar Rp 10.000,-) per orang per hari, akan menghasilkan penduduk miskin hampir dua kali lipat. Sementara jika kita gunakan ukuran pendapatan 2 dollar AS per harinya, dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 210 juta jiwa, maka akan menghasilkan separuh jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan.

Sebagai produk struktural, fenom-

ena kemiskinan kian lengkap dengan hadirnya berbagai kebijakan negara yang nyata tak berpihak pada rakyat. Lihat saja misalnya cara pemerintah menangani korban Lumpur Lapindo, kelangkaan BBM dan Elpiji, lonjakan harga-harga kebutuhan pokok, susu dan makanan bayi yang terinfeksi enterobacter sakazakii, politisasi dan bisnisasi kasus BLBI, berlarutnya pembahasan RUU Pemilu, wabah demam berdarah dan gizi buruk yang kembali meluas, hingga kerusakan fasilitas publik, seperti jalan, yang tak kunjung diperbaiki.

Bagi sebagian besar orang yang

GREATINGS

POVERTY without doubt is an actual social reality in this country. Since the colonial era of the Dutch, Indonesia has never overcome the status of "poor country". From time to time, the data of poverty –despite the methodological and indicator debate—speaks less, of nothing at all, encouraging. The March 2007 data from the Central Statistic Office (BPS) showed the

decreasing number of the poor (with standard income of Rp. 166.697,-) of 37,17 million people; compared to the March 2006 data which showed the number of poor (with standard income of Rp. 151.997,-) were 17,8 percent or 39,30 million people.

When using the poverty standard according to the World Bank, by a standard income of 1 US Dollar (ap-

proximately Rp. 10.000,-) per person per day, will almost double the number of the poor. Whereas the standard income of 2 US Dollar per day –assuming that the 210 million population of Indonesia are living under poverty line.

As a structural product, the clear phenomena of poverty are underlined by the absence of pro-poor policy. For example, the solution for those who suffer from the Lapindo mud tragedy, the scarcity of petrol and liquid gas, the skyrocketing prices for basic need; the infection from enterobacter sakazakii in milk and baby food, the politicized and commercialized case of BLBI, the ongoing quarrel over the legislation of

telah begitu lama hidup dalam lumpur kemiskinan, mereka tak lagi mampu membedakan antara kemiskinan sebagai sebuah produk kejahatan struktural (*by design*) dan kemiskinan sebagai semacam “takdir” atau “kutukan” yang mesti mereka terima. Dalam kerangka itu, kita kemudian bertanya: dimana sebenarnya tanggung jawab negara dalam soal kemiskinan? Banarkah motto rezim SBY-JK yang *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job* itu sungguh terselenggara? Mengapa pemerintahan di negeri yang demikian kaya ini, dari waktu ke waktu, tak pernah mampu mengentaskan jutaan rakyatnya dari balutan kemiskinan?

Dalam lingkup fungsi, apakah negara telah benar-benar maksimal dalam menjalankan seluruh fungsinya, terutama yang terkait pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat? Dalam aspek kemampuan, apakah negara telah sungguh-sungguh mampu merumuskan dan menegakkan kebijakannya secara konsisten, menjalankan roda birokrasi-pemerintahan secara efektif, mampu mengontrol KKN dan memelihara transparansi-akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara, dus menegakkan hukum?

Dalam praktik bernegara, menurut

Dr. Eko Prasodjo dari FISIP-UI, Indonesia dicirikan oleh lingkup fungsi negara yang luas, namun memiliki kemampuan yang amat terbatas. Dari sinilah berawal aneka persoalan: fungsi negara yang luas tak diiringi dengan kapasitas negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar warganya.

Hingga kini, setidaknya kita melihat para elite pemerintahan (baik yang berkiprah di eksekutif, legislatif, atau yudikatif) tak pernah serius menyatakan “perang terhadap kemiskinan” sebagai perintah konstitusi. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin tak bisa dianggap sebagai kesalahan biasa, namun ia harus dilihat sebagai bentuk kejahatan negara atas nilai-nilai kemanusiaan—termasuk kegagalan negara dalam memerangi praktik korupsi.

Sejak reformasi, pemerintah terus berganti. Namun, tak satupun pemerintahan pascareformasi yang sungguh-sungguh berhasil mem-promote hak-hak dasar warga negara, melindungi kaum miskin, dan mewujudkan keadilan sosial. Yang ada, birokrasi negara yang tidak efektif dan inefisien, law enforcement rapuh, dus ketidakbecusan otoritas negara dalam mengontrol KKN dan perilaku menyimpang

para aktornya. Pembengkalaian kasus BLBI, pembiaran fasilitas publik yang rusak, maraknya mark up dan korupsi anggaran, dan cueknya birokrasi kita merespon secara cepat kenaikan harga-harga sembako yang kian mencekik leher rakyat, adalah sederet contoh dari ketidakmampuan negara.

Hasil survei LSI (2006) menunjukkan, kondisi perekonomian rakyat pasca reformasi tidak lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Data kenaikan harga energi di dua desa di Jawa Tengah selama kurun waktu 15 tahun terakhir memperlihatkan, rakyat kian dipermiskin dalam mengonsumsi makanan (turun dari 63,8 persen menjadi 57,6 persen) dan belanja kesehatan (turun dari 4,0 persen menjadi 2,5 persen). Sementara ditelisik dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2006 Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 117 negara, dan tahun 2007 di peringkat 108 dari 189 negara. Bila dibandingkan dengan negara Asean lainnya, kita masih jauh tertinggal: Singapura di peringkat 25, Malaysia 63, Thailand 77, dan Vietnam 105 (Tempo, 17/12/07).

Orientasi kebijakan ekonomi *pro-growth* ternyata hanya melahirkan pertumbuhan ekonomi yang timpang. Wu-

election bill, the widespread cases of dengue and mal-nutrition, and various dysfunctional public facilities, such as the public road.

For most of the poor, they can no longer differentiate whether poverty is a product of structural crime that is by design; or a destiny which should be accepted. The framework leaves us with question, “where is the responsibility of the state in it?”. Has the *pro-growth*, *pro-poor*, and the *pro-job* slogan of the SBY-JK government been implemented? Why in such a rich and resourceful country like Indonesia, millions of its people cannot overcome the hardship.

On the functional aspect, has the state optimized in running its all functions in the fulfillment of the economic rights of the people? On the capability aspect, has the state genuinely formulated and implemented its policies consistently, have the governmental bureaucracies been run effectively, fighting against the corruption and maintaining transparency and accountability of the institutions with power; thus in law enforcement?

According to Dr. Eko Prasodjo of the Faculty of Social and Political Science, University of Indonesia, Indonesia has a broad spectrum of state functions; but with extremely limited capability

for implementation. Various challenges arising from the condition when the broad functions of the state are not matched by the capacity to fulfill the basic needs.

The elites in the government (either executive, legislative, or judicative) have never been serious in their efforts to state the “war on poverty” as the constitutional mandate. The inability of the government in its poverty reducing policy should not be seen as a usual failure; rather as a form of state crime against humanity, including state’s failure in combating corruption.

Since the 1998 reform, different

judnya adalah gap ekonomi yang kian lebar, yang makin menjauhkan negara dari misi keadilan sosial: mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (*pro-poor*). Globalisasi yang membonceng proyek demokratisasi kini menjadi senjata ampuh untuk memperkokoh praktik liberalisme di hampir seluruh bidang kehidupan. Pada level masyarakat, modal global kini menentukan hidup-mati masyarakat kita. Ketika modal ditarik, direlokasi, atau dilarikan para investor global, serentak jutaan orang akan menganggur dan kehilangan masa depan.

Proyek demokratisasi yang di-
 usung negara menjadi mandul, lemah, dan jauh dari harapan rakyat. Negara mengagungkan demokrasi politik sambil melalaikan prinsip keadilan sosial. Padahal, perwujudan demokrasi politik melalui representasi hak-hak politik rakyat tak cukup hanya mem-

bawa emansipasi politik. Ia juga wajib merealisasi pembebasan ekonomi: terbebasnya rakyat dari kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kemiskinan di Indonesia harus dilihat sebagai malapetaka kemanusiaan yang amat tragis. Di negara-negara maju, khususnya yang menganut sistem demokrasi sosial dan ekonomi pasar sosial, kemiskinan menjadi relatif, karena warga negara yang miskin dan menganggur masih mendapatkan tunjangan sosial dari negara. Tapi di Indonesia, orang miskin betul-betul kehilangan harapan dan masa depan. Mengapa? Karena tak ada satupun jaringan pengaman yang disiapkan negara untuk menolong warga miskin.

Negara yang lamban dalam mengatasi kemiskinan, dan sanggup menggandengkan demokrasi dengan kesejahteraan ekonomi, perlahan namun

pasti, akan menghadapi krisis legitimasi. Tanpa kemakmuran sosial, sehebat apapun praktik demokrasi yang diinisiasi oleh sebuah rezim, ia akan terus menghadapi gugatan rakyat. Rezim yang melulu bersandar pada retorika demokrasi dan klaim pertumbuhan ekonomi, dipastikan akan kehilangan kesetiaan dan rasa hormat dari rakyatnya.

Meminjam tesis Ben Anderson tentang "*imagine society*", kemakmuran di negeri ini sepertinya masih berada dalam tahap yang "dibayangkan"; atau dalam bahasa Parakitri Tahi Simbolon masih ada dalam proses "menjadi Indonesia". Indonesia yang dibangun dengan susah payah melalui perjuangan panjang kemerdekaan, oleh Soekarno memang kerap dilihat sebagai negeri "revolusi", yang terus berada dalam fase "menjebol dan membanjir". Namun, kita meyakini, Indone-

leaders took the government but none of them had genuinely succeeded in promoting the basic rights of the citizens, protecting the poor, and bringing social justice. What we have today is the incompetent, inefficient and ineffective bureaucracy, with weak law enforcement. The state authority has little power in controlling the clientelistic network, and to add more examples that shows the inability of the state, the case of BLBI, absence in public facilities maintenance, the common practice of corruption and mark up in budgeting, and the ignorance shown by the government in finding solution to the ongoing and severe food crisis.

The survey of the Indonesia Survey Center (LSI, 2006) showed that the people's economy after the reform is not better than during the New Order period. The data of the energy price rising in two villages in Central Java shows that during the last 15 years people are getting poorer based on their food consumption level (down from 63,8 percent to 57,6 percent) and

the health spending level (down from 4,0 percent to 2,5 percent). While the Human Development Index in 2006 showed Indonesia in the position 110 of 117 states, in 2007 Indonesia was in the 108 out of 189 states. In comparison to the other Southeast Asian countries, we are way behind. Singapore is in 25, Malaysia 63, Thailand 77, and Vietnam 105 (Tempo, 17/12/07).

The pro-growth policy orientation at the end only resulted in development gap. The wider economy gap which drives the state away from social justice: pro-poor policy which will bring prosperity and welfare to the people. Globalization which come with the democratization projects become the solid weapon for strengthening liberalism in all aspect of life. In the society, the global capital has hold the string attached to the lives of people. When investment are being withdrawn, relocated, or "secured" out of the country, millions of Indonesians will lose their job and the future.

The democratization project em-

braced by the state in the beginning become dysfunctional, weak, and far from people's expectation. The state celebrates democracy but ignores and abandons the principle of social justice. The embodiment of political democracy through the representation of people's political rights is not enough. It is also expected to bring the economy liberation into realization: poverty elimination and creating the social justice and social welfare for all people of the country.

Poverty in Indonesia should be seen as a horrible tragedy of humanity. In many of the developed countries, especially the social democratic countries with social market economy; poverty become a rarity. The less fortunate citizen, i.e. the jobless and homeless are supported through social safety net provided by the state. But in Indonesia, the poor really have to fight on their own, without any support from the state, and the prospect of losing the future become eminent. The reason behind this is the absence of solid

sia yang kita cintai ini belum masuk dalam kategori “negara gagal” (*failed state*), apalagi “negara runtuh” (*collapsed state*). Namun, ia sejak waktu lama mulai terlihat sebagai “negara lemah” (*weaked state*) yang cenderung abai terhadap hak-hak rakyatnya (*state neglect*).

Dalam latar setting sosial-politik seperti itu, munculnya simponi rindu rakyat akan “zaman normal” (stabilitas politik dan ekonomi ala Orde Baru) kian memiliki dasar. Atas fakta itu, kita bertanya, sampai kapan model pengelolaan negara yang anti-rakyat ini akan terus dipertahankan? Apakah sepuluh tahun reformasi bukan saat yang tepat, dimana politik negara adalah seni untuk berkhidmat pada rakyat?

Atas dasar argumen di atas, Jurnal Demokrasi Sosial edisi kedua ini mencoba mendiskusikan kembali persoalan kemiskinan dengan mengundang

sejumlah narasumber yang dianggap memiliki kompetensi untuk men-share problem kemiskinan sebagai tanggung jawab kolektif kita sebagai bangsa. Dalam upaya untuk mendalami dan menyusuri semak belukar kemiskinan itu, diskusi tematik Jurnal Sosial Demokrasi mengundang Faisal Basri, Rizal Ramli, dan Sugeng Bahagijo. Gagasan dan pemikiran ketiga narasumber kita tersebut dapat dibaca lebih utuh dalam Rubrik Laporan Utama jurnal ini. Sementara untuk elaborasi gagasan basic income sebagai alternatif model pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang ditulis oleh Sugeng Bahagijo, pembaca dapat menyimak lebih utuh dalam Rubrik Artikel.

Selanjutnya, guna memperkaya gagasan dan kedalaman analisis, redaksi juga menyajikan hasil wawancara dengan Romo Sandyawan Sumardi. Dalam topik yang berbeda, Ivan Ha-

dar dan Arie Sudjito juga menyertakan opininya dalam jurnal edisi kedua ini. Selanjutnya, redaksi juga menampilkan resensi buku yang ditulis oleh Guruh Soekarnoputra dan Fadjroel Rachman serta profil Uni Sosdem.

Diskusi tematik redaksi dipandu oleh Ivan Hadar dan dihadiri oleh tim redaksi Jurnal Sosial Demokrasi dan partisipan lainnya, seperti Amir Effendi Siregar, Nur Iman Subono, Arie Sudjito, Azman Fajar, Launa, Puji Riyanto, Bini Buchori, Bambang Warih Kusumo, Iqbal, Roni Febrianto, dan Erwin Schweisshelm beserta staf Friederich Ebert Stiftung yang memfasilitasi diskusi ini. Mudah-mudahan, ide, gagasan dan berbagai perspektif pemikiran yang disajikan tim redaksi dalam jurnal edisi kedua ini bisa memberi manfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca! ***

and effective social safety net which should be provided by the state.

A country with slow progress on poverty alleviation policy, and which claims to bring together democracy and economic prosperity, will definitely experience the legitimacy crisis. Without any social prosperity, even a good democratic country will be questionable by the people. Regime with empty jargon of democracy and economic growth will lose the loyalty, respect, and legitimacy from its constituent.

By referring to Ben Anderson's thesis on 'imagine society'; prosperity and welfare are things that are unfortunately still in the level of imagination. Or according to Parakriti Tahi Simbolon, it is still in the process of 'becoming Indonesia'. The long struggle for independence, by Soekarno was referred to by "a state of revolution", eventually brings this country in the phase of 'breaking and developing'. But we also strongly believe, that Indonesia is not a failed state, or the worse, weak state which neglecting the people's rights.

Moving from such socio-political setting, there is a tendency of going back to the 'good old time' of the New Order with its stability in economy and politics. If that is to happen, how long are we going to keep the elite-centered kind of development? Isn't the moment of 10 years of reform made perfect to prove that state politics is built upon and comprised of the people.

Based on such arguments, Jurnal Demokrasi Sosial in the second edition will bring about the issue of poverty by inviting prominent resource persons with competence in sharing on poverty as the collective responsibility of a nation. In discussing further about the topic, in the occasion of our thematic discussion, Jurnal Sosial Demokrasi invited Faisal Basri, Rizal Ramli, and Sugeng Bahagiyo whose thoughts and insights can be found in the Primary Topic (Rubrik Laporan Utama) of this edition. Meanwhile, Sugeng Bahagiyo's elaboration of 'basic income' as the alternative for poverty reduction strategy in Indonesia can be found in the

second part of this journal, the Rubrik Artikel.

In further enriching the ideas and the depth of analysis, an interview with Father Sandyawan Sumardi; Ivan Hadar and Arie Sudjito's opinion column on different topics; a review of the recent publication written by Guruh Soekarnoputra and Fadjroel Rachman, and the profile of Uni Sosdem will complete this edition.

The thematic discussion of the editorial board of the journal was moderated by Ivan Hadar and attended by other fellows; Amir Effendi Siregar, Nur Iman Subono, Arie Sudjito, Azman Fajar, Launa, Puji Riyanto, Bini Buchori, Bambang Warih Kusumo, Iqbal, Roni Febrianto, Erwin Schweisshelm, and the staffs of the Friederich Ebert Stiftung that had facilitated the discussion. We hope that ideas and insights from different perspective as presented in this second edition will be inspiring and in all, beneficial, for all of you. Enjoy reading!***

Ketimpangan dan kemiskinan adalah fenomena sosial yang begitu konkret dan nyaris absolut di negeri ini. Data BPS per Maret 2007, misalnya, mencatat bahwa jumlah penduduk yang hidup miskin—dengan standar garis kemiskinan (GK)—dengan standar pendapatan Rp. 166.697,- ada sekitar 37,17 juta jiwa. Masih menurut laporan BPS, per Maret 2006, orang miskin dengan standar pendapatan Rp. 151.997,- berjumlah 39,30 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa, jelas angka orang miskin di negeri ini amat memilukan. Dalam bahasa ekonomi-politik, pemerintah Indonesia pasca-Soeharto telah gagal mewujudkan amanat reformasi: membangun kualitas kehidupan demokrasi yang berkhidmat pada kesejahteraan rakyat. Padahal, konstitusi kita dengan sangat tegas mengatakan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Paparan di atas menunjukkan betapa upaya menanggulangi kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia. Berbagai usaha gagal mengentaskan masyarakat miskin di Indonesia, bahkan kondisinya menjadi lebih buruk. Rendahnya komitmen politik dalam mengentaskan kemiskinan membuat persoalan pengentasan kemiskinan menjadi semakin buruk. Atas alasan ini, tim Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi menurunkan tema kemiskinan dalam edisi ke-2 sebagai ikhtiar mencari peta jalan baru penghapusan kemiskinan di Indonesia.

Pada edisi ini, tim redaksi menghadirkan tiga narasumber, yakni Sugeng Bahagijo dari Yayasan Prakarsa, Rizal Ramli dari Indonesia Bangkit, dan Faisal Basri dari FE-UI. Diskusi dipandu oleh Ivan A. Hadar (Ide Indonesia) dan dihadiri oleh tim Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi seperti Amir Effendi Siregar (akademisi dan praktisi media), Nur Iman Subono (Demos), Arie Sudjito (FISIPOL-UGM), Azman Fajar (Pergerakan Indonesia), Launa (ALNI Indonesia), Puji Rianto (Pusat Kajian Media & Budaya Populer), dan beberapa peserta lainnya, seperti Bini Buchori (Prakarsa), Bambang Warih Kusumo (Uni Sosdem), Iqbal, dan Roni Febrianto dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Diskusi tematik ini juga dihadiri oleh Resident Director beserta staf Friedrich-Ebert-Stiftung. Berikut hasil diskusi yang digelar oleh tim Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi.



Moderator (Ivan Hadar)

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana telah disepakati oleh tim redaksi Jurnal Sosial Demokrasi yang menjadi fasilitator diskusi kita malam ini, diskusi kali ini akan membahas sebuah tema yang menarik dan tetap aktual di Indonesia, yakni masalah kemiskinan. Seperti telah disepakati, diskusi kita kali ini akan diisi oleh Sugeng Bahagijo, Faisal Basri, dan Rizal Ramli. Mas Sugeng dan Mas Faisal telah hadir di tengah-tengah kita, tetapi Pak Rizal Ramli, menurut informasi, masih dalam perjalanan menuju ke sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Mas Sugeng untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya.

Sugeng Bahagijo

Terima kasih Mas Ivan. Pada dasarnya, skema *basic income* (BI) secara umum dapat diartikan sebagai “jaminan pendapatan minimum yang diberikan kepada semua warga negara tanpa syarat sebagai hak dan dilakukan secara periodik. Skema BI ini mirip dengan asuransi kesehatan universal yang memberi jaminan kepada semua warga negara, baik yang menjalani



Mencari Peta Jalan Penghapusan Kemiskinan

hidup sehat ataupun mereka yang memiliki gaya hidup tidak sehat. Pertanyaan kita adalah apakah BI merupakan skema kebijakan yang cocok dan ampuh untuk mengatasi problem kemiskinan di Indonesia? Apakah BI merupakan sebuah mekanisme yang etis-adil untuk meringankan beban sosial ekonomi kaum "miskin" dan setengah "miskin" yang kini berjumlah lebih dari 70 juta orang? Apakah BI bisa menjadi sebuah instrumen kebijakan dan kelembagaan yang adil dan efektif untuk menyelamatkan generasi masa kini dan masa depan Indonesia (seperti kaum miskin, kaum perempuan, kaum ibu dan anak-anak)?

Hampir seluruh penulis dan analis bersepakat bahwa gagasan *basic income* atau BI jika dirunut ke belakang berasal dari gagasan Thomas Paine, seorang wartawan-penulis dan intelektual yang juga dikenal sebagai bapak ideologi kemerdekaan Amerika Serikat dan pencetus gagasan hak asasi manusia. Dalam naskahnya yang diajukan ke Majelis Nasional Perancis tahun 1796, Paine menganjurkan jaminan pendapatan bagi semua warga negara sebagai wujud persamaan hak atas sumber daya yang diberikan oleh Alam.

Selain Thomas Paine, ada dua penulis Perancis dan Belgia, Joseph Charlier (1816-1896) yang dalam berbagai karyanya telah mengusulkan skema BI ini, yang disebutnya sebagai "*guaranteed minimum*" atau "*territorial dividend*" dan Francois Huet (1814-1869), pengajar filsafat di Universitas Ghent, Belgia, yang menganjurkan gagasan "pendidikan dan aset untuk semua". Sejak Thomas Paine menggulirkan gagasan BI pada abad ke-18, Van Parijs menuturkan bahwa ide tentang BI telah diajukan oleh berbagai penulis dengan sebutan beragam, mulai dari "*territorial dividend*", "*state bonys*", "*demogrant*", "*citizen wages*", "*universal benefits*", hingga ke "*allocation universelle*".

Menurut pandangan saya, Indonesia perlu mengadopsi dan menguji coba konsep BI. Paling tidak ada tiga alasan utama mengapa konsep BI penting untuk kita diskusikan sebagai skema alternatif perlindungan sosial dan model pengurangan kemiskinan. Pertama, BI merupakan skema yang memastikan adanya redistribusi dan belanja sosial yang luas. Kedua, secara politik, BI bisa menjadi model institusi sosial ekonomi yang membedakan demokrasi Indonesia paska-reformasi

dengan institusi sosial ekonomi yang berlalu di era Orde Baru. Ketiga, dari segi dana, Indonesia bisa dikatakan mampu melaksanakannya. Menurut hemat saya, Indonesia mampu mengalokasikan 2-4 persen dari PDB-nya untuk melaksanakan skema BI.

Skema BI dalam kerangka mengatasi kemiskinan di Indonesia menarik untuk didiskusikan terkait dengan Laporan Bank Dunia tahun 2007 lalu yang bertajuk "Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". Dalam laporan Bank Dunia itu, disebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia menunjukkan ciri-ciri miskin pendapatan dan non-pendapatan, dimana (a) hampir 41 persen penduduk Indonesia hidup di antara garis kemiskinan 1-2 dolar per hari; (b) kemiskinan dari segi non-pendapatan seperti kurangnya konsumsi dan lemahnya akses atas layanan kesehatan, pendidikan, dan air minum; (c) ketimpangan antarwilayah, dimana angka kemiskinan di Jawa/Bali berkisar pada angka 15,7 persen, sementara di Papua 38,7 persen. Lebih dari sekedar persoalan statistik, jika fenomena ini kita kaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka kualitas kemiskinan di Indone-

sia akan semakin nyata dan konkret: angka gizi buruk yang tinggi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun; angka kematian ibu di Indonesia yang juga demikian tinggi (307 untuk setiap 100.000 kelahiran, tiga kali lebih tinggi dibanding Vietnam atau enam kali lebih tinggi ketimbang Malaysia dan China); lemahnya proses dan hasil pendidikan, yakni jumlah angka putus sekolah yang tinggi, khususnya peralihan dari SMP ke SMA.

Mengapa Indonesia yang dianggap banyak pihak telah cukup berhasil memulihkan ekonominya dan mencetak perbaikan-perbaikan nyata pada level makro-ekonomi, tetapi tidak mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran? Beberapa argumen para pakar, barangkali, bisa saya rujuk untuk menjawab problematika ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Indonesia tidak dibarengi dengan belanja sosial yang cukup dan peningkatan pendapatan pekerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat semestinya dapat meningkatkan pendapatan negara (pajak dan nonpajak) yang pada gilirannya dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk belanja sosial, termasuk di dalamnya kebijakan dan institusi pasar kerja (*labour market*).

Bisa jadi, mengutip Isabel Ortiz, kebijakan sosial dan pertumbuhan ekonomi—sebagai dua wilayah yang sama penting—yang berlangsung dalam pembangunan tidak berjalan seiring. Contoh lain adalah program “Indonesia Sehat 2010” yang diluncurkan Departemen Kesehatan tahun 2002 yang mengamanatkan alokasi anggaran kesehatan (APBN dan APBD) sebesar 20 persen. Jika belanjanya tidak efektif/salah sasaran, maka amat mungkin menjadi tidak solutif dalam mengatasi problem kemiskinan anak atau angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Demikian juga yang terjadi dalam sektor ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi hanya mampu

menciptakan lapangan kerja yang berupah murah dengan status pekerjaan yang tidak pasti (*outsourcing*) dan tidak mencukupi kehidupan minimum pekerja (*the working poor*).

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, studi Gary Burles dan Timothy Smeeding (2007) tentang mengapa tingkat kemiskinan di AS lebih parah ketimbang negara-negara OECD lainnya menemukan bahwa kemiskinan di AS lebih disebabkan perbedaan kebijakan sosial ketimbang kinerja pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kebijakan itu dapat diamati dari (a) seberapa jauh belanja sosial untuk kaum miskin, dan (b) seberapa mencukupi tingkat upah minimum di sebuah negara di banding negara lainnya.

Kedua, pembangunan ekonomi acapkali tidak diiringi dengan kebijakan dan institusi perlindungan sosial yang memadai. Padahal, dalam ekonomi pasar dan globalisasi, dinamika makro-ekonomi senantiasa menghadapi guncangan (*shock*) seperti kenaikan harga BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok. Studi Guy Standing (2007) menyimpulkan bahwa kemiskinan tidak sekedar gejala sesaat, tetapi merupakan perkara struktural yang disebutnya sebagai kerentanan ekonomi (*economic insecurity*) yang bersumber dari risiko-risiko sosial ekonomi (seperti pengangguran/PHK, penyakit, kecelakaan, dan kematian) dan faktor ketidakpastian (seperti bencana alam, perubahan musim atau iklim) serta faktor kemampuan yang terbatas untuk mengatasi dan memulihkan diri (*to recover*).

Ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan “program redistributif”, baik dalam konteks distribusi aset maupun distribusi tunai (*cash transfer*). Faktanya adalah warga negara dan masyarakat terdiri dari lapisan sosial yang beragam (ada yang berbakat dan berpendidikan tinggi, ada juga yang tidak berbakat dan berpendidikan rendah, ada laki-laki dan perempuan serta

ada yang sehat dan yang cacat). Oleh karena perbedaan kapasitas semacam itu, kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang sosial ekonomi tidaklah sama. Karena itu, distribusi menjadi penting mengingat distribusi akan memberikan kemampuan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi seperti kemampuan daya beli atau akses atas pelayanan pemerintah. Situasi ini senada dengan pengamatan Prof. Mubyarto yang menekankan perlunya kebijakan distributif dan alternatif kepada kaum miskin.

Keempat, pertumbuhan ekonomi juga tidak berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan karena faktor politik. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan berarti sama dengan sekedar menguatkan angka kemiskinan, tetapi juga menyangkut sikap dan tanggapan rezim politik atas tekanan dan insentif. Kebijakan penanggulangan kemiskinan, sebagai kebijakan ekonomi, tidak pernah lepas dari pengaruh dan aspirasi politik. Ini karena kebijakan politik amat menentukan seberapa luas/sempit belanja sosial, perlindungan sosial, dan redistribusi ekonomi bisa dijalankan oleh pemerintah. Di sini, politik tidak saja dalam arti persaingan dan perimbangan kekuatan politik, tetapi juga menyangkut ide-ide konseptual dan normatif dari elit politik yang sedang berkompetisi.

Peter Hall (1993) menyatakan bahwa reformasi kebijakan (*policy reform*) tidak saja merupakan hasil “pertunjukkan kekuasaan” (*contest of power*) di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada, tetapi juga proses “*playing with ideas*”, dalam arti sejauh mana para aktor kebijakan setuju/tidak setuju atas definisi kognitif (ragam dan pilihan kebijakan teknis) sebuah masalah kebijakan, dan *benchmark normative* (adil atau tidak adil) bagi solusi-solusi kebijakan yang dipandang efektif. Sementara itu, ilmuwan politik AS, Hugh Heclo (1974), mengingatkan bahwa pembuatan kebijakan (*policy making*)

merupakan hasil dari sebuah proses *puzzling* (yakni sebuah proses mendiagnosa masalah, menyusun prioritas, dan menemukan solusi efektif) dan proses *powering* (yakni sebuah proses yang berurusan dengan penyusunan dukungan politik dan masyarakat untuk sebuah solusi tertentu).

Paling tidak, terdapat empat skenario kebijakan sosial dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Skenario ini mulai dari yang paling ringan dan tidak membawa konsekuensi apapun dalam alokasi anggaran dan manajemen birokrasi hingga ke skenario yang paling ideal, yang mensyaratkan perubahan banyak hal.

Pertama, skenario status quo. Dalam hal ini, Indonesia hanya melanjutkan saja pola-pola kebijakan pertumbuhan ekonomi atau rezim produktivitas sebagai sumber utama dan jalan satu-satunya. Jika skenario ini yang berjalan, maka kebijakan sosial Indonesia 10-20 tahun ke depan hanya akan berjalan di tempat.

Kedua, skenario *welfare-state* ala Swedia. Di sini, Indonesia dapat mengikuti kebijakan sosial ekonomi Swedia yang berhasil menjaga keseimbangan antara *generosity* kebijakan sosial dan *competitiveness* perekonomian. *Welfare-state* adalah sebuah sistem yang mampu mengombinasikan kebijakan efisiensi pasar dan keadilan sosial.

Ketiga, skema jaminan kerja. Sebagaimana kita ketahui, logika produktivitas masih menjadi kepercayaan dominan kaum elit Indonesia. Guna memberi kompensasi kepada fenomena pengangguran dan kemiskinan serta memelihara tingkat kepercayaan publik (citra pemerintah yang peduli), beberapa skema kebijakan kompensasi kemudian dijalankan seperti tercermin dari semangat APBN Indonesia yang berciri stabilitas dibandingkan dengan ekspansi.

Keempat, kendati logika produktivitas masih menjadi dasar kebijakan dominan kaum elit Indonesia, tetapi

pada saat yang sama telah muncul kesadaran dan pengakuan bahwa rezim produktivitas memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan logika non-produktivitas (pertumbuhan yang berkelanjutan). Dalam konteks ini, skema BI secara parsial sesungguhnya telah berjalan di Indonesia, yakni dengan cara memperluas jangkauan dan manfaat program PKH yang ada sekarang ini kepada seluruh kelompok miskin dan hampir miskin dengan porsi terbesar diberikan kepada kaum perempuan, anak-anak, dan kaum miskin.

Menurut hemat saya, program BI di Indonesia diperkirakan akan muncul atas alasan beberapa hal seperti: (i) ada rencana untuk memperluas caku-

agai “skenario utopis-realis”, berusaha menggambarkan sesuatu yang mungkin akan dilaksanakan dalam kondisi nyata, yakni dari konteks ekonomi pasar dan kemampuan birokrasi Indonesia dalam mengumpulkan pajak dan non-pajak dan dalam men-deliver kebijakan sosial, tetapi masih mengandung cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Saya kira, perdebatan tentang BI hingga kini belum selesai, khususnya untuk negara-negara Dunia Ketiga. Untuk kasus Indonesia, pertanyaannya adalah kalau kita mengikuti skema transfer tunai tak bersyarat seperti model BI, apakah birokrasi kita mampu membuat pendataan, dan apakah birokrasi kita akan cukup cekatan



pan program Askeskin hingga meliputi 70 juta penerima; (ii) dari segi pendanaan, Indonesia memiliki kemampuan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 persen dari PDB-nya untuk program semacam BI; (iii) kemungkinan program PKH akan kian diperluas, baik dalam segi cakupan maupun besaran tunjangan tunainya; (iv) parpol parpol besar dan tokoh-tokoh politik mungkin saja mencari gagasan atau tengah melakukan belanja ide tentang program baru yang akan mereka lakukan untuk memperkuat daya tarik program-program parpol dalam masa pemilu 2009.

Situasi ini, yang saya sebut seb-

mentransfer uang sebanyak itu kepada, katakanlah, 70 jutaan rakyat kita yang miskin? Pengalaman kita memang masih minim sehingga program PKH transfer tunai hingga kini baru menjangkau kurang lebih 600 ribu keluarga di Indonesia. Program transfer tunai memang masih bersifat percobaan karena dana yang dilibatkan atau digulirkan dalam program PKH juga masih sangat sedikit.

Kritik lain atas skema BI adalah program ini akan cenderung membuat orang malas bekerja. Alasannya, “untuk apa saya kerja karena saya sudah mendapat jaminan dari negara?”. Nah,



proponen BI mengatakan bahwa simulasi ekonomi yang dibuat Van Der Linden dan beberapa ekonom, misalnya, mengatakan bahwa dalam konteks ekonomi seperti Jerman dan Belgia yang unionism economy (artinya adanya serikat pekerja yang kuat dan memiliki bargaining position yang tinggi), justru dampaknya akan bagus. Orang justru tidak malas bekerja karena dengan bekerja orang mereka akan mendapat bonus dari negara.

Bandingkan dengan Indonesia, mereka yang sudah bekerja saja gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Jadi menurut saya, orang Indonesia bukan malas bekerja, masalahnya dengan bekerja saja mereka amat kesulitan mencukupi kehidupan yang layak. Namun, van Der Linden mengakui bahwa belum ada studi ekonometri untuk kasus Indonesia, yang sifat informalitas ekonominya begitu tinggi.

Ivan Hadar

Terima kasih Mas Sugeng. Waduh, paparannya sangat menarik dan mendalam. Banyak sekali literatur yang dibaca dan disertakan dalam paparan tadi. Namun, menurut saya, inti tesis

Mas Sugeng sebenarnya masih sangat tradisional. Dalam artian, solusi gagasan sosdem tentang kesejahteraan sosial sebenarnya lebih ok punya dibandingkan tesis BI. Ini karena dalam tesis sosdem gagasan pertumbuhan dan kesejahteraan bisa berjalan bergandengan apalagi jika kita tambahkan dengan prinsip persaudaraan (*fraternite*) seperti diusung dalam revolusi Perancis.

Sebenarnya, di sini, juga terdapat diskusi mengenai paradigma untuk mengatasi, memberantas atau mengentaskan kemiskinan. Menurut kaum liberal, harus dengan jalan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya meskipun dalam praktiknya di lapangan tidak terjadi. Faktor penyebabnya macam-macam, misalnya, benturan antara skema padat karya dengan problem efisiensi, dimana umumnya perusahaan akan fokus ke situ. Kita sudah cukup mengerti mengenai hukum ekonomi yang dianut oleh banyak perusahaan, yakni bagaimana mengupayakan sebanyak mungkin pendapatan dan menekan sekecil mungkin pengeluaran.

Paradigma lain, seperti akses kepada orang miskin sebagai kata kunci, seperti dikemukakan oleh Amartya

Sen dan para ekonom lainnya. Karena orang miskin hanya mempunyai modal dengkul sehingga jika mereka tidak mempunyai akses terhadap pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, maka sama saja bohong. Pertanyaan yang mungkin sangat menarik, dan itu sebagian sudah dijawab oleh Mas Sugeng, yaitu sisi praktis dari pertimbangan-pertimbangan pemikiran teoritis tadi. Dari segi finansial, Indonesia sangat mungkin. Jadi, 2-4 persen PDB Indonesia sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai kesejahteraan rakyat dalam arti luas. Namun, tentu saja, harus ada *political will*. Ini karena jika kita amati secara retorika, maka motto kabinet sekarang, pro-poor, pro-job, dan pro-growth, bagus banget. Motto itu mirip-mirip Revolusi Perancis. Namun, kayaknya hasilnya jadi *prosotan*. Ini, barangkali, karena kurang *political will*.

Dalam konsep sosdem, pro-growth dan pro-poor berjalan seiring. Artinya, pertumbuhan yang memberikan akses kepada orang miskin, paling tidak melalui program-program konkret pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak hidup menjadi miskin. Kita juga menyadari bahwa masalah birokrasi hingga kini juga masih menjadi persoalan yang dalam implementasinya masih yang sangat pelik. Di Indonesia, program kemiskinan sangat banyak, tapi sekali lagi implementasinya tidak berjalan, termasuk bantuan untuk kesehatan dan pendidikan orang miskin yang hingga kini masih bermasalah.

Ada yang menarik tadi, contoh Eropa seperti Skandinavia atau Swedia. Tapi Pak Erwin, di Jerman, banyak anak-anak muda yang menganggur senang banget kalau bisa tidak kerja karena mereka mendapatkan tunjangan. Selanjutnya, mungkin liburan. Di Swedia, ada kecenderungan bahwa jaminan sosial dengan skema yang ada saat ini dinilai terlalu mahal. Di beberapa negara Eropa Barat lainnya, juga menunjukkan keberatan dengan skema

jaminan sosial seperti itu. Jadi, sosdem di Eropa akhir-akhir ini kelihatannya makin bergerak ke kanan atau ke tengah. Intinya, di negara-negara kesejahteraan yang mengeluarkan biaya jaminan sosial yang besar bagi warga negaranya, kini, terlihat mulai berkurang. Apakah ini merupakan kecenderungan global, dan nanti menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan negara-negara yang ingin melakukan perubahan seperti Indonesia? Inilah yang menjadi persoalan.

Saya pikir ini beberapa percikan pemikiran, yang tentu saja harus mendapatkan masukan dari teman-teman sekalian karena amat penting, dan agar diskusi kita menjadi lebih berkembang. Pertanyaan penting dan mendasar atas isu kemiskinan, mungkin bisa langsung saja kita serahkan kepada Bang Faisal, terutama terkait dengan strategi praktis untuk menanggulangi kemiskinan lewat BI dilihat dari sisi fiskal, dan beberapa contoh kasus di beberapa daerah kabupaten/kota yang selama ini punya keinginan besar untuk melakukan perbaikan. Sementara Arie juga punya pengalaman lapangan menarik di tingkat lokal, soal inisiatif perbaikan ini. Kami persilahkan Mas Faisal untuk presentasi kedua.

Faisal Basri

Baik terima kasih. Tadi, kita sudah sama-sama mendengarkan paparan Mas Sugeng dari segi teoritis yang cukup komprehensif soal kemiskinan dan kaitannya dengan skema BI. Mungkin saya akan mencoba memotret kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia berdasarkan data-data yang tersedia. Tadi, tesis pertama adalah pertumbuhan ekonomi akan share kepada penurunan kemiskinan. Tentu saja, kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi tentu saja kemiskinan tidak akan turun. Tapi kalau saya lihat, persoalannya bukan pada pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan turun, tetapi pada

seberapa besar pertumbuhan ekonomi itu mengurangi kemiskinan.

Nah kita lihat, ekonomi tumbuh terus dan angka kemiskinan juga turun, kalau kita hanya melihat angkat kemiskinan, terlepas dari rekayasa yang mungkin ada. Sebaliknya, saya lebih mementingkan *pattern of growth*-nya. Kalau *pattern of growth*-nya seperti ini, maka kemiskinan niscaya turunnya lamban. Ini karena pertumbuhan ekonomi terjadi di jasa-jasa sektor modern yang tumbuh di kota. Sejak tahun 2007, *growth*-nya 9 persen, tapi yang mengalami pertumbuhan adalah transportasi, komunikasi, perdagangan, restoran, keuangan, elektronik, dan macam-macam. Sementara itu, basis orang miskin berada di sektor pertanian, yang nota bene di desa. Datanya, *agriculture* pertumbuhannya gembel. Kemudian, di sektor manufaktur, pertumbuhannya juga melambat bahkan di triwulan keempat pertumbuhannya tinggal 3,8 persen.

Pada masa Orde Baru, industri manufaktur selalu *double digit* atau *pa-ling* tidak jauh di atas PDB-nya. Dari gambar ini (lihat gambar 1 dan 2), dapat dilihat dengan jelas bahwa pertumbuhan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan kalau *pattern of growth*-nya seperti ini, orang kayanya naik ke langit, sementara orang miskinnya nyungsep, sudah pasti. Jadi, *pattern of growth* yang jadi konsen kita. Sekarang bagaimana mengukur kemiskinan? Kemiskinan ada banyak jenisnya, ada miskin absolut, relatif, kronis, dan transient. Saya tidak akan masuk ke perdebatan ini karena akan dapat kita lihat bersama. Namun, inti kemiskinan absolut adalah pada ada tidaknya pemenuhan kebutuhan kalori minimal 2.100 kilo kalori per hari, plus kebutuhan dasar non-makanan. Kemudian, sumber data kemiskinannya adalah Susenas Modul Konsumsi. Tapi, bukan modul konsumsi versi kita (baca: golongan ekonomi menengah), tapi modul konsumsi orang

miskin. Di sini, komputer tidak masuk dalam perhitungan, konsumsi daging juga bukan kualitas besar, tapi daging tetelan. Ada beberapa komoditas yang mengukur garis kemiskinan, mulai dari beras sampai rokok kretek/filter. Jadi, merokok juga dapat menyebabkan kemiskinan karena konsumsi rokok bisa dialihkan ke susu anak. Bantuan tunai langsung (BLT) bersyarat, penerimanya tidak boleh merokok, kalau orang tuanya merokok dia belum pantas menerima BLT.

Menurut saya, Data Susenas Modul Konsumsi versi BPS cukup jelas, termasuk data non-makanan. Secara metodologi, data Susenas dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, kawan-kawan bisa lihat dari data ini, sekalipun banyak komoditasnya, tetapi 74,74 persen makanan. Kondisi ini akan mempunyai implikasi yang serius terhadap angka kemiskinan jika harga pangan dan minyak dunia terus mengalami kenaikan. Jumlah orang miskinnya naik dengan cepat. Ketika makanan pokok orang Indonesia (terutama beras) naik, angka orang miskin pasti naik. Ini karena turun-naiknya jumlah orang miskin di Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga pangan.

Situasinya akan menjadi lebih parah jika disparitas kota-desa juga dipersoalkan. Seperti kita tahu, mayoritas orang miskin tinggal di desa, di sektor pertanian, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan seyogyanya diarahkan untuk mengatasi sumber-sumber masalah kemiskinan di desa, sedangkan di perkotaan kebijakan diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah di sektor jasa-jasa dan sektor informal.

Sebagian besar kantong kemiskinan di Indonesia sebenarnya berada di Jawa, utamanya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di sini, kita tinggal menyesuaikan agenda pemberantasan kemiskinan dengan proporsi jumlah penduduknya. Selanjutnya, karena dana penanggulangan kemiski-

“

Jadi, merokok juga dapat menyebabkan kemiskinan karena konsumsi rokok bisa dialihkan ke susu anak. Bantuan tunai langsung (BLT) bersyarat, penerimanya tidak boleh merokok, kalau orang tuanya merokok dia belum pantas menerima BLT.

”

nan yang dimiliki pemerintah terbatas, sedapat mungkin dana untuk orang miskin penggunaannya juga harus fokus, mana yang ditargetkan, agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tersusun secara baik, dan bukannya *gebyah-uyah*, hantam kromo, atau pukul rata. Kebijakan penanggulangan kemiskinan, menurut saya, tidak dapat diatasi secara pukul rata seperti itu.

Menariknya, dua jenderal yang sama-sama begonya bicara kemiskinan. Yang satu bilang data Bank Dunia, yang satu bilang data BPS. Padahal, semuanya data BPS. Namun, menentukan garis kemiskinannya adalah suka-suka. Saya juga bisa membuat garis kemiskinan versi Faisal. Misalnya, saya buat saja 5 dolar maka pasti keluar angka 90 persen orang Indonesia masuk ke dalam kategori miskin. Jadi, bukan sumber datanya yang menjadi masalah, tetapi definisi kemiskinannya yang menentukan. Inilah yang kemudian menjadi kontroversi. Mudah-mudahan polemik ini bisa kita luruskan dan tengahi dalam Jurnal ini.

Selanjutnya, mari kita lihat rentannya orang-orang miskin ini. Versi kemiskinan absolut BPS menempatkan garis kemiskinan per harinya adalah Rp. 5.000,- atau sekitar 1,55 US dolar (bukan dihitung berdasarkan nilai nominal dolar-nya karena nilai dolar di Indonesia bisa membeli lebih banyak barang dibandingkan dengan di Amerika). Penduduk miskin di Indonesia tahun 2006 sebesar 17,8 persen. Anda bisa lihat, perbedaan antara BPS yang mematok angka pendapatan

per hari Rp. 152.000,-, dekat sekali dengan angka yang dipatok Bank Dunia Rp. 194.000,- sehingga kalau harga pangan terus naik, maka orang Indonesia yang miskin bisa menembus angka 90 persen. Jadi, *near-poor* itu tingkat pengeluarannya di atas 1 US dolar, tapi tidak lebih dari 2 US dolar. Inilah yang bisa dikatakan kerentanan tingkat kemiskinan kita pada harga-harga pangan.

Saya juga mau mencoba membandingkan *pattern of growth* Indonesia dengan kemampuan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data 1990-2008, tentu data 2008 angka prediksi, Indonesia sebenarnya mempunyai start yang lebih baik daripada China dan Vietnam. Namun, untuk kemiskinan absolut yang berpendapatan 1 dolar per hari, turun sebentar, tapi selanjutnya *poor-crisis* era gagal untuk mengangkat *absolute poverty*. Sebaliknya dalam kasus China, kemiskinan di negeri itu masih di atas 30 persen pada tahun 1990, tapi sekarang sudah turun drastis. Jadi, *must better* China. Tapi yang menakutkan adalah Vietnam. Pada 1990, penduduk miskin di negara ini masih di atas 50 persen, tapi sekarang *absolute poverty* di Vietnam tinggal 10 persen, jauh di bawah angka kemiskinan yang bisa dicapai Indonesia. Selain kedua negara, Laos juga mencatat prestasi yang mengagumkan dalam mengurangi penduduk miskin. Awalnya, jumlah *absolute poverty* di Laos lebih parah, tapi jumlahnya saat ini, kalau saya tidak salah, sudah sama dengan Indonesia.

Untuk kategori 2 dolar, yang *near-poor* dan yang *absolute poor*, kondisi Indonesia lebih tidak berhasil lagi. Tingkat penurunannya untuk kategori yang *near-poor* maupun yang *absolute poor* sangat lambat. Artinya, program penurunan angka kemiskinan terjadi, tapi trend penurunannya juga sangat lambat. Ini terjadi karena, sekali lagi, *pattern of growth*-nya tadi. Tengok lagi kasus China, yang berhasil menurunkan angka *near-poor* dan *absolute poor*-nya dengan cukup kencang, dan lagi-lagi Vietnam. Situasi kemiskinan seperti inilah yang harusnya menjadi *concern* kita, dan ini yang seharusnya kita gugat bersama. Kalau *pattern of growth* Indonesia begini terus, maka pada masa pemerintahan SBY-JK kita tidak bisa berharap akan terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan.

Bagi saya, yang terpenting dalam penyelesaian persoalan kemiskinan adalah tindakan konkret pemerintah dengan cara memberi lapangan pekerjaan kepada rakyat. Ini karena sulit bagi kita untuk menyelesaikan kemiskinan jika tidak terdapat lapangan kerja. Kawan-kawan banyak yang protes, katanya BPS bohong, karena angka pengangguran yang dilansir BPS terus turun. Bagi saya, tidak ada persoalan angka pengangguran turun. Masalahnya, statistik angka pengangguran dengan trend penurunan seperti yang ada saat ini buruk sekali karena turunnya angka pengangguran diimbangi dengan meningkatnya jumlah orang yang separuh menganggur. Ini berarti bahwa lapangan pekerjaan yang tinggal sedikit itu di-share oleh makin banyak orang. Logikanya, daripada PHK habis-habisan maka lebih baik mengurangi jam kerja. Jadi, jangan serta-merta kita bilang bahwa data BPS ini ngaco.

Persoalan kedua adalah sektor informal. Dalam kaitan ini, banyak orang tetap bekerja, tapi pindah ke sektor informal. Data saya menunjukkan bahwa persentase pekerja sektor informal

angkanya naik dari 68,9 persen ke 69 persen. Jadi, sekalipun mereka tetap bekerja maka sebetulnya kualitas pekerjaannya makin merosot. Nah, untuk data upah, pekerjaan yang terbatas itu, karena diisi oleh makin banyak orang, pasti berdampak pada upah yang juga menurun. Data 2006 sampai Agustus 2007 memperlihatkan bahwa seluruh sektor informal upah riilnya turun, termasuk upah buruh tani. Namun, di tingkat nasional, tetap naik. Ini terjadi karena ditolong oleh luar Jawa yang kelebihan pasok komoditi, sementara di Jawa sendiri minus 1,8 persen.

Hal yang sama juga terjadi di sektor industri. Keseluruhan industri, jika kita lihat, bagus. Tapi, kita tengok industri rokok, pakaian jadi, dan batu-batu ubin. Jangankan upah riilnya, upah nominalnya pun tidak naik. Jelas, ini semakin dekat ke garis kemiskinan. Ironisnya, bukan cuma kemiskinan, tetapi ketimpangannya juga semakin lebar. Di era SBY, kemiskinan dan ketimpangan terus menaik, sementara di era Megawati sempat turun sekali sehingga, menurut saya, motto pemerintah SBY *pro-poor, pro-job, dan pro-growth*, bagi saya lebih tepat kalau disebut "*prosotan* (jatuh semakin ke bawah, red)".

Orang miskin juga mengalami kekurangan akses, terutama akses terhadap kebutuhan kalori. Jika kita bandingkan, dimana jumlah penduduk, misalnya, kita bagi ke dalam lima kelompok dengan skala atas-bawah, maka akan kita temukan data sebesar 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya. Untuk rasio kalori, kita akan mendapatkan 20 persen termiskin terhadap 20 persen terkaya, yaitu 0,7 persen. Kemudian, untuk akses pendidikan, di tingkat sekolah dasar (SD) tidak ada masalah. Artinya, rasio orang miskin terhadap orang kaya memiliki akses yang sama. Namun, makin ke SMP makin turun, ke SMA cuma 34,3 persen orang miskin yang memiliki ak-

ses terhadap orang kaya. Jadi, anak-anak miskin rata-rata mentok di SMP. Dengan data ini, anak-anak orang miskin tidak akan mempunyai modal dasar yang cukup untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinannya.

Akses orang-orang miskin ke dokter juga tidak kalah buruknya. 20 persen rakyat termiskin hanya mempunyai akses sebesar 13,5 persen. Akses ke puskesmas lebih baik karena Puskesmas sudah menyebar ke desa-desa. Untuk air bersih, akses orang miskin hanya $\frac{1}{4}$ -nya dari orang yang paling kaya. Hanya akses ke sanitasi yang tampaknya agak lumayan, yakni sekitar 0,6 persen. Jadi, *basic need* untuk hidup orang miskin di Indonesia aksesnya sangat tidak memadai. Dengan data dan fakta demikian, rasanya penyelesaian persoalan kemiskinan di Indonesia harus dimulai dengan sebuah perspektif, desain atau paradigma baru yang lebih jelas sehingga kita bisa lebih fokus, dan sungguh-sungguh bisa mengurangi angka kemiskinan

dan ketimpangan yang ada. Dengan demikian, apa yang dibayangkan oleh Mas Sugeng tadi bahwa gagasan sosial demokrasi lebih bisa workable, dalam arti mampu menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang ada, mudah-mudahan bisa terbukti dalam pelaksanaannya. Terima kasih.

Moderator

Terima kasih Mas Faisal. Berdasarkan paparan Mas Faisal tadi, kini makin jelas bahwa antara orang kaya dan orang miskin baru punya akses yang sama di sektor pendidikan level SD, itupun belum menyangkut kualitas pendidikannya. Sementara untuk indikator yang lain, seperti tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Mas Faisal, sepertinya ketimpangan akses antara orang miskin dengan orang kaya di negeri ini begitu ekstrem dan amat mencolok. Nah, artinya orang miskin juga pasti memiliki akses yang kecil untuk nikah karena seperti yang kita tahu urusan nikah juga cukup mahal di



Ilustrasi: Kuis Indarto © Friedrich-Ebert-Stiftung



Indonesia, apalagi di Jakarta.

Paparan Mas Faisal mengingatkan saya mengenai pencapaian MDGs (Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, red) di Indonesia. Berbagai data dan fakta terkait dengan program MDGs, yang bertujuan mengurangi angka orang miskin di dunia menjadi setengahnya pada tahun 2015, termasuk di Indonesia, rasanya menjadi sulit untuk dicapai.

Selanjutnya, karena Mas Rizal Ramli sudah hadir, maka untuk presentasi berikutnya saya kira langsung saja kita serahkan kepada beliau.

Rizal Ramli

Yang menarik dari apa yang kita simak dari presentasi Mas Sugeng tadi, dan menimbulkan pertanyaan buat saya, kenapa perbandingan yang digunakan dalam menganalisis problem kemiskinan di Indonesia hanya terfokus pada era Soekarno-Hatta dengan era SBY-JK? Kenapa tidak memasukkan perbandingan historis dengan menempatkan periode Soeharto sebagai variabel penting sehingga paparan masalah dan kesimpulan yang kita tarik bisa lebih objektif dan komprehensif?

Menurut saya, memasukkan perbandingan era Soeharto penting karena sudah waktunya bagi kita untuk melakukan revisi historis terhadap kinerja rezim Soeharto. Banyak orang selalu membandingkan rata-rata situasi Orde Baru dengan situasi dan kondisi tahun 1995 dan tahun 1996; yang kondisinya paling bottom. Bahkan pada

waktu itu, Ibnu Sutowo, saya tidak tahu atas advice siapa, pernah menaikkan harga BBM sampai dua kali lipat. Kebijakan Ibnu Sutowo itu, seperti kita tahu, telah memicu laju inflasi hingga ribuan persen. Atau kasus kenaikan gaji pegawai negeri dengan cara menambah pasok uang beredar. Saya merasa, jangan-jangan ini merupakan bagian dari rekayasa orang-orang Soeharto ketika itu untuk menjatuhkan Soekarno.

Kalau mau fair, maka kita harus membandingkan rata-rata Orde Lama dengan rata-rata Orde Baru. Namun, jangan lupa bahwa pada akhir Orde Lama utang kita hanya 2,5 milyar dolar, angkatan bersenjata kita paling tangguh di Asia Tenggara, dan kita saat itu mampu merebut Irian Jaya. Sementara di akhir pemerintahan Soeharto-Orde Baru, utang kita mencapai 150 milyar dolar lebih. Kemudian, pada masa Orde Lama, hutan kita masih hijau, sementara ketika Orde Baru selesai kekuasaannya, luas hutan kita tinggal sepertiga. Jika kita nominalkan, maka angka penggundulan hutan bisa mencapai 100 milyar dolar. Pada masa Orde Lama, tambang dan lain-lain masih ada di dalam bumi, tetapi pada akhir Orde Baru sudah banyak dieksploitasi, dan itu paling tidak sekitar 150 milyar dolar. Jadi, secara keseluruhan, Orde Baru sudah menguras kekayaan negara sebesar 400 milyar dolar lebih. Hasilnya apa? Hasilnya adalah suatu situasi ekonomi yang sangat timpang, yang sangat eksploitatif. Ada 400 orang super kaya di Indonesia, sementara mayori-

tas rakyatnya hidup sangat pas-pasan. Artinya, apa yang didapatkan oleh rakyat tidak sepadan dengan resources yang digunakan pemerintah pada waktu itu.

Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk melihat perbandingan SBY-JK dengan masa Orde Baru. Ini karena ekonomi yang ada pada masa SBY-JK sekarang ini sebenarnya tidak lebih dari kelanjutan ekonomi Orde Baru mengingat SBY-JK sangat mengagumi model pembangunan eksploitatif ala Orde Baru. Namun masalahnya, kemampuan manajemen dan leadership-nya sangat rendah sehingga efektivitasnya tidak sebaik Orde Baru. Bench Mark kita mestinya bukan Orde Baru, tapi negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Timur yang telah membuktikan kinerja kemajuan ekonominya yang jauh melampaui kita.

Nah, yang kedua, selama masa pemerintahan SBY-JK, budget anti-kemiskinan naik lebih dari 2,8 kali. Tapi jumlah orang miskin, barangkali, saya agak berbeda dengan Faisal dan BPS, tidak mengalami perubahan berarti. Logikanya, jika jumlah pengeluaran pembangunan naik, maka jumlah orang miskinnya akan terus berkurang. Kegagalan rezim SBY-JK ini bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, program anti-kemiskinannya tidak efektif, tidak betul-betul sampai ke bawah. Kedua, telah terjadi proses kemiskinan secara struktural yang lebih cepat dan lebih ganas dari program anti-kemiskinan yang ada.

Kita sebut saja yang sederhana, misalnya, pemerintah SBY-JK gagal dalam stabilisasi harga kebutuhan pokok, tidak hanya sekarang, tapi sejak dua tahun terakhir. Ini mengakibatkan penduduk yang berpendapatan pas-pasan, on the margin, yang tadinya tidak miskin menjadi orang miskin. Faktor kedua adalah karena pemerintah sekarang percaya betul pada pasar bebas. Misalnya, minyak goreng. Harga eksportnya naik tiga sampai em-

pat kali. Nah, karena eksportir dalam negeri melihat kenaikan harga minyak goreng yang tinggi di pasar internasional, dan dia ingin untung, akhirnya diambillah pasok minyak goreng dalam negeri untuk mereka jual ke luar negeri. Pendekatan pasar bebas, pedagang ya memang mau cari untung. So what gitu loh, orang mau cari untung kok ngga boleh?

Dalam kenyataannya, kebanyakan dari raja-raja minyak goreng di Indonesia tidak menyadari bahwa industri minyak goreng, yang dibangun pada tahun 70'-80'an, dana pembangunannya menggunakan paket kredit likuiditas Bank Indonesia yang bunganya disubsidi pemerintah. Sebetulnya, kalau cuma mau pakai logika orang dagang, mereka sudah untung besar di pasar internasional. Tapi, namanya pedagang, mereka mau untung lebih ekstra.

Kondisi ini sangat berbeda dengan policy pemerintah Malaysia yang tegas. Pemerintah Malaysia memberi pajak ekspor sebesar 30 persen, dan mereka pro-subsidi di dalam negeri. Menteri kita mungkin sudah sangat percaya dengan pendekatan pasar bebas, akhirnya membiarkan saja harga minyak goreng terus naik, ditentukan oleh harga pasar. Contoh lain dapat dilihat menyangkut kebijakan ekspor rotan. Menteri Mari Pangestu membiarkan ekspor rotan mentah dengan alasan bagus. Hasilnya, ratusan perusahaan industri rotan di sepanjang Pulau Jawa bangkrut, dan ratusan ribu orang yang bekerja di industri rotan yang bangkrut itu akhirnya menganggur.

Berbeda dengan China, yang mengimpor rotan dari Indonesia, kini sudah memiliki beberapa kecamatan yang menjadi pusat industri rotan dunia. Ini contoh pendekatan pro-pasar yang ugal-ugalan! Contoh lain lagi adalah kebijakan di bidang BBM. Beberapa bulan lalu, Menteri Perdagangan kita sekarang, yang suaminya kebetulan dagang Kartu Smart untuk BBM, memperkenankan peningkatan

ekspor pupuk. Waktu saya jadi menteri, direksi pabrik pupuk lobby keras supaya jatah alokasi pabrik pupuk bisa dinaikan untuk ekspor karena untungnya lebih tinggi, dan yang kedua juga ada kickback-nya kalau ekspor. Namun, saya menolaknya. Jaman Pak Harto juga menolak. Alasannya karena pabrik pupuk ini dibangun dengan menggunakan uang negara. Oleh karena itu, tujuannya tidak *fully comercial*. Sasaran jangka panjangnya untuk mendukung pasok pupuk nasional. Akibat ekspor pupuk tersebut adalah jelas, yakni harga pupuk di beberapa daerah naik 40 persen, banyak pupuk palsu, urea yang dicampur kapur, dan sebagainya. Bukankah ini merupakan kebijakan yang *ngaco!*

Dalam pandangan saya, model-model kebijakan seperti inilah yang akhirnya meningkatkan kemiskinan secara lebih cepat dan ganas ketimbang janji-jani program anti-kemiskinan yang ada. Nah, menurut saya, selain ada data dan fakta yang tentu kita bisa diskusikan, yang paling penting, why, kenapa? Logika sederhananya, kalau betul ada pertumbuhan ekonomi sedemikian lumayan, maka mestinya tumbuh lapangan pekerjaan. Menurut saya, ini semua terjadi karena ada *policy* bias sebagai akibat *new liberal policy approach*, yang mengakibatkan, misalnya, return di financial sector sangat tinggi, seperti tingkat suku bunga di pasar uang atau di pasar modal. Akhirnya, banyak orang memindahkan uangnya ke sektor finansial sehingga *resources* yang masuk ke sektor riil menjadi sedikit.

Dengan demikian, tidaklah cukup hanya dengan membuat mapping dari kondisi orang miskin dan semua indikatornya, tapi juga yang paling penting *why?* Saya mohon maaf, karena saya tidak bisa menyalahkan semua pada SBY, sama halnya dengan kami yang dulu pernah di tahan satu setengah tahun di Penjara Sukamiskin tidak berani menyalahkan semua kegagalan

hanya kepada Soeharto. Tetapi, tentu harus ada tanggung jawab dari menteri-menteri di bidang ekonomi yang bekerja, yang menghasilkan berbagai macam kelemahan struktural di dalam ekonomi kita, termasuk kebijakan yang saya sebutkan tadi.

Menyangkut isu pengangguran, memang kalau dilihat statistiknya makin banyak yang *non-paid workers*, pekerja yang tidak dibayar, termasuk pekerja keluarga yang difasilitasi sebagai orang yang bekerja. Begitu angka *non-paid workers* ini kita kurangi, angka penganggurannya pasti jauh lebih tinggi dari klaim pemerintah saat ini. Dan indikator lain, kalau betul ekonominya tumbuh bagus, angka orang yang bekerja pasti lebih tinggi, dan upahnya juga seharusnya naik secara riil maupun nominal, seperti disampaikan Faisal tadi. Faktanya, upah di sektor-sektor padat karya, yang jumlahnya amat besar itu, yang *unskill*, justru malah turun.

Singkatnya, kembali ke pertanyaan saya tadi, kepada Mas Sugeng, mengapa bandingannya dengan jaman Soekarno. Menurut saya, selama ini, data-data ekonomi kita penuh propaganda. Saya ingat waktu para profesor-profesor dan ekonom-ekonom yang disewa Bank Dunia—yang akan menulis buku *Asian Miracle* awal tahun 90'an—datang untuk wawancara saya. Saya katakan ketika itu pada mereka, "Maaf! *Assesment* saya tentang ekonomi Indonesia bukan betul-betul *miracle*, bukan betul-betul macan ekonomi, tetapi lebih banyak kucing daripada macannya. Pada waktunya nanti, saya yakin akan ada koreksi untuk ini". Para penulis itu kemudian mengatakan kepada saya, "waduh saya wawancara dengan puluhan ekonom, terutama dengan yang bekerja di pemerintahan, tetapi pandangannya berbeda sekali dengan pandangan Anda". Lantas, saya katakan begini kepada mereka: "*Come back again in next ten years, until you agree with a new vision in order an economic history*".



Illustrasi: Mas Indarto © Friedrich-Eber-Stiftung

Ivan Hadar

Terima kasih Mas Rizal. Paparan yang disampaikan Mas Rizal tadi, menurut saya, seru banget. Kalau bisa saya simpulkan, sepertinya tadi kita mendengarkan presentasi dari campuran antara seorang ekonom, aktivis, sekaligus agitator. Baik, saya persilahkan teman-teman untuk bertanya atau menyampaikan pandangannya.

Bini Buchori

Saya sebetulnya mau tanya kepada siapa saja yang bisa menjawab. Tadi dijelaskan dengan sangat baik bahwa estimasinya dengan 2 sampai 4

persen dari PDB dapat dipakai untuk *basic income*, tapi yang *limited*, tidak komprehensif. Dalam kaitan ini, ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, untuk kasus Indonesia, gagasan *basic income* salah ataukah tidak? Kedua, jika tidak, atau relatif cukup tepatlah, maka kira-kira persyaratan apa yang diperlukan? Selanjutnya, sebagai pertanyaan tambahan, apakah yang berkumpul pada malam ini, jika kita ingin sosdem memiliki sebuah solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan bangsa, kira-kira sepakat dengan konsep *basic income*?, dan bila kita bayangkan mempunyai partai yang namanya partai sosdem,

maka apakah kira-kira konsep *basic income* ini menarik untuk diakui sebagai platform partai?

Arie Sudjito

Sebenarnya, apa yang dipaparkan Mas Sugeng mengenai beberapa pilihan mana yang lebih fleksibel, *basic income* atau *welfare-state* dan sebagainya. Menurut saya, salah satu constraint yang seringkali dihadapi adalah sejauh mana kapasitas state sebagai satu institusi dapat merespon secara cerdas dan bijak atas problem-problem kemiskinan yang ada? Nah, ke depan, barangkali, pertanyaan mendasar yang perlu kita letakkan adalah mulai dari paradigma kemiskinan sampai tata lembaga dan regulasi. Dalam hal ini, kita harus memutuskan dari mana kita harus memulai guna mendorong perubahan tersebut? Saya kira di tingkat nasional, kita bisa memeriksa ulang peta-peta solusi yang tersedia.

Secara realistis, saya menilai bahwa mungkin Bang Rizal maupun Mas Faisal bisa lebih jauh menganalisis, tingkat risiko mana yang paling mungkin untuk ditempuh guna mendorong *basic income*. Sekarang ini, semua orang bisa kampanye: kampanye anti-kemiskinan, kampanye anti-korupsi, dan macam-macam. Masalahnya, agenda-agenda tersebut tidak nyambung dengan persoalan budget. Di NGO, banyak sekali ditemukan persoalan semacam itu. Satu kampanye anti-korupsi, sedangkan yang lainnya kampanye pemenuhan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, satu lagi kampanye soal pertumbuhan, dan seterusnya. Jadi seperti bazar, semua orang jualan macam-macam.

Tapi titik lemah dari itu semua adalah, ini juga koreksi dari teman-teman aktivis pro-demokrasi dan NGO, tidak adanya titik temu, akhirnya berujung demo. Nah, kekhawatiran ini sebenarnya akan semakin nyata pada saat upaya kita untuk membenahi atau set-up kelembagaan dalam bidang poli-

tik ini juga tidak nyambung dengan insentif *pro-poor* dan kesejahteraan tadi. Jadi, apa yang dipikirkan Mas Sugeng, perspektif lama yang menyebutkan bahwa sebenarnya kita bisa mendamaikan antara kebebasan dengan keadilan sosial dilihat dari kondisi yang berlangsung saat ini tidaklah pesimis.

Persoalan paling penting adalah bagaimana membuat, bahasa kita, peta jalan dan rute pencapaian itu akan dimulai dari mana? Nah, dari situlah, sebenarnya perdebatan kita akan lebih maju dengan memulai suatu konseptualisasi, misalnya, soal kemiskinan dari perspektif yang berbeda, lalu pilihan solusinya. Jadi, terkait tiga level analisis yang saya singgung di depan tadi, kira-kira pada konteks struktur yang berbeda secara sosiologis pengalaman di Eropa, Skandinavia dan sebagainya, ketika dihadapkan pada konteks yang seperti ini, maka konteks intervensinya jelas berbeda.

Agar kita lebih optimis, barangkali, perlu melihat inisiatif-inisiatif di daerah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Pada level nasional, tampaknya cukup responsif terhadap inisiatif-inisiatif daerah. Saya punya teman, misalnya, dalam analisisnya membuat model-model daerah, yang ia bagi menjadi tiga kategori, yakni daerah yang budiman, daerah pelit, dan daerah royal. Daerah budiman adalah daerah yang PAD-nya kecil, tetapi belanja sosialnya besar. Daerah pelit adalah daerah yang PAD-nya tinggi, tetapi belanja sosialnya rendah. Sementara daerah royal, seperti Kutai Kertanegara, adalah daerah yang PAD-nya besar, tetapi belanja sosialnya ngawur. Saya kira itu dulu komentar dari saya, terima kasih.

Rizal Ramli

Memang usulan *basic income* ini kontroversial karena *basic income* pada dasarnya *income transfer*, *transfer pendapatan*. Sama juga dengan penjatahan, seperti penjatahan BBM. Sistem transfer pendapatan dan pen-

jatahan hanya akan betul-betul efektif mencapai sasaran, jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, kalau kita memang mempunyai *single identified number*. Orang yang berhak menerima adalah orang yang betul-betul orangnya. Kedua, model ini juga akan efektif kalau sistem dan birokrasinya memang bagus. Ketiga, orang memang takut dan tunduk pada hukum. Dengan begitu, takut dosa dan neraka saja tidaklah cukup. Orang harus mempunyai ketakutan dan ketaatan terhadap hukum.

Kalau ketiga hal itu tidak dipenuhi, maka masalah penjatahan atau *income transfer* akan menghadapi masalah-masalah riil di lapangan. Persoalannya sekarang adalah kenapa setelah sepuluh tahun reformasi hasilnya tetap begini? Sebenarnya, ada tiga tema menjelang kejatuhan Soeharto. Pertama, harus ada demokratisasi, tapi dalam praktiknya demokratisasi ini telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan lama yang punya uang, punya network, dan sebagainya. Kedua, soal KKN. KKN-nya mungkin sudah sedikit-sedikit dihilangkan, tapi nepotismenya sekarang malah lebih dahsyat dibandingkan dengan jaman Soeharto, terutama nepotismenya orang nomor di Indonesia sekarang. Waktu pak Harto berkuasa, tiga tahun pertama Pak Harto belum berani segila itu melakukan nepotisme seperti yang dilakukan sekarang. Tema ketiga sebetulnya kritik terhadap model pembangunan ekonomi Orde Baru, yang eksklusif, yang hanya menguntungkan kroni dari segi *corruption*, tapi juga *policy*-nya sendiri memang tidak memacu, tidak inklusif, tidak menghadirkan pemerataan dan tidak memberi kesempatan untuk semua orang. Nah, sayangnya, reformasi terjadi hanya pada level tema yang pertama dan yang kedua, sementara yang ketiganya seolah-olah ngga ada masalah, yakni model pembangunan ekonomi Orde Baru. Menurut saya, justru banyak masalah di situ. Makanya kita perlu revisi,

menghadirkan sebuah model ekonomi baru, sebuah sistem ekonomi yang sungguh-sungguh berkhidmat pada kepentingan rakyat. Historinya kira-kira disitu.

Selanjutnya, reformasi kita juga, karena kelemahan visi dan *leadership*, akhirnya hanya jadi reformasi "transaksional", reformasi tawar-menawar, semua tawar-menawar. Pemimpinnya pun kelasnya tawar-menawar. Jika pemimpinnya kelasnya tawar-menawar, maka hasilnya pasti akan mempertahankan status quo. Indonesia sekarang memerlukan pemimpin transformatif, nabi-nabi besar, yang mampu melakukan transformasi radikal. Pemimpin di negara-negara Asia Timur, yang mampu mengejar ketertinggalannya dari Barat, terbukti mampu membangun fundamen ekonominya secara baik, mampu menciptakan lapangan kerja, dan mampu mendistribusikan kesejahteraan kepada rakyat. Itu pemimpin yang bisa kita kategorikan sebagai pemimpin transformatif. Lee Kuan Yew salah satu diantaranya, Mahathir Mohammad, Deng Xiaoping, dan Thaksin adalah orang-orang yang memiliki visi jelas. Untuk Indonesia ke depan, kita harus bisa mencari pemimpin seperti itu, tapi tentu yang tidak diktator.

Kalau kita cuma mampu melahirkan pemimpin yang transaksional, yang tawar-menawar, maka jangan pernah berpikir ada terobosan. Ini karena tidak akan ada perubahan, tidak akan ada inovasi, dan pada ujungnya, sekali lagi, pemimpin jenis ini hanya akan mempertahankan status quo. Menurut saya, sudah cukup terbukti model pembangunan ala Orde Baru dan cucu-cicitnya ala SBY ini gagal mengangkat kesejahteraan delapan puluh persen rakyat kita. Untuk itu, sudah waktunya kita tinggalkan, dan kita pilih jalan baru, terima kasih.

Ivan Hadar

Hari ini juga kita baca berita yang cukup ramai, soal serah terima jabatan



Fidel Castro ke adiknya, Raul Castro. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa dalam proses transformasi, sebagaimana tadi disinggung Mas Arie, soal set up kelembagaan juga penting. Kata kunci yang kedua adalah oligarki atau siklus kekuasaan yang elitis. Di daerah juga mungkin ada pemimpin yang bukan saja inovatif atau transformatif seperti dikatakan Mas Arie tadi, tapi juga banyak yang masih mengadopsi model kepemimpinan transaksional, yang melekat pada dirinya, seperti diulas tadi oleh Mas Rizal. Jadi, proses pelembagaan sendiri tidak terjadi sehingga ketika kekuasaan pemimpin menguat, model transaksional muncul lagi.

Kemudian, kalau kita turunkan levelnya, bukan di level nasional, tapi kita mulai dari daerah-daerah, apakah mungkin kita menemukan contoh-contoh pemimpin yang kuat seperti Castro, Lee Kuan Yew, dan sebagainya. Selanjutnya, melalui para pemimpin lokal tersebut apakah kita bisa melembagakan sehingga menjadi seperti yang kita harapkan? Pelembagaan jenis ini mungkin contohnya di Kabupaten Jembrana, Bali, atau daerah-daerah lain di Indonesia. Maksud saya, set up kelembagaan dan kepemimpinan transformatif melalui sentuhan dari kita, pekerja-pekerja di lapangan, lewat kelompok-kelompok sosdem, lewat beberapa pilot project, atau apapun namanya. Ini pertanyaan spekulatif. Saya persilahkan teman-teman lain

untuk mempertajam gagasan ini.

Erwin

Ada satu hal yang saya hadapi dalam diskusi ini, saya tidak bisa mengerti seratus persen gagasan-gagasan menarik yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman karena keterbatasan saya dalam Bahasa Indonesia. Tapi, ada satu hal barangkali yang perlu saya komentari, yakni soal hubungan antara basic income dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal, soal akses. Kami tertarik pada soal itu karena dengan SPD di Jerman ada diskusi tentang akses. Bagaimana membangun akses rakyat terhadap kesejahteraan? Di Jerman, saat ini, juga intens dibahas soal akses pada kesehatan, akses pada asuransi sosial, dan sebagainya. Saya kira, yang sangat penting juga adalah akses kepada pendidikan karena semua tahu bahwa ada korelasi antara pendidikan dan kemiskinan.

Jika saya tidak salah, maka saya juga pernah mendapat data bahwa dua dari tiga pengangguran di Indonesia adalah generasi muda, yang berumur antara 15 sampai 20 tahun. Mereka pada umumnya berpendidikan rendah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan karena mereka miskin. Masalahnya, jika keadaan ini tidak berubah mereka akan tetap hidup miskin. Ketika mereka menikah, berkeluarga, dan anaknya miskin juga akibat ketidakmampuan

generasi miskin ini dalam membiayai pendidikan anaknya. Saya melihat ada semacam mata rantai yang panjang kemiskinan di Indonesia, dan ini menjadi satu topik diskusi menarik bagi kita.

Singkatnya, problem nyata yang dihadapi Indonesia adalah jika akses terhadap pendidikan tidak bisa ditingkatkan, maka kemiskinan akan sulit untuk dihapuskan. Kami juga ada masalah keadilan sosial di sana (Jerman, red), saya tidak tahu dalam bahasa Indonesiannya, tapi yang pasti menyangkut sejauh mana negara dapat memberi peluang dan akses bagi warga negara secara merata. Di Jerman, juga ada diskusi menarik soal basic income, dan peningkatan akses bagi warga negara. Menariknya, topik basic income ini tidak didorong oleh SPD, tapi oleh Partai Hijau (Green Party) bukan partai hijau dalam arti agama, tapi ekologis. Saya kira menjadi menarik bagi kita untuk mengkaji lebih jauh relasi antara basic income, akses, dan pengangguran. Kalau saya tidak salah, ada juga hubungan antara pengangguran dengan produktivitas dan kreatifitas masyarakat.

Kalau kita kaitkan dengan data-data China dan Vietnam, maka saya kira contoh kasus di negara-negara Asia Timur tersebut ada turunan dan keterkaitan dengan soal produktivitas dan kreativitas masyarakatnya sehingga mereka dapat dengan lebih cepat melakukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengimplementasikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Termasuk didalamnya, saya kira soal penguatan kelembagaannya. Itu barangkali masukan saya dalam diskusi ini.

Bambang Warih

Katakanlah kalau tujuan-tujuan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal, Mas Sugeng, dan Pak Rizal sudah solid atau katakanlah menjadi *political will* kita, apakah kita percaya bisa menjadi solusi dengan kondisi demokrasi kita yang seperti ini? Saya

adalah orang yang percaya bahwa ekonomi adalah sebuah studi mengenai apa yang dilakukan orang. Nah, kalau kita tidak hati-hati dalam memahami soal kesejahteraan dan keadilan, maka kita bisa kecewa. Ini karena inti masalah yang kita hadapi bukan pada teori yang beragam itu, tapi inti masalahnya terletak pada stok pemimpin yang committed untuk memberantas kemiskinan.

Kalau, misalnya, katakanlah pemikiran itu baik, dan kemudian kita tuangkan dalam suatu gerakan, maka jika gagal apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Apakah tidak menimbulkan *chaos*! Negara tidak bisa hidup tanpa teori-teori. Sekarang ini, kita menggunakan teori yang mana? Saya percaya ada limitasi. Misalnya, limitasi lingkungan hidup. Dia tidak bisa tumbuh terus karena mungkin faktor perubahan iklim. Persolannya adalah apakah hal ini bisa men-drive keadaan sehingga bisa melahirkan keadaan yang lebih baik atau setidaknya tidaknya bisa bekerja efektif untuk mengurangi kemiskinan? Jadi, menurut saya, problem utamanya bagaimana kita dapat mengkonsolidasikan pemikiran yang mengarah pada perubahan itu, dan bisa kita gulirkan kepada masyarakat. Saya percaya jika kita mempunyai pemimpin yang bagus, maka saya yakin perubahan bisa dilakukan. Terima kasih.

Rizal Ramli

Mas Bambang, kalau saya boleh jawab, sebenarnya kondisi objektif kita, rakyat kita, sudah matang. Kondisi subyektifnyalah yang sebenarnya payah. Ini karena dalam sejarahnya belum pernah rakyat kita hidup demikian susah seperti sekarang ini. Kalau sepuluh tahun yang lalu, yang terpukul para konglomerat dan kalangan profesional. Sekarang, mereka sudah come back, bahkan sedang pesta, dan masih pesta hingga saat ini. Sepuluh tahun lalu, rakyat masih dalam taraf hidup pas-pasan, sekarang kondisinya makin

sulit karena mereka dipukul tiga hal sekaligus, yakni digebuk dengan harga sumber energi, digebuk dengan harga sumber karbohidrat, seperti beras dan terigu, dan digebuk dalam harga sumber protein, minyak goreng.

Nah, memang kondisi seperti itu biasa seperti menjelang kejatuhan Pak Harto. Berbagai kelompok mengangkat isu yang berbeda-beda sehingga tidak fokus. Akibatnya, rakyat pusing. Pada waktu itu, kami kumpulkan aktivis-aktivis. Pada waktu itu, para aktivis BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa, red). Mereka kita kumpulkan di kantor saya, dan kemudian saya bilang: "sudah saanya kita fokus. Jangan kritik Pak Harto langsung, tapi fokus pada turunkan harga. ABRI tidak akan marah, dan kita akan mendapat dukungan rakyat. Selanjutnya, kita bisa merakit konsolidasi seluruh Indonesia".

Pada waktunya, setelah konsolidasi gerakan berlangsung, "Turunkan Harga" diplesetkan menjadi "Turunkan Harto dan Keluarga". Nah, kalau kita mau menyambut perubahan sekarang, kita harus fokus. Menurut saya, turunkan harga sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok, red) dapat dijadikan fokus gerakan. Jika hal ini diangkat sebagai fokus, maka rakyat dan seluruh elemen gerakan akan connect. Nanti "S"-nya siapa, "B"-nya Berkeley, misalnya. Dalam pemahaman saya, pemerintah sekarang ini tidak terlalu kuat-kuat amat dibandingkan dengan Soehato dulu. Sekarang ini, pemerintah tidak mempunyai tulang punggung yang dapat dijadikan sandaran. Meskipun demikian, semuanya terganggu kita, dan harapannya perubahan akan menghasilkan kekuasaan yang lebih demokratis.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, seandainya saja beliau mau mobilisasi NU (Nahdlatul Ulama) mungkin bisa survive. Pemerintahan Megawati mempunyai kekuatan nasionalis yang mendukungnya. Sekarang persoalan tergantung pada kita, dan karenanya

kitalah yang harus memutuskan. Apakah kita biarkan pemerintah sekarang ini sampai satu setengah tahun lagi dengan konsekuensi rakyat disuruh makan *macroeconomics*, rakyat disuruh makan moneter, bukan dengan memberikan pekerjaan, dikasih makanan dan pendidikan, atau kita dorong proses perubahan yang lebih cepat dengan pemilu yang juga dipercepat? Semuanya tergantung kita. Kondisi objektif masyarakat sudah sangat matang untuk perubahan, hanya kondisi subjektif yang payah karena kita terlalu banyak analisa. Terima kasih.

Ivan Hadar

Mengutip Mas Rizal tadi, dalam rangka mendorong perubahan, tampaknya kita membutuhkan aktivis yang pemikir. Ok, silahkan Mas Sugeng memberi komentar.

Sugeng Bahagijo

Tanggapan saya mungkin anti-klimaks karena Bang Rizal sudah mendorong perubahan. Jadi, saya setuju. Kita memang membutuhkan perubahan sejarah, perubahan sosial yang memang harus ada yang take leadership. Saya setuju dengan Mas Bambang. Hanya saja, ini masih mengundang perdebatan. Kalau pemimpin yang ideal itu, yang kita setuju sudah *in power*, pertanyaannya adalah: "Kalau dia ada, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia cukup membedakan diri dengan pemimpin yang ada kemarin?" Oleh karena itu, dukungan kita dan juga rakyat bukan dukungan yang kharismatik, tetapi dukungan yang rasional. Saya rasa, kita juga tidak mau berdebat untuk soal, misalnya, apakah kebijakan yang baik hanya boleh diintrodusir ketika keadaan sudah beres atau kita perbaiki sambil jalan?

Saya sepakat dengan syarat-syarat yang tadi disampaikan Bang Rizal karena perubahan kelembagaan dan birokrasi di Brazil atau di Afrika Selatan juga demikian. Persoalan kita adalah

terus berdebat dan kerap memenjarakan diri kita sendiri dan tidak berpikir, beyond status quo yang ada sekarang, syarat-syarat yang ada (kondisi objektif dan subjektif yang menjadi syarat sebuah perubahan, red) belum mencukupi. Misalnya, anggapan bahwa kondisi birokrasi kita sekarang masih penuh KKN sehingga yang masuk ke birokrasi sudah kita pastikan gagal.

Pertanyaannya adalah apakah kita tunggu saja sampai keadaan birokrasi kita kuat, baru kemudian mengintroduksi hal-hal yang lebih baik dari keadaan sekarang? Saya berpendapat, kita tidak perlu *single and act* seperti itu. Jadi, pematangan ide-ide yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik, berdasarkan yang riil, itulah yang harus terus kita semaikan. Kalau konsepsi saya, yang baik adalah menggabungkan efisiensi sekaligus mem-promote keadilan sosial sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya.

Selanjutnya, persoalan apakah visible secara politik atau tidak maka akan sangat tergantung pada sejauh mana kemampuan dan upaya kita dalam memahami dan merespon kondisi yang ada saat ini, termasuk akurasi dalam mengambil sebuah opsi kebijakan perubahan secara tepat, berdasarkan kondisi objektif dan subjektif yang dinamis, yang saat ini tengah bergerak intens dalam tataran kehidupan masyarakat. Bagi saya, utopia tentang perubahan bukan sebuah khayalan. Sebaliknya, merupakan perspektif pemikiran tentang keadaan yang diharapkan, sebuah situasi yang diyakini akan berlangsung lebih baik dari yang ada sekarang. Saya kira pandangan dari saya seperti itu, saya sepakat sekali.

Amir Effendi Siregar

Dari beberapa komentar yang sudah kita dengarkan bersama, saya pikir demokrasi *is must*, tidak ada tawar menawar lagi! Nah, yang jadi problematik sebenarnya konsep un-

tuk pertumbuhan dan perkembangan, baik di sektor ekonomi, politik, bahkan komunikasi. Masalahnya, perubahan-perubahan yang sungguh-sungguh mencerminkan perspektif sosial demokrasi dalam konteks Indonesia sampai sekarang sepertinya belum ada. Nah, forum ini harus memberikan semacam *guidance*, gambaran objektifnya seperti apa? Memang ada contoh-contoh menarik dari negara Eropa yang tadi sudah disinggung dalam diskusi kita. Namun, our face yang match, yang betul-betul sesuai dengan realitas kita seperti apa? Kita masih perlu mengembangkannya.

Bagaimana gagasan-gagasan kesejahteraan sosial relevan dengan kelembagaan ekonomi atau politik kita, misalnya. Sebab, kalau saya boleh memberi gambaran, untuk bidang komunikasi dan media saja belum clear. Bagaimana komunikasi yang perspektifnya sosial demokrat untuk kasus Indonesia? Di dunia komunikasi, harus ada balancing antara private sector dengan public sector. Di negara Barat, terutama di Eropa yang menganut prinsip sosial demokrasi, public sector-nya untuk dunia komunikasi-nya very strong dibandingkan private sector-nya.

Di Eropa, misalnya, comersial sector-nya baru tumbuh tiga belas tahun terakhir ini. Saya tidak akan masuk terlalu jauh lagi untuk menganalisis perkembangan dunia media komunikasi Eropa mutakhir. Tetapi, yang saya mau katakan, konsep pertumbuhan komunikasi dunia media di Indonesia sekarang ini dibidang gila, sangat libertarian, tidak di-rem! Contoh, bagaimana mungkin seorang Hari Tanusudibjo bisa menguasai tiga stasiun televisi dengan beberapa radio, dan beberapa media cetak sekaligus?

Di sisi lain, media komunikasi kita orientasinya konsumtif-elit. Coba lihat, seluruh sektornya, apa ada televisi private sector yang mau masuk ke Papua, no way! Untuk non-profit,

hanya beban public television seperti TVRI. Masalahnya, pemerintah tidak memikirkan bagaimana mengembangkan dan membuat TVRI sebagai public sector bisa hidup dan mempunyai dana yang kompetitif? Sebagai institusi public television, kalau di Jerman, di Inggris atau di negara-negara Eropa Barat yang menganut sosial demokrasi, siaran publiknya lebih maju karena di negara-negara sosial demokrasi jauh lebih kuat dibandingkan dengan private sector-nya. Dia men-serve publik bukan dengan iklan, tetapi dengan licentie. Ini hanya satu contoh untuk bisa memperlihatkan bahwa diskusi kita ini penting guna memberikan guidance, dari perspektif sosial demokrat; di dunia komunikasi seperti apa, dunia ekonomi dan politik seperti apa sehingga pilihan-pilihan seperti basic income apakah sesuai dengan kondisi kita.

Inilah yang perlu kita pikirkan, baru nanti ditularkan. Kalau pemimpin tidak memahami konsep-konsep seperti ini maka kebijakannya pasti ngawur! Menurut pikiran saya, ini harus dimulai dari dua sisi, tidak hanya nasional, tetapi juga lokal. Bahkan berkemungkinan, kalau nasionalnya lemah, tapi lokalnya kuat, akan mampu mem-push level nasional. Contohnya, yang sekarang ini sedang ramai diperdebatkan antara Asosiasi Televisi Swasta dengan Asosiasi Televisi Lokal.

Nah, inilah pikiran kita. Kalau kita sudah mempunyai konsep yang jelas, pemimpinnya siapa pun akan tinggal di-touch sedikit saja. Selanjutnya, kita membangun sistem dan institusi lokalnya. Namun, design dan paradigm-nya di level nasional sudah clear.

Azman Fajar

Ada pertanyaan yang bagi saya menarik soal poverty dalam diskusi ini. Bagi kami, melihat dan memahami masalah kemiskinan dari kacamata perburuhan, sebenarnya situasi kemiskinan yang berlangsung saat ini tak lebih



dari design dan produk integral kapitalisme global yang ada di bawah kendali the international financial institutions. Kemiskinan yang ada saat ini adalah produk nyata dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga donor, semacam World Bank, IMF, ADB, dan seterusnya. World Bank, misalnya, pernah meng-introduce satu program anti-kemiskinan yang namanya PRSP (*poverty reduction strategy paper, red*). Tapi dalam beberapa kajian dan temuan riset kami di ALNI Indonesia, ternyata PRSP justru memiskinkan, dan bukan membuat kita, terutama para buruh, terbebas dari kemiskinan.

Sebagai contoh, ketika kebijakan privatisasi digulirkan, kemudian akses terhadap air diprivatisasi, maka akan berdampak terhadap kehidupan para petani. Petani menjadi miskin. Karena sumber penting dalam produksinya diprivatisasi, akhirnya petani menjual tanah atau ladangnya. Ketika tanah dan ladang sudah dijual, maka mereka harus mencari kehidupan yang baru, transmigrasi atau bekerja di pabrik-pabrik. Setelah dia bekerja di pabrik, akhirnya menjadi bergantung kepada industri tempatnya bekerja, mulai dari gajinya, tunjagannya, bonusnya, dan sebagainya. Ujung ceritanya, mereka bukan hanya tambah miskin, tetapi juga makin tergantung pada kehidupan kota.

Dari sisi lain, saya melihat liber-

alisasi sebagai instrumen kapitalisme global dan neoliberal yang kebijakannya digelar melalui lembaga-lembaga keuangan internasional juga semakin memiskinkan kita. Misalnya saja, mana mungkin pelaku-pelaku ekonomi Indonesia, apalagi yang kecil-kecil, bisa bersaing dengan pengusaha dari dunia Barat yang nota bene mendapat proteksi, fasilitas dan kemudahan dari pemerintahnya. Dalam konteks perdagangan global, melalui mekanisme kebijakan tarif yang diatur WTO, struktur perdagangan makin timpang, menghisap, dan tidak adil.

Lantas dengan paket-paket deregulasi yang beberapa waktu lalu, bahkan hingga kini, gencar dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, undang-undang di bidang perburuhan, penanaman modal, anggaran, dan seterusnya. Jika kita kaji dan amati secara serius, maka semangatnya sebenarnya pro-rich bukan pro-poor! Jika kita tarik ke undang-undang perburuhan, maka jelas bahwa telah terjadi manipulasi banyak hal, seperti informalisasi hubungan ketenagakerjaan. Ketika itu terjadi, maka jelaslah *labor protection* seperti jaminan sosial yang menjadi haknya para buruh terancam. Jika pada awalnya dia pekerja tetap, maka karena adanya informalisasi hubungan kerja atau pasar kerja statusnya berubah menjadi tenaga kontrak atau outsourcing. Di sini, hak pekerja untuk hidup sejahtera telah

dirampas. Hak-hak normatif para pekerja atau buruh kita, perlahan-lahan akan hilang: hilang hak jamsosteknya, hilang hak lemburnya, hilang haknya atas bonus, dan sebagainya. Situasi inilah yang membuat kita, meminjam istilah Justice Brandeis, *race to the bottom*, berlomba-lomba menuju ket-erpurukan.

Dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah demokrasi sosial sebagai sebuah konstruksi pemikiran dan ideologi gerakan telah memiliki jawaban atau paling tidak semacam tesis awal untuk meng-anti-these gempuran teori-teori yang selama ini menjadi senjata akademis atau pemaksaan pembenaran akademis dari ideologi kapitalisme-neoliberal yang sejak Orde Baru banyak menjajah alam bawah sadar pemikiran para ekonom dan pengambil kebijakan di negeri kita? Bagaimana situasi tersebut seharusnya direpson? Terima kasih.

Amir Effendi Siregar

Kalau saya boleh menjawab, kemiskinan jangan diartikan dalam arti ekonomi saja, tetapi juga penting untuk melihat kemiskinan dalam arti informasi. Dalam konteks itu, dari pengukuran gap informasi, kita akan mengetahui bahwa ketimpangan yang terjadi saat ini sudah luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, mengatasinya memang harus ada *limited state intervention*. Ini sesuatu yang harus dikerjakan. Di Jerman, *limited state intervention* dilakukan melalui subsidi negara untuk menjamin *diversity of information, diversity of policies* sehingga kemiskinan dan ketimpangan bisa diatasi.

Atas dasar itu, pemerintah harus memberikan peranan lebih besar kepada media, dalam arti sistem komunikasi media yang ada tidak lagi *centralized*, supaya kemiskinan dan gap informasi bisa di-minimize. Mengapa demikian? Ini karena kebebasan dan keberpihakan negara atas sistem ko-



munikasi massa yang demokratis juga termasuk bagian dari pendidikan penting warga negara.

Iqbal

Bagi kami yang berada di gerakan buruh, diskusi ini menarik karena sosdem sebenarnya dekat dengan ideologi buruh. Di sini, perlu kami tegaskan agar jangan membayangkan gerakan buruh dewasa ini seperti pada masa Soeharto. Sekarang ini, sudah muncul gerakan buruh meskipun belum menemukan ideologi yang cocok. Namun, jika ideologinya sudah ditemukan dan sesuai, maka gerakan tersebut dapat menjadi power yang bisa memberikan kontribusi signifikan untuk sebuah perubahan.

Saya ingin memulai dari apa yang tadi disampaikan Bang Faisal tentang akses. Saya ingin mengatakan kalau ukurannya adalah upah minimum, dan BPS mencatat 98,6 persen buruh menerima upah di bawah Rp. 1.500.000,-ribu, maka menurut saya buruh merupakan kelompok yang near-poor. Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal dan dengan demikian termasuk near-poor berjumlah 33,6 juta.

Nah, upah minimum yang diterima buruh, yang jumlahnya menurut data BPS 98,2 persen, 40 persennya

digunakan buruh selintas saja seperti untuk membayar sewa rumah dan transportasi. Masih menurut data BPS tahun 2002-2005, upah buruh yang dibelanjakan untuk makanan sebesar 48 persen sehingga jika ditambah dengan pengeluaran buruh untuk sewa rumah dan transportasi tadi, maka sebesar 98 persen pendapatan buruh keluar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut saya, gerakan buruh hanya menunggu ideologi gerakan saja. Selanjutnya, mulai menyadari dan paham bahwa ada sebuah *conditioning* yang terstruktur, dan mulai menyadari bahwa buruh juga menjadi bagian dari *stratum* sosial yang sulit untuk keluar dari lumpur kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi seperti tadi dijelaskan Bang Faisal, maka wajar jika sangat sulit untuk bisa mencapai level kesejahteraan.

Itu yang kami rasakan dan alami. Dan, jangan salah, sekarang banyak pemimpin buruh yang berasal dari kelas menengah. Mereka rata-rata berpendidikan sarjana. Mereka paham atas realitas yang terjadi.

Selanjutnya, saya masuk dari tesisnya Mas Sugeng tentang efisiensi dan keadilan sosial. Kita tahu bahwa banyak orang berbicara mengenai efisiensi

di Indonesia, semua selalu memulai dengan investasi. It's ok! Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keniscayaan, yakni rumus C-I-E-G (*consumption-investasi-export-and government expenditure, red*). Kita setuju. Tapi ingat, bagi kami yang puluhan tahun diposisikan seperti itu, persoalan kemiskinan yang selalu dikedepankan adalah soal efisiensi, dan tidak ada menteri pasca-Soeharto yang pernah berbicara soal social security, jaminan sosial. Hanya pemerintah Mega, barangkali, yang berani teken Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). In case, kendati undang-undang SJSN belum terimplementasi secara baik, tapi kita sudah punya dasar. Nah, di sinilah, kita akan mulai berjuang. Ini karena bagi kami, kalau memang sosdem sebuah teori dan ideologi gerakan yang ingin diimplementasikan, menurut saya, salah satu dasar konseptualnya adalah social security karena ada keberpihakan negara terhadap perlindungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya.

Saya baru-baru ini dari Brazil. Presiden Lula (Luiz Inazio Lula da Silva, red), pemimpin Partai Buruh Brazil, berani membangun perumahan murah untuk buruh dengan sistem *funding social security*. Tapi, ketika pulang dari Salvador ke Sao Paulo, saya bertanya kepada anak muda di pesawat, "bagaimana komentar Anda tentang Lula?". Dia bilang, "Ya Presiden Lula dari gerakan buruh". Selanjutnya, anak muda itu bilang, "Anda tahu, Brazil mau menghadapi pemilu, dan hampir semua orang kaya di Brazil, 57,8 persen membenci Lula?". Bagi saya, Lula sudah membuktikan keberpihakannya sehingga ada sebuah garis lurus yang tegas mengenai posisi yang diambil. Menurut saya, pertanyaan kuncinya adalah dimana posisi kita?

Kalau sudah ada keberpihakan, maka baru sebuah sikap politik dapat diambil, dan karena itu kita dukung. Jadi, keberpihakannya dulu ditunjukkan. Ke

depan, kalau Pak Rizal atau siapapun diantara kita mau menjadi menteri maka harus menunjukkan dulu keberpihakannya kepada rakyat. Menurut saya, tidak akan ada perbaikan tanpa keberpihakan.

Diskusi yang berkembang di kalangan teman-teman buruh, social security adalah sebuah jawaban untuk mengentaskan kemiskinan. Buruh tidak lagi dapat mengandalkan upah karena, sebagaimana telah dijelaskan Bang Faisal, secara riil upah buruh terus mengalami penurunan. Contoh yang saya lihat di DKI, kendati upah nominal buruh naik 2000 persen terhitung sejak tahun 1982 sampai 2004, tetapi secara riil sebenarnya hanya naik sebesar 67 persen. Jadi, sekali lagi, menurut saya, social security adalah sebuah jawaban.

Sekarang kita masuk ke contoh negara-negara maju. Jerman memulai sistem jaminan sosial ketika pekerja formal di negara itu baru berjumlah 10 persen dari jumlah angkatan kerjanya, di era kepemimpinan Otto van Bismarck, sekitar tahun 1900-an. Sejarah mencatat bahwa ekonomi Jerman di bawah van Bismarck tumbuh secara luar biasa. Amerika Serikat memulai sistem jaminan sosial dalam mengentaskan kemiskinan sekitar tahun 1935-an ketika income per kapitanya 600 dolar. Income per kapita Indonesia sekarang sudah 1.300 lebih. Inggris memulai sistem jaminan sosialnya ketika ekonomi negeri itu terpuruk pasca Perang Dunia I sekitar tahun 1911-an. Korea Selatan memulai sistem jaminan sosial ketika income per kapita rakyat di negeri itu masih 100 dolar. Sekarang, Korea Selatan memiliki pendapatan dari tabungan pensiunnya sebesar 240 milyar US dolar. Korea sekarang bangkit, bahkan beberapa perusahaan Amerika Serikat mau mereka beli.

Nah, jarang orang berpikir soal keberpihakan negara dalam soal kemiskinan. Saya melihat, nilai-nilai sosdem itu salah satunya adalah mengenai

keberpihakan terhadap orang miskin. Bagi saya, kalau kita bisa menunjukkan keberpihakan dalam rangka mengurangi *near-poor* tadi, saya membayangkan PT. Jamsostek sekarang memiliki aset Rp. 54,4 triliun dengan jumlah peserta sebesar 8,1 juta. Padahal, jumlah seluruh pekerja formal ada 33 juta. Jika ada sebuah law enforcement yang kuat, ada kondisi kepatuhan dan kewajiban perusahaan terhadap program perlindungan jaminan sosial pekerja, karena ada perintah dari undang-undang, maka persoalan kemiskinan sesungguhnya bisa diatasi. Saya membayangkan, kalau dana pensiun swasta, di luar Taspen yang jumlahnya mencapai hampir Rp. 300 triliun, bahkan ada yang mengatakan sampai Rp. 1.000 triliun, dan asuransi swasta yang angkanya mendekati Rp. 500 triliun maka jika digabungkan kira-kira ada akumulasi dana premi sekitar Rp. 1.000 triliun, hampir 1,2 kali dari jumlah APBN kita.

Saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Presiden Lula, apa yang dilakukan oleh pemerintah Jerman, Swedia, atau di Malaysia masa Mahathir berkuasa, adalah sebuah keberpihakan yang jelas kepada rakyatnya. Dana Jamsostek pekerja Malaysia yang berjumlah kurang lebih Rp. 600 triliun, misalnya, digunakan oleh pemerintah Malaysia untuk membangun ribuan hektar kebun kelapa sawit di Johor, Serawak, dan beberapa wilayah Malaysia lainnya. Pemerintah Malaysia mengembalikan investasi dana jamsostek pekerjanya dalam bentuk program-program kesejahteraan sosial seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan murah bagi para buruhnya. Jumlah tenaga kerja yang terserap dari proyek investasi pembangunan besar-besaran perkebunan kelapa sawit sekitar 4 juta orang.

Dengan melihat kenyataan di atas, saya menjadi susah memahami bahwa dengan potensi Jamsostek yang ada dan dengan keterampilan pertanian

rakyat yang relatif sama, bahkan lebih baik dari Malaysia, sementara defisit ekonomi negara yang hanya Rp. 89 triliun, tetapi tidak dapat diatasi? Padahal, kalau akumulasi premi Rp. 1.000 triliun yang berasal dari dana pekerja bisa digunakan secara tepat, maka kita tidak perlu terus mengemis pinjaman ke IMF, World Bank, dan lembaga-lembaga donor internasional lain untuk investasi pembangunan.

Saya bukan ahli ekonomi. Hanya saja, saya mencoba belajar dengan teori yang selalu diajarkan Bang Faisal di kampus, dimana teori-teori ekonomi dari era Adam Smith sampai John Maynard Keynes selalu mengatakan tentang pentingnya peran negara. Sekarang saya mengugat: dimana sesungguhnya peran negara? Kemudian, apakah perspektif sosdem solutif dalam menjawab soal tanggung jawab negara ini? Terima kasih.

Nur Iman Subono

Kalau saya tangkap dari guliran berbagai gagasan yang telah mengalir dalam diskusi yang mencerdaskan ini, isu pertama yang menarik adalah soal leadership, yang merujuk ke Mahathir, ke Lee Kuan Yew, dan beberapa pemimpin transformatif lainnya. Tapi saya terus terang agak traumatik. Dua tahun lalu ada satu perdebatan di Jurnal Demokrasi yang melihat gejala adanya keraguan dalam proyek dan proses demokrasi.

Saya kurang tahu, apakah Jusuf Kalla dan Surya Paloh membaca jurnal tersebut. Hanya saja, pernyataan JK di Munas Golkar terakhir mengatakan bahwa demokrasi bisa ditunda, yang dibutuhkan adalah efisiensi. Demokrasi, menurut para elit sudah berjalan, tetapi mengapa rakyatnya tetap miskin? Kebetulan, saya seperti juga Arie terlibat di lembaga penelitian, mulai melihat gejala "jualan" untuk menunda demokrasi di tingkat daerah. Mereka memang menganggap bahwa demokrasi harus bertahap, dan ada

dua yang disyaratkan dan harus diperbaiki dulu, rule of law dan manajemen kenegaraan atau birokrasi. Kalau sudah baik, baru bicara demokrasi.

Kalau Bang Rizal ingat, maka ini barangkali sama dengan gagasan Samuel Huntington yang terkenal tahun 60'an. Buku Huntington yang berjudul "Political Order in Changing Society" dengan tegas mengatakan bahwa sebuah negara dianggap modern kalau stabil, bukan demokratis. Stabilitas, menurut Huntington, harus dijaga oleh rezim yang kuat. Persoalan di Indonesia rezim yang kuat tidak mungkin dijaga oleh sosdem, tetapi oleh militer.

Tapi, yang berbeda sekarang adalah, dari beberapa hasil penelitian di daerah, beberapa kelompok yang memenangkan pilkada tidak terlalu membeli jualan "penundaan demokrasi", yang umumnya disponsori tentara. Mereka yang di daerah punya style sendiri. Seperti kasus di Medan beberapa waktu lalu, elit di sana membayar preman bukan untuk membuat kekacauan, tetapi untuk tidak berbuat apa-apa. Mereka ingin punya legitimasi dalam pilkada, tetapi limited di antara mereka saja.

Saya melihat ada gejala orang mulai menganggap bahwa demokrasi yang sedang berjalan ini kayaknya gagal. Saya sepakat dengan Bang Amir, pemikiran seperti ini tidak bisa kita terima. Justru saya merasa bahwa proses radikalisme demokrasi ini belum terjadi karena proses demokratisasi yang berlangsung baru menyentuh level elit. Masa depan Indonesia, karena kita tadi bicara nasional, justru saya lihat masih ada harapan di tingkat politik lokal. Di sini, hendaknya kita tidak melihat keberhasilan Lula. Lula dua kali ikut, dan gagal. Lula benar-benar mulai dari bawah, dari politik lokal.

Kita juga jangan melihat Evo Morales di Bolivia yang sekarang, tapi proses yang dilakukan Morales juga benar-benar dari bawah, dari root, dari lokal, termasuk Hugo Chaves dari

Venezuela. Jadi, kita jangan melihat produk jadinya saja. Kalau kita melihat perjuangan Lula, pemilu di Brazil jangka waktunya 6 tahun. Jadi, Lula berjuang dua kali kalah dalam pemilu. Bayangkan, 12 tahun Lula berjuang untuk sampai pada posisi sekarang sebagai Presiden, dan itu dimulai Lula dari tingkat lokal.

Saya kira sekarang kita harus juga mengarahkan pemikiran seperti risetnya Prakarsa atau yang dilakukan Arie agar lebih menitikberatkan pada fenomena dan dinamika politik lokal. Tidak berarti kita mengabaikan politik nasional, tapi fenomena lokal seringkali mempunyai jalannya sendiri, yang kadang-kadang membuat kita yang ada di Jakarta takjub. Menurut saya, intinya adalah apapun alasannya demokratisasi tidak boleh ditunda dengan mengatakan bahwa kita harus membereskan terlebih dahulu law enforcement dan birokrasinya. Ini karena, bagi saya, mekanisme politik lokal yang penting adalah saling kenal. Jadi, kalau Pak Erwin menjadi Camat di Medan, misalnya, orang saling kenal. Nah, kalau Pak Erwin membuat kesalahan, orang dengan cepat akan tahu. Dalam politik lokal, ada mekanisme kontrol sosial yang sebetulnya berjalan cukup efektif, yang secara sosiologis barangkali bisa dimasukkan sebagai salah satu mekanisme unik dari kekuatan kontrol politik lokal atau kearifan lokal seperti konsep local wisdom.

Terkait dengan fenomena politik Brazil, kita bertanya kenapa sekarang Lula mulai digugat oleh Partido Trabalhadores, partai buruh yang dia pimpin sendiri. Ini karena orang-orang di partai buruh saat ini melihat, Lula di tingkat nasional terlalu banyak kompromi dengan multinational institutions, seperti IMF dan sebagainya sehingga banyak orang yang dulu sama-sama Lula berjuang di Partindo Trabalhadores keluar, dan mereka mendirikan partai yang lebih "kiri", lebih radikal. Tetapi, mereka toh tatap ingin berjuang di basis

lokal, di level kecamatan, kota ataupun propinsi.

Saya kira Porto Alegre salah satu kasus bagaimana perjuangan untuk mewujudkan anggaran partisipatif (budget participation) digulirkan dan diperjuangkan bersama. Masalahnya, ketika isu itu diangkat ke tingkat nasional, lebih banyak gagalannya ketimbang success story-nya. Jadi, kita perlu memikirkan juga bahwa politik lokal bisa menjadi harapan dan masa depan kita. Saya kira itu dari saya, terima kasih.

Arie Sudjito

Kalau saya amati perkembangan di masyarakat, di level partisipasi, kita tidak terlalu sulit merebut inisiatif-inisiatif untuk melakukan perubahan. Cuma dari riset yang kita kerjakan, kita perlu memikirkan bagaimana meng-introduce relasi positif antara peningkatan partisipasi secara formal seperti pemilu dengan inisiatif civil society dalam kerangka proses politik atau perubahan kebijakan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh mengapa ini terjadi di Indonesia sejak reformasi berlangsung, upaya untuk melakukan political regrouping di berbagai tingkatan politik tidak terjadi.

Peningkatan radikalisme buruh, petani, mahasiswa dan elemen-elemen kelas menengah sampai sekarang derajat fragmentasinya cukup tinggi. Ini yang saya istilahkan, sisa-sisa dari depolitisasi dan deideologisasi Orde Baru, di tingkat praksis masih sangat kental sekali sampai sekarang. Nah, temuan riset Demos dan cerita Bang Rizal tadi juga menyebut mengapa proses radikalisme tidak terjadi? Itu bukan karena secara moral, elitnya itu buruk semua. Analisis sosiologisnya adalah karena tidak ada kekuatan kritis di level civil society yang terorganisir, baik pribadi atau grouping, secara efektif pasca-depolitisasi.

Nah, pertengkarannya yang berlangsung di aras civil society membuat gerakan-gerakan pro-demokrasi seringkali

gagal ketika, misalnya, ada peluang untuk mempengaruhi policy, baik di tingkat nasional maupun lokal, debat pada soal diambil tidaknya sebuah posisi di kalangan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi bisa setahun. Padahal, ada kebutuhan-kebutuhan secara objektif yang harus segera direspon.

Saya kira tadi gugatan atau pertanyaan kritis dari Pak Bambang Warih sebenarnya, meminjam analisis Anthony Giddens, bahwa antara varian diskursif dan varian praktis harus saling ketemu. Kita harus memeriksa apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita lihat secara lebih jelas di tingkat society, kemiskinan adalah faktual, nyata sekali. Politik kemiskinan adalah politik emansipasi. Tapi masalahnya, ketika kita mencoba membuat potret kemiskinan, kaum miskin sendiri tidak masuk dalam kerangka kesadaran atas kemiskinan yang dialaminya. Ini terjadi karena masih ada suasana kerentanan dalam gerakan civil society akibat proyek depolitisasi dan deideologisasi Orde Baru. Oleh karena itu, harus ada pilihan perpaduan antara strategi ekonomi dengan strategi politik, antara demokrasi politik dan kesejahteraan secara sinergis. Kalau kita bisa memotret dengan baik realitas tersebut, maka kita harus tahu, kapan buruh dan petani sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelas yang tertindas. Kapan kelas menengah dan kalangan intelektual merasa bahwa privatisasi atau komersialisasi pendidikan, misalnya, sesungguhnya secara sistematis telah menghancurkan struktur masyarakat bawah. Nah, gagasan di antara kekuatan-kekuatan pro-demokrasi ini masalahnya tidak pernah ketemu.

Kita orang-orang intelektual di kampus berdebat soal rezim ilmiah terus menerus, dan masalahnya adalah situasinya tidak pernah mengarah pada pilihan perubahan apa yang mau kita lakukan, revolusi atau reformasi? Kalau

kita mau optimis, perspektif sosial demokrasi harus mempunyai perangkat-perangkat yang lebih jelas, termasuk beberapa strategi dan pilihan-pilihan ketika rakyat harus menjawab tentang problem kemiskinan. Jadi, kemiskinan mestinya dijawab dengan memberikan alternatif strategi dan dengan memberikan konsep tentang kemiskinan.

Saya selalu membuat analisis sederhana bahwa desentralisasi, otonomi, dan demokrasi adalah sesuatu yang terbuka. Ada desentralisasi kewenangan di tingkat lokal, tetapi hanya di level elite dan local government-nya saja. Nah, ketika politik lokal di tingkat masyarakat tidak demokratis, terapung, yang terjadi adalah substansi pembajakan seperti ditengarai oleh hasil penelitian Demos. Termasuk tidak adanya desentralisasi alat produksi. Kasus bagi-bagi tanah bengkok, bagi-bagi beras, BLT, dan sebagainya yang terjadi di desa-desa, yang sudah dimasukkan dalam alokasi dana desa bermasalah karena kebijakan tidak di set up dalam kerangka besar reformasi kebijakan secara menyeluruh.

Mungkin kita bisa memeriksa lebih dalam berapa sesungguhnya alokasi dana-dana dari negara yang sesungguhnya telah dimanfaatkan bukan untuk masyarakat. Jika kita mampu melakukan pemeriksaan seperti itu, pertanyaannya adalah: apakah desentralisasi, otonomi, dan demokratisasi yang saat ini mulai digeser dari pusat ke daerah, dan yang sekarang ini mulai dijustifikasi gagal, kemudian mau diusung kembali melalui Undang-Undang No. 32 tentang Otonomi Daerah, cukup bisa kita pakai untuk melakukan koreksi total?

Rizal Ramli

Mas Sugeng tadi mempunyai pertanyaan menarik, prasyarat untuk program income transfer yang efektif belum ada, apa program ini mau diteruskan apa tidak?. Saya rasa, perlu diteruskan, tapi harus disadari sejak awal

bahwa pasti akan banyak masalah riil yang akan dihadapi di lapangan, pasti akan ada deviasi. Nah, yang kedua, saya sering jadi penasehat calon presiden, penasehat partai, banyak lah, dan banyak yang mereka ambil dari masukan saya istilah-istilahnya saja. Mereka ambil retorika-retorikanya, tapi begitu berkuasa hanya menjadi sekedar retorika.

Saya berikan contoh, istilah revitalisasi pertama kali diperkenalkan oleh Tim Indonesia Bangkit pada awal tahun 2002 karena kita tidak suka dengan istilah pembangunan. Dalam pemahaman kami, pembangunan identik dengan rezim otoriter. Jadi, kita berfikir dalam konteks *post-authoritarian*, lebih tepat kalau kita sebut *revitalized*, *reenergized*, *rejuvened*. Nah, kemudian dicontek oleh SBY, tanpa kredit, karena *copy right*-nya tidak ada. Termasuk di dalamnya, kami memberikan advis bahwa pro-growth bagus buat bisnis, pro job bagus buat mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan, pro-poor bagus buat yang miskin karena orang miskin di negeri ini banyak. Tapi, seperti diketahui, hasil kebijakan SBY-Jk hanya prosotan. Ini terjadi karena jiwanya tidak demikian, hanya retorikanya saja. Jadi menurut saya, kita harus mengganti strategi. Percuma kita memberikan mereka nasehat, tidak ada gunanya, lebih bagus jika kita menjelaskan alternatif policy kepada rakyat, supaya mereka mengerti, bahwa ada pandangan ekonomi alternatif. Jadi, bagi saya, ini merupakan proses pembelajaran yang penting karena menurut perkiraan kami, sampai tahun 2009, calon-calon ini hanya akan jual tampang, jual pinter nyanyi, tetapi tidak mempunyai content. *Vacuum* dalam kerangka implementasi kebijakan yang pro-poor, pro-job, dan pro-growth tadi.

Nah, teman-teman pro-perubahan yang cukup banyak di sini, bisa masuk di dalam content itu, dan tidak perlu memberi tahu kepada elit. Ajarkan

kepada rakyat, kepada buruh, kepada petani, dan seterusnya supaya mereka langsung yang *me-maintenance*, dan rakyat sendiri yang bilang kalau mereka ingin *policy* seperti itu. Nah, begitu mereka dikhianati atau begitu mereka tahu dikhianati, mereka pasti akan demand pada perubahan.

Tadi Mas Iqbal, saya setuju sekali soal social security. Jika mengaku sosdem, tetapi tidak social security, maka bohong namanya. Namun, kita juga harus ekstra hati-hati karena dalam praktik kerap terjadi begitu dananya terkumpul, benefit untuk rakyatnya, untuk buruhnya menjadi tidak jelas alokasinya.

Contohnya sederhana. Jamsostek return of investement-nya lebih rendah dari tingkat bunga deposito. Program untuk buruhnya juga sangat minimum. Mungkin karena Jamsostek dikelola secara tidak transparan dan buruhnya sendiri juga bukan bagian dari manajemen. Namun saya setuju, kalau bicara sosdem harus ada social security system. Keberpihakan juga sangat penting karena menurut saya dalam sektor kehidupan apapun, apalagi menyangkut kekuasaan, pasti tidak ada yang netral.

Untuk Mas Boni, kalau menurut Gus Dur itu, pilkada itu adalah "pilkadal". Esensinya adalah perlombaan para kadal, yang mayoritas. Memang ada kasus pilkada yang benar seperti di Jembrana dan daerah-daerah lain. Saya juga setuju sama Arie bahwa demokrasi sesungguhnya telah dibajak oleh elit dan mereka yang punya uang kecuali demokrasi bisa memakai model "paket hemat", mungkin bisa lebih benar. Menurut saya, demokrasi tanpa harus mengandalkan seluruhnya pada kekuatan uang. Saya berikan contoh, Komite Indonesia Bangkit, baru tiga bulan lalu, tepatnya akhir Oktober 2007, dapat lot publicity di berbagai media televisi, koran secara gratis. Kalo untuk capres-capres, untuk buat iklan aja, dua minggu bayarnya

10 milyar. Kami dapat gratis di "Check and Recheck", yang pembacanya cukup luas. Jumlahnya kalau tidak salah sekitar 500 ribu orang, rata-rata anak remaja dan ibu-ibu. Kalau ditambah 2 orang pembantunya menjadi 1,5 juta pembaca, lebih banyak dari pembaca Kompas. Tanpa uang atau dengan "paket hemat", mempromosikan gagasan-gagasan baik juga bisa dikerjakan. Tidak semuanya di-drive dengan uang. Bahkan ada satu hasil survei yang mengatakan bahwa dari total jumlah pemilih dalam pemilu lalu, hanya 6 persen yang terpengaruh oleh hadiah uang. Sisanya, terima uangnya jangan pilih orangnya. Istilahnya kalau di NU, kura-kura haram dalam Islam kalau dimakan, tetapi kalau telornya tidak. Jadi, kita jangan terlalu percaya kalau semua aktivitas politik harus menggunakan uang besar.

Sekarang ini, kita juga melihat adanya the crypting back of authoritarian. Tadi pagi, kami baru saja dengan teman-teman memperingati 30 tahun pendudukan kampus-kampus oleh tentara di seluruh Indonesia. Pada masa Orde Baru, tentara yang menduduki kampus-kampus bertujuan meng-enforcement stability, untuk memberikan jalan bagi "Mafia Berkeley" melaksanakan program-program ekonominya. Buktinya, hampir calon-calon gubernur sekarang berasal dari tentara lagi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera Utara, sudah mulai digarap intens oleh sisa-sisa the crypting back of authoritarian untuk kembali menempatkan tentara ke jabatan-jabatan dan posisi-posisi sipil dengan berbagai alasan.

Berikutnya, banyak juga profesional, mantan-mantan perwira polisi, tentara, berpangkat bintang dua atau bintang tiga, dipindahkan dulu sementara menjadi pegawai tinggi golongan IVe di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah itu, dipindahkan ke jabatan sipil. Kita bisa melihat dalam kasus pengangkatan Ketua

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia adalah jenderal bintang tiga yang tidak pernah belajar tentang audit. Jadi, the crypting back of authoritarian sudah terjadi. Jadi, menurut saya, kalau sekarang kita cuma gelisah melihat fenomena kembalinya militerisme, maka sudah telat.

Point saya, the show of democracy dan reformasi yang ada saat ini sudah pincang, tidak ada hasilnya untuk rakyat. Sekarang memang ada anti-KK (korupsi dan kolusi), tapi nepotisme yang berlangsung di jaman SBY-JK ini lebih gawat daripada jaman Soeharto. Jaman SBY-JK juga tidak ada perubahan dalam paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi yang ada sekarang masih berorientasi bayar utang pada kreditor yang hancur-hancuran. Oleh karena itu, tidak aneh kalau demokrasi dan reformasi sekarang ini, sekali lagi, tidak ada hasilnya untuk rakyat. Apalagi dengan mulai kembalinya the crypting back of authoritarian itu.

Faisal Basri

Saya ingin kembali ke soal kemiskinan. Memang sebagian besar angkatan kerja kita umumnya berpendidikan SMP ke bawah, high school below. Tapi kalau kita lihat dari yang menganggur, 45 persen berpendidikan SMA ke atas. Jadi, jumlah penganggur-penganggur kita separuhnya dalam hal pendidikan sangat baik. Namun, keseluruhan tenaga kerja tetap berpendidikan SMP. Dari usia 15 sampai 24 tahun, 21 persennya menganggur. Itulah sumber energi paling besar.

Kalau kita percaya survei-nya Saiful Mujani, 78 persen rakyat masih menginginkan demokrasi. Bagi rakyat, penyelesaian-penyelesaian yang mereka anggap masih pasti pada proses demokrasi. Jadi, konsolidasi demokrasi harus terus kita perkuat. Sementara di level daerah, di level desa, juga harus kita perkuat walaupun gagalnya makin banyak. Makanya, kita harus tetap memperjuangkan calon indepen-

den walaupun tetap sabar menunggu sampai 2009.

Teman-teman juga perlu melihat permasalahan kemiskinan yang kita diskusikan malam ini, datanya sebenarnya sangat bias Jawa. Di luar Jawa, tidak ada kemiskinan. Di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, rakyat umumnya tersenyum. Jadi, maksud saya, jangan masalah Jawa ini digeneralisasi sebagai masalah Indonesia. Nanti, kata orang-orang di luar Jawa, “pergi aja lu sendiri orang Jawa, jangan ajak-ajak kita”, kira-kira begitu istilahnya.

Untuk SJSN, soal mechanism ini saja sebetulnya masih belum paham betul. Misalnya, dana APBN untuk kesehatan saja kita belum tahu karena ada APBN yang dari Departemen Kesehatan, kepolisian, tentara, dan dari berbagai departemen lainnya, semua masuk alokasi dana kesehatan. Belum lagi masing-masing departemen mempunyai rumah sakit. Jadi sebenarnya, kalau digabung, alokasi dana kesehatan yang tersebar cukup untuk membiayai kesehatan rakyat. Namun, karena manajemennya kacau balau dan tersebar sehingga menjadi tidak jelas. Pertanyaan kita akhirnya bermuara pada kemana tanggung jawab negara untuk soal kesehatan?. Oleh karena itu, mari kita evaluasi karena SJSN yang ada sangat mungkin dapat kita jadikan acuan awal yang memadai untuk menjadi salah satu program konkret pemberantasan kemiskinan. Selain itu, mari kita angkat kasus-kasus menarik yang terjadi di berbagai daerah yang kita anggap berhasil dalam pemberantasan kemiskinan.

Kita juga harus membangun negara ini dengan komitmen baru, komitmen yang kuat, yang seia-sekata. Tugas kita yang penting lagi adalah memperkuat basis lokal. Bagaimana kita mengorganisir petani sehingga mempunyai otonomi dalam menentukan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusannya. Situasi seperti ini hanya akan terjadi jika kita mempunyai pemimpin-pe-



mimpin yang genuine, yang transformatif. Tapi, kayaknya pemimpin seperti itu tidak akan muncul pada pemilu 2009, mungkin dia akan muncul di 2014. Saya kira itu dulu tambahan dari saya. Terima kasih.

Ivan Hadar

Baik. Jika saya coba menarik kesimpulan dari diskusi kita ini, tadi apa yang disampaikan Mas Faisal tentang kaitan fenomena kemiskinan antara Jawa dan luar Jawa jika coba kita hubungkan dengan soal ketahanan pangan, saya kira akan lebih menarik lagi. Karena, misalnya, “politik berasisasi”, dimana yang lapar, yang kena gizi buruk di daerah-daerah, saya kira juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan “berasisasi” ini. Masyarakat daerah sudah terkontaminasi menjadi pemakan beras. Padahal, di banyak daerah, sumber makanan melimpah, ada jagung, ubi kayu, sagu, yang tadinya menjadi makanan pokok orang-orang di daerah Maluku, Sulawesi atau Papua.

Dampak struktural berikutnya adalah, generasi kita sekarang mengalami perubahan pola makanan, semuanya sudah menjadi pemakan beras. Nah, ini menjadi menarik karena kemiskinan ternyata berkolerasi positif

dengan konsumsi dasar atau makanan pokok rakyat kita. Ketika harga beras mahal, isu tersebut menjadi punya korelasi yang kuat sekali dengan kemiskinan. Masalahnya, dalam konteks pola makanan, rakyat kita tidak mempunyai alternatif selain beras. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi membeli dan mengonsumsi beras, mereka tetap mencari beras murah, bahkan makan nasi aking, dan akhirnya terkena gizi buruk, dan seterusnya masuk dalam kategori orang miskin. Padahal, beras tadinya hanya makanan pokok masyarakat di Jawa.

Saya kira kita bisa simpulkan bahwa problem kemiskinan yang dihadapi bangsa ini memang sangat kompleks dan terkait erat—bukan cuma dengan masalah politik dan ekonomi, tetapi juga—dengan isu sosial dan budaya. Jadi, masih dibutuhkan pemikiran serius guna mencari peta jalan yang solutif dan efektif dalam rangka memberantas kemiskinan negeri ini. Dan itu, tentu saja, menjadi tugas kita bersama.

Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Dengan gagasan dan masukan dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita dapat menarik manfaatnya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai bertemu pada diskusi kita selanjutnya.



MENCARI PETA JALAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN DI INDONESIA



Ilustrasi: Kass Indarto © Friedrich-Ebert-Stiftung

Di Indonesia, ketimpangan dan kemiskinan adalah fenomena sosial yang begitu konkret dan nyaris absolut. Data BPS per Maret 2007, misalnya, mencatat bahwa jumlah penduduk yang hidup miskin—dengan standar garis kemiskinan (GK)—dengan standar pendapatan Rp. 166.697,- adalah sekitar 37,17 juta jiwa. Masih menurut laporan BPS, per Maret 2006, orang miskin dengan standar pendapatan Rp. 151.997,- berjumlah 39,30 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa, jelas angka orang miskin di negeri ini sangat memilukan. Dalam bahasa ekonomi-politik, pemerintah telah gagal mewujudkan amanat reformasi: membangun kualitas kehidupan demokrasi yang berkhidmat pada kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, merujuk laporan Bank Dunia, Sugeng Bahagijo menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia menunjukkan ciri-ciri miskin pendapatan dan non-pendapatan, yakni (a) hampir 41 persen penduduk Indonesia hidup diantara garis kemiskinan 1-2 dolar per hari; (b) kemiskinan dari segi non-pendapatan seperti kurangnya konsumsi dan lemahnya akses atas layanan kesehatan, pendidikan, dan air minum; (c) ketimpangan antarwilayah dimana angka kemiskinan di Jawa/Bali berkisar pada angka 15,7 persen, sementara di Papua 38,7 persen. Lebih dari sekedar persoalan statistik, menurut Sugeng Bahagijo, jika fenomena ini dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka kualitas kemiskinan di Indonesia akan semakin nyata dan konkret: angka gizi buruk yang tinggi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun; angka kematian ibu di Indonesia yang juga demikian tinggi (307 untuk setiap 100.000 kelahiran, tiga kali lebih tinggi dibanding Vietnam atau enam kali lebih tinggi ketimbang Malaysia dan China); lemahnya proses dan hasil pendidikan, yakni jumlah angka putus sekolah yang tinggi, khususnya peralihan dari SMP ke SMA. Dalam kondisi semacam ini, persoalan kemiskinan akan tetap menjadi isu penting yang perlu didiskusikan bukan hanya dalam konteks pencarian akan persoalan kemiskinan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara mengatasi kemiskinan tersebut? Terlebih, sebagaimana disinyalir oleh Amir Effendi Siregar, kemiskinan tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga melibatkan kemiskinan informasi. Dalam hal ini, kemiskinan tidak hanya diartikan dalam arti ekonomi, tetapi juga dalam arti informasi. Oleh karena itu, menurut Amir Effendi Siregar, kita mestinya dapat memberikan semacam guidance, gambaran objektif mengenai kemiskinan dan bagaimana mengatasainya? Dengan kata lain, seperti dikemukakan

Ari Sudjito, perspektif demokrasi sosial hendaknya mempunyai perangkat-perangkat yang lebih jelas. Problem kemiskinan hendaknya diselesaikan dengan cara memberikan alternatif-alternatif pilihan, dan bukannya dengan memberikan konsep kemiskinan.

Akar Kemiskinan

Sebelum mendiskusikan alternatif-alternatif kebijakan menyangkut penyelesaian problem kemiskinan di Indonesia penting kiranya membahas terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. Ini harus dilakukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa alternatif-alternatif pilihan kebijakan pengentasan kemiskinan akan sangat ditentukan oleh besar kecilnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan tersebut. Oleh karenanya, menjadi dapat dimengerti jika masing-masing pihak mempunyai tawaran solusi bagaimana seharusnya persoalan kemiskinan diselesaikan.

Sugeng Bahagijo mengajukan empat argumentasi untuk menjelaskan mengapa Indonesia tidak begitu berhasil dalam mengatasi kemiskinan di tengah catatan keberhasilan perbaikan ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Indonesia tidak dibarengi dengan belanja sosial yang cukup dan peningkatan pendapatan pekerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat semestinya dapat meningkatkan pendapatan negara (pajak dan nonpajak) yang pada gilirannya dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk belanja sosial, termasuk di dalamnya kebijakan dan institusi pasar kerja (labour market). Namun, kebijakan sosial dan pertumbuhan ekonomi—sebagai dua wilayah yang sama penting—yang berlangsung dalam pembangunan tidak berjalan seiring. Jika belanjanya tidak efektif/salah sasaran, maka amat mungkin menjadi tidak solutif dalam mengatasi problem kemiskinan sehingga angka kematian ibu dan anak masih

akan tetap tinggi. Demikian juga yang terjadi dalam sektor ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan lapangan kerja yang berupah murah dengan status pekerjaan yang tidak pasti (*outsourcing*) dan tidak mencukupi kehidupan minimum pekerja (*the working poor*). Kedua, pembangunan ekonomi acapkali tidak diiringi dengan kebijakan dan institusi perlindungan sosial yang memadai. Padahal, dalam ekonomi pasar dan globalisasi, dinamika makro-ekonomi senantiasa menghadapi guncangan (*shock*) seperti kenaikan harga BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok. Ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan “program redistributif”, baik dalam konteks distribusi aset maupun distribusi tunai (*cash transfer*). Faktanya adalah warga negara dan masyarakat terdiri dari lapisan sosial yang beragam (ada yang berbakat dan berpendidikan tinggi, ada juga yang tidak berbakat dan berpendidikan rendah, ada laki-laki dan perempuan serta ada yang sehat dan yang cacat). Oleh karena perbedaan kapasitas semacam itu, kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang sosial ekonomi tidaklah sama. Oleh karenanya, distribusi menjadi penting karena akan memberikan kemampuan kepada masyarakat miskin untuk menikmati pertumbuhan ekonomi seperti kemampuan daya beli atau akses atas pelayanan pemerintah. Keempat, pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan karena faktor politik. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan berarti sama dengan sekedar menguatkan angka kemiskinan, tetapi juga menyangkut sikap dan tanggapan rezim politik atas tekanan dan insentif. Dalam kaitan ini, Ivan Hadar, selaku moderator, menegaskan bahwa political will adalah penting dalam mengentaskan kemiskinan. Motto kabinet sekarang ini, menurutnya, sangatlah bagus, yakni pro-poor, pro-job, dan pro-growth. Namun, hasilnya

justro prosotan. Ini terjadi karena, sekali lagi, ketiadaan political will. Padahal, dalam konsep sosdem, pro-growth dan pro-poor berjalan seiring. Artinya, pertumbuhan yang memberikan akses kepada orang miskin melalui program-program konkret pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak hidup menjadi miskin.

Berbeda dengan Sugeng Bahagijo, Faisal Basri melihat bahwa persoalan kemiskinan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi dan ada tidaknya redistribusi, tetapi yang lebih penting adalah melihat pola-pola pertumbuhan ekonomi (pattern of growth). Ia mengemukakan bahwa lambannya pengentasan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh pattern of growth ekonomi yang tidak menyentuh langsung sendi-sendi ekonomi masyarakat bawah. Dalam kaitan ini, Faisal Basri mengemukakan bahwa persoalannya bukan pada pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan turun, tetapi pada seberapa besar pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan.

Sejak tahun 2007, growth-nya sebesar 9 persen, tetapi pertumbuhan terjadi pada sektor transportasi, komunikasi, perdagangan, restoran, keuangan, elektronik, dan sebagainya. Sementara itu, basis orang miskin berada di sektor pertanian, yang notabene di desa. Padahal, pertumbuhan di sektor ini sangatlah buruk. Di sektor manufaktur, sebagai salah satu penyerap tenaga kerja cukup banyak, pertumbuhannya juga melambat bahkan di triwulan keempat pertumbuhannya tinggal 3,8 persen. Menurut Faisal Basri, pattern of growth yang semacam ini akan mempunyai implikasi serius bagi usaha mengentaskan kemiskinan dan menajamnya ketimpangan. Kelompok masyarakat kaya akan semakin kaya, sedangkan kelompok masyarakat miskin akan semakin terjerumus ke lembah kemiskinan yang semakin dalam.

Berdasarkan data 1990-2008, dengan catatan bahwa data 2008 meru-

pakan angka prediksi, Faisal Basri mengemukakan bahwa Indonesia sebenarnya mempunyai start yang lebih baik dibandingkan dengan China dan Vietnam. Namun, untuk kemiskinan absolut yang berpendapatan 1 dolar per hari meskipun sempat mengalami penurunan, tetapi poor-crisis era ternyata gagal mengangkat absolute poverty. Sebaliknya dalam kasus China, pada tahun 1990, kemiskinan masih di atas 30 persen. Namun sekarang, sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Vietnam mencatat prestasi yang lebih menakjubkan. Pada tahun 1990, penduduk miskin di negara ini masih di atas 50 persen, tetapi sekarang absolute poverty-nya hanya tinggal 10 persen, jauh di bawah angka kemiskinan yang bisa dicapai Indonesia. Selain kedua negara, Laos juga mencatat prestasi yang mengagumkan dalam mengurangi penduduk miskin.

Untuk kategori 2 dolar, yang near-poor dan yang absolute poor, menurut Faisal Basri, kondisi Indonesia lebih tidak berhasil lagi. Tingkat penurunannya untuk kategori yang near-poor maupun yang absolute poor sangat lambat. Ini berarti bahwa program penurunan angka kemiskinan terjadi, tetapi trend penurunannya sangat lambat. Faktor penyebabnya adalah pattern of growth-nya. Capaian ini jauh di bawah Cina dan Vietnam.

Di sisi lain, turun-naiknya jumlah orang miskin di Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga pangan. Sebesar 74,74 persen komoditas yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah makanan. Akibatnya, jumlah orang miskin sangat rentan terhadap fluktuasi harga sembako atau bahan pangan. Oleh karena itu, ketika makanan pokok orang Indonesia (terutama beras) naik, maka angka orang miskin pasti juga akan naik. Situasi ini, menurut Faisal Basri, akan menjadi lebih parah jika disparitas kota-desa juga dipersoalkan. Mayoritas orang miskin tinggal di desa, di sektor pertanian, sehingga

kebijakan penanggulangan kemiskinan seyogianya juga diarahkan untuk mengatasi sumber-sumber masalah kemiskinan di desa, sedangkan di perkotaan kebijakan diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah di sektor jasa-jasa dan sektor informal.

Model kebijakan juga memberikan kontribusi bagi semakin menajamnya kemiskinan. Bahkan, seperti dikemukakan Rizal Ramli, peningkatan angka kemiskinan berlangsung lebih cepat dan ganas ketimbang janji-janji program anti-kemiskinan yang ada. Ini terjadi karena policy bias sebagai akibat new liberal policy approach. Akibat yang ditimbulkan oleh model pendekatan kebijakan ini adalah jelas, yakni, salah satunya, return di financial sector sangat tinggi seperti tingkat suku bunga di pasar uang atau di pasar modal sehingga banyak orang memindahkan uangnya ke sektor finansial. Ini mengakibatkan resources yang masuk ke sektor riil menjadi sedikit.

Senafas dengan pandangan ini, Azman Fajar mengemukakan bahwa melihat dan memahami masalah kemiskinan dari kacamata perburuhan, tidak dapat dilepaskan dari design dan produk integral kapitalisme global yang ada di bawah kendali the international financial institutions. Kemiskinan yang ada saat ini, menurutnya, adalah produk nyata dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga donor, semacam World Bank, IMF, ADB, dan seterusnya. World Bank, misalnya, pernah meng-introduce satu program anti-kemiskinan yang namanya PRSP (poverty reduction strategy paper, red). Namun dalam beberapa kajian dan temuan riset di ALNI Indonesia, PRSP ternyata justru memiskinkandan bukan membuat kita, terutama para buruh, terbebas dari kemiskinan. Kebijakan neoliberal dalam bentuk privatisasi dan liberalisasi turut menyumbang bagi menajamnya kemiskinan dan ketimpangan. Kasus privatisasi air yang sangat berdampak pada kehidu-

“
 Secara umum, skema basic income (BI) dapat diartikan sebagai “jaminan pendapatan minimum yang diberikan kepada semua warga negara tanpa syarat sebagai hak dan dilakukan secara periodik”. Skema BI ini mirip dengan asuransi kesehatan universal yang memberi jaminan kepada semua warga negara, baik yang menjalani hidup sehat maupun mereka yang memiliki gaya hidup tidak sehat.
 ”

pan petani menjadi salah satu kasus yang dapat dirujuk.

Azman Fajar juga melihat proyek liberalisasi sebagai instrumen kapitalisme global dan neolib yang kebijakannya digelar melalui lembaga-lembaga keuangan internasional juga turut serta dalam mendorong meluasnya kemiskinan. Ini terjadi karena industri kecil dalam negeri akan kalah bersaing dengan pengusaha dari dunia Barat yang nota bene mendapat proteksi, fasilitas dan kemudahan dari pemerintahnya. Dalam konteks perdagangan global, melalui mekanisme kebijakan tarif yang diatur WTO, struktur perdagangan makin timpang, menghisap, dan tidak adil.

Mencari Alternatif: Masih Adakah Jalan?

Dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, Ivan A. Hadar mengemukakan bahwa sebenarnya terdapat perbedaan paradigma dalam mengatasi, memberantas, atau mengentaskan kemiskinan. Menurut kaum liberal, harus dengan jalan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya meskipun dalam praktiknya tidak terjadi. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, diantaranya adalah benturan antara skema padat karya dengan problem efisiensi. Ini akan menjadi fokus perusahaan. Di sini, menurut Ivan A. Hadar, akan senantiasa berlaku hukum ekonomi yang dianut oleh perusahaan, yakni bagaimana mengupayakan sebanyak mungkin pendapatan dan menekan sekecil mungkin pengeluaran. Paradigma yang lain lebih menekankan pada akses. Amartya Sen dan para ekonom lainnya berada pada gugus ini. Paradigma ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa orang miskin hanya mempunyai modal dengkul sehingga jika mereka tidak mempunyai akses terhadap pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, maka sama saja bohong.

Para peserta diskusi menawarkan berbagai alternatif solusi guna mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja, tawaran solusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara pandang dan pendekatan yang digunakan. Faisal Basri, misalnya, karena lebih menekankan pada pola pertumbuhan (pattern of growth) yang tidak menyentuh sektor-sektor penting yang menyumbangkan bagi penurunan kemiskinan, mengemukakan pentingnya skala prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, yang terpenting dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan adalah tindakan konkret pemerintah dengan cara memberi lapangan pekerjaan kepada rakyat. Ini karena sulit bagi kita untuk menyelesaikan kemiskinan jika tidak terdapat

lapangan kerja. Selanjutnya, perlu membuat skala prioritas berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Sebagian besar kantong kemiskinan di Indonesia sebenarnya berada di Jawa, utamanya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh karenanya, menurut Faisal Basri, kita perlu menyesuaikan agenda pemberantasan kemiskinan dengan proporsi jumlah penduduknya. Selanjutnya, karena dana penanggulangan kemiskinan yang dimiliki pemerintah terbatas, sedapat mungkin dana untuk orang miskin penggunaannya juga harus fokus pada target-target yang sudah ditetapkan sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tersusun secara baik, dan bukannya gebyah-uyah, hantam kromo ataupun pukul rata.

Alternatif solusi kedua ditawarkan oleh Sugeng Bahagijo. Ia menawarkan Basic Income sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kemiskinan terjadi, salah satunya, adalah karena ketiadaan kebijakan redistributif yang memadai.

Secara umum, skema basic income (BI) dapat diartikan sebagai “jaminan pendapatan minimum yang diberikan kepada semua warga negara tanpa syarat sebagai hak dan dilakukan secara periodik”. Skema BI ini mirip dengan asuransi kesehatan universal yang memberi jaminan kepada semua warga negara, baik yang menjalani hidup sehat maupun mereka yang memiliki gaya hidup tidak sehat.

Ada tiga alasan yang diajukan oleh Sugeng Bahagijo mengapa Indonesia harus mengadopsi skema BI ini. Pertama, BI merupakan skema yang memastikan adanya redistribusi dan belanja sosial yang luas. Kedua, secara politik, BI bisa menjadi model institusi sosial ekonomi yang membedakan demokrasi Indonesia pasca-reformasi dengan institusi sosial ekonomi yang berlaku di era Orde Baru. Ketiga, dari segi dana, Indonesia bisa dikatakan mampu melaksanakannya. Indonesia

hanya perlu mengalokasikan 2-4 persen dari PDB-nya untuk melaksanakan skema BI.

Skema Basic Income akan mulai muncul pada masa datang karena beberapa alasan. Pertama, (i) ada rencana untuk memperluas cakupan program Askeskin hingga meliputi 70 juta penerima; (ii) dari segi pendanaan, Indonesia memiliki kemampuan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 persen dari PDB-nya untuk program semacam BI; (iii) kemungkinan program PKH akan kian diperluas, baik dalam segi cakupan maupun besaran tunjangan tunainya; (iv) parpol-parpol besar dan tokoh-tokoh politik mungkin saja mencari gagasan atau tengah melakukan belanja ide tentang program baru yang akan mereka lakukan untuk memperkuat daya tarik program-program parpol dalam masa pemilu 2009. Sugeng Bahagijo menyebut kondisi ini sebagai “skenario utopis-realis”, suatu kondisi yang berusaha menggambarkan sesuatu yang mungkin akan dilaksanakan dalam kondisi nyata, yakni dari konteks ekonomi pasar dan kemampuan birokrasi Indonesia dalam mengumpulkan pajak dan non-pajak dan dalam men-deliver kebijakan sosial, tetapi masih mengandung cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Solusi pengentasan kemiskinan dengan skema BI ini, dalam pandangan Ivan A. Hadir, masih tradisional terutama jika dibandingkan dengan solusi yang ditawarkan oleh demokrasi sosial. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan solusi pengentasan kemiskinan dengan skema Basic Income ini dapat diterapkan di Indonesia. Namun, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi jika skema Basic Income hendak dilaksanakan. Dalam kaitan ini, Rizal Ramli mengemukakan bahwa sistem transfer pendapatan dan penjatahan seperti skema Basic Income hanya akan betul-betul efektif mencapai sasaran jika memenuhi

beberapa syarat. Pertama, kalau kita memang mempunyai single identified number. Orang yang berhak menerima adalah orang yang betul-betul berhak menerimanya. Kedua, model ini juga akan efektif kalau sistem dan birokrasinya memang bagus. Ketiga, orang memang takut dan tunduk pada hukum. Dengan begitu, takut dosa dan neraka saja tidaklah cukup. Orang harus mempunyai ketakutan dan ketaatan terhadap hukum. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka, masalah penjatahan atau income transfer akan menghadapi banyak masalah riil di lapangan.

Persoalan yang kini dihadapi Indonesia adalah kurang berjalannya proses-proses yang sebenarnya menjadi agenda reformasi. Dalam kaitan ini, ada tiga hal sebagaimana dikemukakan Rizal Ramli. Pertama, dalam praktiknya, demokratisasi telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan lama yang mempunyai uang, network, dan sebagainya. Kedua, menyangkut persoalan KKN. Barangkali, persoalan KK sudah mulai dihilangkan, tetapi nepotismenya justru lebih dahsyat dibandingkan dengan jaman Soeharto. Ketiga, model pembangunan ekonomi Orde Baru yang eksklusif, yang hanya menguntungkan kroni dari segi corruption. Sementara itu, policy-nya tidak memacu, tidak inklusif, tidak menghadirkan pemerataan dan tidak memberi kesempatan untuk semua orang. Reformasi hanya terjadi pada level yang pertama dan yang kedua, sementara yang ketiga seolah-olah tidak bermasalah. Padahal, model pembangunan ekonomi Orde Baru justru banyak masalah. Oleh karena itu, perlu direvisi dengan menghadirkan sebuah model ekonomi baru, sebuah sistem ekonomi yang sungguh-sungguh berkhidmat pada kepentingan rakyat. Kondisi ini lebih diperparah lagi oleh ketiadaan visi yang kuat dari para pemimpin sekarang. Lemahnya visi dan leadership ini mendorong terjadinya reformasi “transaksional”, reformasi tawar-menawar,

sehingga melahirkan pemimpin yang kelasnya juga tawar-menawar. Jika pemimpinnya kelasnya tawar-menawar, maka hasilnya pasti akan mempertahankan status quo. Indonesia sekarang memerlukan pemimpin transformatif, nabi-nabi besar, yang mampu melakukan transformasi radikal.

Kembali ke masalah pengentasan kemiskinan. Pada dasarnya, persoalan kemiskinan adalah persoalan akses. Oleh karena itu, mengentaskan kemiskinan harus juga menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan akses kepada orang miskin. Seperti dikemukakan Erwin, di negara seperti Jerman, persoalan akses baik dalam bidang kesehatan maupun asuransi sosial mulai dibahas secara intens. “Saya kira”, menurutnya, “yang sangat penting adalah akses kepada pendidikan karena semua tahu bahwa ada korelasi antara pendidikan dan kemiskinan”. Lebih lanjut, Erwin mengemukakan bahwa jika tidak salah dua dari tiga pengangguran di Indonesia adalah generasi muda, yang berumur antara 15 sampai 20 tahun. Mereka pada umumnya berpendidikan rendah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan karena mereka miskin. Jika keadaan ini tidak berubah, maka mereka akan tetap hidup miskin. Ketika mereka menikah, berkeluarga, maka anaknya juga akan miskin sebagai akibat ketidakmampuan “generasi miskin” ini dalam membiayai pendidikan anaknya. Singkatnya, menurut Erwin, problem nyata yang dihadapi Indonesia adalah jika akses terhadap pendidikan tidak bisa ditingkatkan, maka kemiskinan akan sulit untuk dihapuskan.

Dari perspektif buruh, social security tampaknya menjadi alternatif yang paling direkomendasikan dalam usaha mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam kaitan ini, Iqbal menyatakan bahwa social security adalah sebuah jawaban untuk mengentaskan kemiskinan. Ini karena buruh tidak lagi dapat bersandar pada upah yang secara riil

terus mengalami penurunan. Upah buruh di DKI, misalnya, kendati upah nominal buruh naik 2000 persen terhitung sejak tahun 1982 sampai 2004, tetapi secara riil sebenarnya hanya naik sebesar 67 persen. Jadi, social security adalah sebuah jawaban untuk mengatasi kemiskinan yang kini telah melilit Indonesia.

Untuk mendukung gagasan tersebut, Iqbal memberikan ilustrasi bagaimana jaminan sosial mulai dilaksanakan di negara-negara maju. Jerman telah memulai sistem jaminan sosial ketika pekerja formal di negara tersebut baru berjumlah 10 persen dari jumlah angkatan kerjanya. Ini terjadi pada era kepemimpinan Otto van Bismarck, sekitar tahun 1900-an. Sejarah mencatat bahwa ekonomi Jerman di bawah van Bismarck tumbuh secara luar biasa. Negara maju lainnya, Amerika Serikat, memulai sistem jaminan sosial sebagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan sekitar tahun 1935-an ketika income per kapitanya 600 dolar. Income per kapita Indonesia sekarang sudah 1.300 lebih. Dengan demikian, secara teoritik, Indonesia mestinya sudah cukup mampu untuk membuat jaminan sosial (social security) Sementara itu, Inggris memulai sistem jaminan sosialnya ketika ekonomi negeri itu terpuruk pasca-Perang Dunia I, yakni sekitar tahun 1911-an. Terakhir, Korea Selatan sebagai negara yang paling dekat dengan kita memulai sistem jaminan sosial ketika income per kapita rakyat di negeri itu masih 100 dolar. Sekarang, Korea Selatan memiliki pendapatan dari tabungan pensiunnya saja sebesar 240 milyar US dolar. Ditinjau dari perspektif ini, jaminan sosial tampaknya menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan. Bahkan, Rizal Ramli mengatakan, “kalau ngaku sosdem ngga ada social security bohong namanya”. Meskipun dalam konteks Indonesia, harus dilihat secara hati-hati karena sering kali dalam praktiknya begitu dananya terkumpul, benefit untuk

rakyat dan buruh menjadi tidak jelas alokasinya. Oleh karena itu, salah satu hal terpenting adalah, seperti dikemukakan Arie Sudjito, sejauh mana kapasitas state sebagai satu institusi dapat merespon secara cerdas dan bijak atas problem-problem kemiskinan yang ada.

Catatan Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari diskusi mengenai kemiskinan di atas. Pertama, kemiskinan merupakan persoalan yang cukup gawat yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Sebagaimana dikemukakan Ivan A. Hadar, problem kemiskinan yang dihadapi Bangsa Indonesia sangat kompleks dan terkait erat—bukan hanya dengan masalah politik dan ekonomi, tetapi juga—dengan isu sosial dan budaya. Oleh karena itu, masih dibutuhkan pemikiran serius guna mencari peta jalan yang solutif dan efektif dalam rangka memberantas kemiskinan negeri ini. Kedua, pentingnya membuat skala prioritas. Sebagian besar masyarakat miskin berada di daerah pedesaan meskipun di daerah perkotaan kemiskinan juga terjadi, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal. Selain itu, konsentrasi penduduk miskin juga sebagian besar di Jawa, utamanya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, usaha pengentasan kemiskinan tidak boleh dipukul rata untuk seluruh wilayah Indonesia. Persoalan kemiskinan harus dilihat secara tajam dengan tidak melakukan generalisasi sehingga skala prioritas berdasarkan target-target sasaran yang sudah ditetapkan mutlak dilakukan.

Kesimpulan ketiga berkenaan dengan akses masyarakat miskin. Baik basic income maupun social security pada dasarnya bertujuan untuk membuka akses orang miskin terhadap, misalnya, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Orang miskin mengalami kekurangan akses, dan akses terhadap basic need untuk hidup

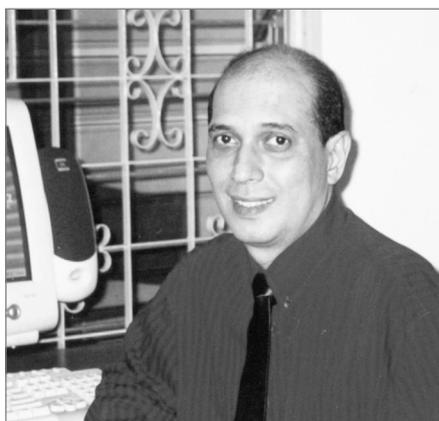
orang miskin di Indonesia sangat tidak memadai. Demikian juga untuk akses kesehatan dan juga pendidikan, kondisinya sangat buruk. Di bidang pendidikan, hanya sekolah dasar yang aksesnya cukup memadai. Selebihnya, sangat buruk dan semakin buruk di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kemiskinan di Indonesia harus dimulai dengan sebuah perspektif, desain atau paradigma baru yang lebih jelas sehingga bisa lebih fokus, dan sungguh-sungguh bisa mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan yang ada. Ketiga, pentingnya komitmen elit. Apapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia maka keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh komitmen elit dalam membuat kebijakan yang pro-poor. Tanpa komitmen semacam itu, apapun solusi yang ditawarkan tidak akan efektif. Bahkan, barangkali, akan membat persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi semakin buruk. Keempat, pentingnya melihat pengalaman-pengalaman lokal guna mendorong optimisme ke arah usaha pengentasan kemiskinan. Arie Sudjito mengemukakan pentingnya melihat inisiatif-inisiatif lokal yang mungkin bisa dimanfaatkan, sedangkan Nur Iman Subono mengemukakan pentingnya melihat perjuangan pemimpin-pemimpin yang “sukses”, yang kesemuanya berangkat dari bawah, aras lokal dan berlangsung bertahun-tahun. “Kita juga jangan melihat Evo Morales di Bolivia yang sekarang”, demikian Nur Iman Subono mengungkapkan, “tapi proses yang dilakukan Morales juga benar-benar dari bawah, dari root, dari lokal, termasuk Hugo Chaves dari Venezuela”. Hal yang sama, tentu saja, juga terjadi pada Presiden Lula da Silva. Ia berjuang dari bawah, dari akar rumput dan berlangsung bertahun-tahun. Perjuangan mengentaskan kemiskinan mungkin masih sangat panjang, yang membutuhkan pemikiran dan kerja keras.



AKSES BAGI ORANG MISKIN



IVAN A. HADAR*)



Saat ini, kemiskinan harus dilihat sebagai masalah utama yang perlu diprioritaskan. Rencana pemerintah untuk menurunkan kemiskinan menjadi sekitar separuh dari jumlahnya saat ini (16,6%) pada tahun 2009, banyak diragukan. Suara optimis pun, mensyaratkan perombakan birokrasi, pemberantasan korupsi dan kerja keras semua pihak. Karena, sebenarnya, berkat industrialisasi, barang dan jasa bisa dihasilkan secara berlimpah di seantero bumi, termasuk di Indonesia. Namun, kenyataannya hampir separuh dari jumlah penduduk dunia atau sekitar 3.2 miliar jiwa orang miskin nyaris tidak bisa menikmatinya. Di Indonesia, menggunakan ukuran di bawah 2 dollar

AS perhari, jumlah mereka yang miskin dan rentan menjadi miskin, mencapai angka fantastis lebih dari 40% jumlah penduduk. Padahal, waktu yang dimiliki Indonesia untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium (MDGs) – khususnya, mengurangi jumlah orang miskin menjadi separuh pada 2015 dibandingkan tahun 1990, yaitu sekitar 7,5% jumlah penduduk – semakin mendesak.

Bagi Amartya Sen, seseorang disebut miskin karena tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak setiap orang itu ditentukan oleh “nilai diri” (his original bundle of ownership) yang dimiliki seseorang. Bagi sebagian besar manusia, nilai diri yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Karena itu, bagi Sen, kemiskinan dan kelaparan tidak bisa diatasi dengan sekedar memperbesar produksi. Orang miskin harus mempunyai pekerjaan yang memberinya penghasilan.

Terdapat kesepakatan luas bahwa jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama kebijakan pembangunan, maka pengadaan dan peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan. Namun, terdapat dua paradigma yang

berseberangan tentang cara pencapaiannya. Pertama, asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah resep terbaik pemberantasan kemiskinan karena akan menyerap tenaga kerja. Meski selama ini, kenyataan empiris sepenuhnya menunjukkan kenyataan berbeda dari asumsi tersebut. Penyebabnya, kuatnya kecenderungan cara berproduksi industrial yang padat modal dan hemat tenaga kerja.

Meskipun demikian, percepatan globalisasi memberikan argumentasi baru kepada para pendukung pertumbuhan. Asumsinya, persaingan global hanya memberikan hak hidup kepada cara berproduksi menggunakan teknologi mutakhir yang hemat biaya dan tenaga kerja serta padat modal. Konkretnya, yang masuk dalam kategori ini adalah perusahaan menengah-besar yang secara sadar memaksimalkan kemampuan bersaing yang sistemik, misalnya lewat efisiensi kolektif. Sebenarnya, tuntutan efisiensi kolektif juga melibatkan usaha kecil sebagai sub-kontraktor dalam keseluruhan jaringan produksi, meski hanya dalam jumlah yang relatif kecil dengan persyaratan kemampuan mendekati kategori pertama. Sementara sebagian besar usaha kecil, sekedar

disarankan sebagai penerima “tunjangan sosial” atau perlu diperkuat daya survivenya.

Berseberangan dengan paradigma tersebut adalah keyakinan bahwa orang miskin harus dibantu memperoleh penghasilan. Asumsi dasarnya, usaha kecil adalah perekonomian rakyat yang sejati. Dukungan perlu diberikan pada penghapusan diskriminasi, reformasi regulasi, terciptanya ruang usaha serta akses pada komponen produksi dan sumber daya. Ketika persamaan kesempatan dengan usaha menengah-besar tersedia, diharapkan usaha kecil akan mampu menaikkan baik investasi, inovasi, pengembangan usaha maupun penghasilan. Namun, belum ditemukan bukti empiris yang meyakinkan bahwa harapan tersebut bisa menjadi kenyataan massal. Lagi pula berhasil tidaknya sebuah usaha lebih banyak ditentukan oleh pasar. Berangkat dari kenyataan yang relatif pesimistik ini, opsi apa yang harus dipilih dalam kebijakan pembangunan?

Nampaknya, meski tidak ada resep instant dan dipastikan manjur, beberapa hal berikut ini harus menjadi pegangan dalam kebijakan memberantas kemiskinan. Pertama, manusia, kesejahteraannya dan pengamanan masa depannya harus selalu menjadi fokus utama kebijakan pembangunan; bukan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemampuan bersaing atau integrasi ke dalam pasar dunia. Sebagai bahan abstraksi, semua itu bisa saja merupakan gambaran tentang tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Namun, secara konkret, data tentang pendapatan per kapita, kegagalan pasar, bad governance, seringkali mengaburkan banyak detail serta melupakan hambatan (ceteris-paribus) yang merugikan orang dan negera miskin serta relasi asimetrik pasar global.

Kedua, lewat kebijakan dan regu-

lasi, kesempatan yang sama harus diberikan dalam persaingan antara usaha kecil dengan usaha menengah-besar maupun antar usaha kecil itu sendiri. Ketiga, Pemberantasan kemiskinan lewat pengadaan lapangan kerja, harus memperhatikan tingkat pengembangan industri dan integrasi sebuah negara dalam pasar dunia. Negara yang tingkat pertumbuhan industrinya belum terlalu maju sementara sektor informalnya masih mendominasi seperti halnya Indonesia, perlu mempertimbangkan strategi yang pas. Ambisi agar mampu bersaing



dalam pasar global sebaiknya diba-rengi upaya mendukung usaha kecil sebagai basis industrialisasi.

Keempat, pemetaan masalah dan potensi sebuah negara serta akseptansi strategi pembangunan yang spesifik, hanya akan bisa diterima luas bila hal tersebut dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk orang miskin. Kelima, negara berkembang dengan potensi pasar luas seperti halnya Indonesia, seringkali akan ditekan oleh lembaga multilateral (terutama WTO, IMF dan Bank Dunia) serta negara adidaya (khususnya AS) untuk membuka pasarnya dan menghilangkan

subsidi. Bila hal ini dituruti, paling tidak secara jangka pendek, berdampak anjloknya tingkat upah dan meningkatnya PHK yang berarti meningkatnya jumlah orang miskin.

Seperti diungkapkan di atas, sebuah kebijakan pemberantasan kemiskinan yang berhasil sekali pun, dalam jangka waktu menengah dan panjang, bisa saja masuk ke dalam “perangkap globalisasi”. Meskipun demikian, tiada alasan untuk menyerah sejak awal. Bahwa cara pandang, nilai dan struktur dalam perekonomian selalu berubah, terlihat jelas dalam semakin pentingnya lingkungan sebagai faktor perekonomian. Tuntutan negara-negara berkembang berpenduduk besar - seperti China, India dan Brasil yang seharusnya juga dilakukan Indonesia - atas cadangan air, oksigen dan energi yang semakin terbatas, akan mendorong perubahan drastis dalam pola konsumen di negara-negara maju. Hal ini membuat cara berproduksi padat modal (capital intensive) yang tergantung pada sumber energi eksternal dan tak-terbaharui (un-renewal energy) menjadi semakin mahal, sehingga tenaga kerja sebagai faktor produksi (kembali) menjadi penting.

Jalan menuju pengadaan lapangan kerja dan penghasilan, hemat sumber daya alam dan bentuk-bentuk perekonomian yang ramah lingkungan akan lebih mudah dijalani, bila orang miskin berkesempatan memperoleh pendidikan dan standar hidup yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka lebih mampu menyuarakan kepentingan sendiri dan terlibat dalam posisi yang setara dengan lainnya dalam wacana demi terbentuknya struktur ekonomi nasional dan internasional yang adil.

*) IVAN A. HADAR, Koordinator Nasional Target MDGs (Bappenas/UNDP); pendapat pribadi .



THOMAS PAINE, KEMISKINAN DAN KE BASIC INCOME¹



Sugeng Bahagijo
Associate Director Perkumpulan Prakarsa

1. Pengantar

Majalah Time bulan Agustus tahun 2007 lalu melansir laporan menarik. Dalam rangka menyongsong pemilu presiden di sana, Time mengeluarkan usulan-usula kebijakan. Harapannya, kubu republik dan demokrat akan mengadopsinya. Salah satu usul yang menjadi terkenal adalah "Dana Amanah Anak" ["Baby Bond"] untuk semua anak Amerika tanpa memandang kaya-miskin, black atau latino. Setiap tahun ada 4 juta anak lahir. Untuk setiap anak akan diberikan dana sebesar 5000 dolar. Dana itu ditabung dan hanya boleh diambil ketika anak berusia 20 tahun.

Dana itu diperkirakan akan membiak sebesar 19.000 dolar ketika si anak menjelang dewasa². Gagasan apa ini? Darimana datangnya?

Ini tidak lain adalah bentuk skema Basic Income. Basic Income [selanjutnya disebut "BI"] adalah "jaminan pendapatan minimum yang diberikan kepada semua warga negara tanpa syarat, sebagai hak". Apakah BI merupakan skema kebijakan yang cocok dan ampuh untuk mematahkan kemiskinan di Indonesia? Apakah BI etis-adil untuk meringankan beban sosial ekonomi kaum "miskin" dan "hampir miskin" yang berjumlah lebih dari 70

juta orang? Apakah BI akan menjadi kebijakan dan kelembagaan adil dan efektif untuk menyelamatkan generasi masa kini dan masa depan Indonesia (kaum miskin, kaum perempuan, kaum ibu dan anak anak)?

Tulisan ini mengajukan pendapat bahwa Indonesia perlu mengadopsi BI dan mengujicobanya. Tiga alasan utama diajukan dan dicoba dipertahankan. Pertama, BI merupakan skema yang memastikan adanya redistribusi dan belanja sosial yang luas; Kedua, secara politik, BI akan menjadi institusi sosial ekonomi yang membedakan demokrasi Indonesia paska-reformasi dengan ja-

1 Makalah ini merupakan versi singkat dari makalah hasil penelitian yang lebih lengkap oleh penulis berjudul "Sebuah Ide Bernama Basic Income: Mencari Kebijakan Sosial Yang Lebih Etis" (10 Jan/Februari 2008).

2 Lihat, Richard Stengel, "A Time To Serve" Time, Augustus 13, 2007. Apa tujuannya? "Like the old GI Bill, the money must be used to fund education, start a bussines, or make a down payment on a home. The bond would preserve the voluntary nature of the service but offer strong incentive for young people to sign up". Ide ini bersumber dari gagasan

Prof Bruce Ackerman dan Anne Alstot dari Universitas Yale. Yang kemudian diadopsi Partai buruh Inggris dan pada tahun 2001, Tony Blair melansir program ini dengan nama resmi Children Trust Fund. Lihat, analisa Samuel Brittan, "The Logic of the Baby Bond" dalam Prospect 08/03. Brittan antara lain menulis "usulan tentang distribusi asset telah masuk ke dalam dokumen 2001 Labour Manifesto, tetapi karena tidak memiliki backing yang kuat, akan sangatr mudah bagi Menkeu (Chancellor Gordon Brown) untuk menunda kebijakan ini. Karena dialah akhirnya kebijakan ini dilaksanakan."

man Orde Baru; ketiga, dari segi dana, Indonesia mampu melaksanakannya. Indonesia mampu mengalokasikan 2-4 persen PDB untuk skema BI. Untuk itu, makalah menempuh tiga tahapan. Bagian pertama akan menjelaskan serba singkat bagaimana kemiskinan di Indonesia dan pilihan-pilihan strateginya; bagian kedua akan mempertimbangkan skenario kebijakan sosial; dan bagian ketiga, akan memaparkan argumen mengapa BI layak dan perlu dicoba di Indonesia.

2. Kemiskinan dan Cara Mematahkannya

10 tahun paska-krisis ekonomi dan paska-reformasi, Indonesia masih belum bisa bebas dari perkara kemiskinan dan kerentanan³. Kemiskinan dan kerentanan yang alot ini merupakan ancaman bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia dan cita-cita Indonesia akan masyarakat yang adil dan makmur. Laporan Bank Dunia (2007) Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia antara lain melaporkan antara lain : (a) hampir 41 persen penduduk Indonesia hidup di antara garis kemiskinan 1 dan 2 dolar per hari. (b) kemiskinan dari segi non pendapatan seperti kurangnya konsumsi, dan lemahnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dan air mi-

num; (c) ketimpangan antara wilayah. Angka kemiskinan di Jawa/Bali adalah 15,7 persen, sementara di Papua 38, 7 persen. (Indopov-Bank Dunia, 2007). Dengan singkat, meskipun Indonesia telah berhasil memulihkan ekonominya dan mencetak perbaikan-perbaikan nyata pada level makro ekonomi, namun penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tampak masih jauh dari harapan⁴.

Pertanyaan kita adalah mengapa demikian? Tidakkah pertumbuhan ekonomi sudah mencukupi? Bukankah pertumbuhan ekonomi sejak paska-krisis selalu positif bahkan di atas 5%? Jika kita terima asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai, maka ada beberapa dugaan mengapa kemiskinan di Indonesia masih awet dan alot (*persisten poverty and exclusion*).

(1) Pertumbuhan ekonomi itu tidak dibarengi dengan belanja sosial yang cukup dan peningkatan pendapatan pekerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat semestinya dapat diubah menjadi peningkatan pendapatan (pajak dan non pajak) pemerintah dan pada gilirannya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk belanja sosial⁵. (2) Pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan kebijakan dan institusi perlindungan sosial yang memadai. Padahal, dalam ekonomi pasar

dan globalisasi, senantiasa mengalami guncangan (shock) ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok terus terjadi. (3) Pertumbuhan ekonomi tidak disertai program redistributif baik berupa distribusi aset dan distribusi tunai (cash transfer). Adalah fakta bahwa warga negara dan masyarakat terdiri dari lapisan sosial yang beragam, ada yang berbakat dan berpendidikan tinggi, ada juga yang tidak berbakat dan rendah-pendidikan. Ada laki-laki ada perempuan, ada yang sehat ada yang cacat. Kapasitas mereka untuk memanfaatkan peluang sosial ekonomi tentu berbeda-beda. Karena itu, distribusi menjadi penting. Distribusi akan memberikan kemampuan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi (daya beli, akses atas pelayanan pemerintah).

Ekonom terkemuka Indonesia, Mubyarto menulis, periode panen minyak tahun 1973-1981, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN dalam bentuk barang (in kind), secara massif⁶. Tetapi sayangnya, hal ini tidak sampai kaum miskin yang paling miskin dari penduduk Indonesia. Dalam kalimat Mubyarto : "... Tetapi meskipun semua kebijaksanaan dan program itu tersebut jelas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menaikkan kapasitas berproduksi kelompok masyarakat ter-

3 Lihat, SNPK: Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2005, Komite Penanggulangan Kemiskinan-Kementrian Kesejahteraan Rakyat. Jakarta; INDOPOV-Bank Dunia, 2007, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Bank Dunia: Jakarta.

4 Target pemerintahan SBY-JK adalah memangkas angka pengangguran menjadi 6 persen dan angka kemiskinan 8 persen sampai pada akhir tahun 2009. Pada akhir tahun 2007, angka pengangguran masih di angka 9,5 persen dan angka kemiskinan masih berkisar pada 16 persen. Survei Danareksa Research Institute atas kinerja ekonomi Indonesia triwulan IV 2007 menulis "...sayangnya, pesatnya laju pergerakan ekonomi itu lebih ditopang sektor padat modal dan padat teknologi...bisnis ini tak menyedot banyak pekerja. Akibatnya, mimpi masyarakat kelas bawah terbang ke awaang-awang. Faktanya, mereka justru dicekik oleh kenaikan harga barang-barang pokok" Lihat, Tempo dan Danareksa Research Institute, "Melaju di Awang-Awang", Tempo, 9 Maret 2008, hal 59-62.

5 Di AS, misalnya, studi oleh Burtless dan Smeeding (2007) tentang mengapa tingkat kemiskinan AS lebih parah ketimbang negara-negara

OECD lainnya, menemukan, keparahan kemiskinan di AS lebih disebabkan karena perbedaan kebijakan sosial ketimbang kinerja pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu tampak pada (a) seberapa jauh belanja sosial untuk kaum miskin dan (b) seberapa mencukupi tingkat upah minimum di sebuah negara dibanding negara-negara lain; Lihat, Gary Burtless and Timothy M. Smeeding, 2007, "Poverty, Work, And Policy: The United States in Comparative Perspective", Testimony before the House Committee on Ways and Means, Subcommittee in Incone Security and Family Support.

6 Daftar kebijakan itu adalah : (i) membeli beras dan pupuk dalam jumlah yang mencukupi, (ii) membangun 6000 gedung SD, (iii) mengangakat 58 000 guru, (iv) meningkatkan subsidi kepada pemerintah daerah dengan 60%, (v) menaikkan gaji pokok hampir semua pegawai negeri sebesar 3 kali lipat dan 5 kali lipat untuk guru dan pegawai dinas kesehatan dan (vi) menaikkan belanja pembangunan termasuk kenaikan 80% untuk dalam alokasi pertanian dan irigasi. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, 1988, Jakarta: LP3ES, hal 157. [cetak miring- SB]

tentu, namun yang bisa menikmatinya masih terbatas, dan mereka yang termasuk kelompok miskin, lebih-lebih 20% kelompok termiskin, masih belum ikut menikmatinya, terbukti dari penurunan jumlah konsumsi kalori sebesar 13%....”⁷

(4) Meski kemiskinan menyolok dan telah menjadi agenda publik dan pemerintah, kebijakan pemerintah belum tentu otomatis pro poor. Bahkan bisa sebaliknya. Jauh dari pro poor. Karena kebijakan kemiskinan menyangkut sikap dan tanggapan rezim politik atas tekanan dan insentif. Politik dapat menentukan seberapa luas/sempit belanja sosial, skema perlindungan sosial dan skema redistributif bisa dijalankan. Politik di sini tidak saja dalam arti persaingan dan perimbangan kekuatan politik belaka, tetapi juga sejauh mana ide-ide konseptual dan normatif dari elite politik yang sedang berkompetisi. Peter Hall (1993) menyatakan bahwa reformasi kebijakan (policy reform) tidak saja hasil dari “*contest for power*” di antara kekuatan sosial dan politik, tetapi juga proses “*playing with ideas*” dalam arti sejauh mana para aktor kebijakan setuju/tidak setuju atas ‘definisi cognitive’ [ragam dan pilihan kebijakan teknis] dari sebuah masalah kebijakan, dan ‘benchmark normative’ [adil atau tidak adil] bagi solusi-solusi kebijakan yang dipandang efektif. Politik dalam arti luas ini juga yang membedakan mengapa ada ragam kapitalisme (varieties of capitalism) dan mengapa sistem welfare state pun memiliki wajah yang beragam (liberal/residual, sosial-demokrat/skandinavia,

dan kontinental).

Pertanyaan terpenting. Jika kita melihat fakta dan trend kemiskinan serta jika kita terima bahwa kebijakan pemerintah dan politik ikut mempengaruhi bahkan menentukan besar kecilnya dampak dari kebijakan penanggulangan kemiskinan, pertanyaan penting kita adalah apa yang perlu menjadi pedoman kita dalam merumuskan kebijakan dalam mengatasi kemiskinan? Dua pedoman kiranya diperlukan. Pertama, soal metode analisa/diagnosa kemiskinan dan kedua soal prinsip (Esping Andersen, et all, 2002). Metode baru diperlukan karena kemiskinan atau pemiskinan selama ini dipandang dan diidentifikasi secara statis, “snapshot” dan sepenggal-sepenggal: “berapa angka kemiskinan, berapa pengangguran dan berapa anak putus sekolah.” Padahal perkara kita adalah “berapa banyak warga negara yang kemungkinan (*likely*) akan terjebak kemiskinan terus menerus (*persisten poverty*), sehingga prospek hidupnya (*life chances*) akan sangat inferior ketimbang warga negara lainnya?”.

Prinsip diperlukan sebagai aturan dasar untuk membuat pilihan dan menyortir prioritas kebijakan. Kebijakan sosial seperti juga *welfare state* adalah kontrak sosial dengan warga negara. Sebuah kebijakan dimanapun di dunia ini, tidak pernah dan tidak mungkin dijalankan tanpa asumsi-asumsi normatif-etik di belakangnya. Selama ini, kebijakan dominan neo-liberal selalu dibimbing oleh prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi Paretian (*Pareto efficiency*) menyatakan bahwa

“perubahan kebijakan sosial bisa dikatakan positif jika [a] perubahan itu menelurkan efisiensi lebih besar dan [b] tak seorang pun dirugikan”. Prinsip efisiensi saja kiranya tidak memadai karena dua alasan (i) pengejaran efisiensi hanya bisa dibenarkan jika dia memperbesar kemakmuran/kesejahteraan bersama. Sebagaimana ditulis Esping-Andersen⁸, “*Anyone who has suffered an introductory economic course knows that the promotion of economic efficiency can only be justified if it enhanced welfare*” (ibid h. 7); (ii) dalam era globalisasi ekonomi dan *flexible labour market* serta berbagai bencana alam di Indonesia, diperlukan prinsip yang lebih kuat yang dapat memandu kita. Prinsip keadilan sosial Rawlsian kiranya menawarkan patokan yang lebih tepat dan lebih egaliter (ibid, h 9). Prinsip Rawlsian menyatakan bahwa “perubahan kebijakan hanya bisa dibenarkan (adil) jika kesejahteraan kelompok paling lemah diperluas”.

3. Justifikasi BI di Indonesia

Para penulis dan analis hampir semua sepakat bahwa gagasan Basic Income atau BI, dapat diurut ke belakang kepada Thomas Paine, seorang wartawan-penulis dan intelektual yang juga dikenal sebagai bapak ideologi kemerdekaan Amerika Serikat dan pencetus gagasan hak asasi manusia. Dalam naskahnya yang diajukan ke Majelis Nasional Perancis tahun 1796, Paine menganjurkan adanya jaminan pendapatan itu, sebagai wujud dari persamaan hak atas sumberdaya yang diberikan oleh alam⁹. Sejak Thomas

7 Dalam konteks Indonesia, semangat yang sama, yakni kebijakan redistributif dijalankan tetapi harus menghindari cara-cara yang bersifat perampasan dan pengambil alihan, diajukan oleh Sri Edi Swasono. Dia menulis sebagai berikut, “Untuk Indonesia saya berpendapat upaya mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural ini hendaknya dilakukan melalui beberapa kebijaksanaan restrukturisasi, a.l. seperti berikut; (1) Restrukturalisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi: Pemilikan dan penguasaan aset oleh rakyat harus makin merata dan dapat mengurangi konsentrasi-konsentrasi pemilikan dan penguasaan pada sekelompok kecil aktor-aktor ekonomi...Dalam restrukturisasi ini hendaknya dihindarkan suatu perampasan seperti (savard take ac-

quisition,” “Cannibal redistribution” atau “wild take over”...” Lihat, Sri Edi Swasono, 2005, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan

8 Esping-Andersen, 2002, Why We Need A New Welfare State, op.cit. Untuk pembahasan yang seimbang dan menarik tentang efisiensi dan keadilan sosial, lihat, Nicholas Barr, 1998, The Economic of the Welfare State. Stanford: California: Stanford University Press., hal. 9-11.

9 Philippe Van Parisj, A Realistic Utopia for Brazil, 1999,

Paine abad 18¹⁰, ide tentang BI telah diajukan oleh berbagai penulis dan ahli disebut dengan bermacam-macam nama: “*territorial dividend*”, “*state bonus*”, “*demogrant*” “*citizen wages* atau “*universal benefits*” atau “*allocation universelle*” (Van Parijs, 2006; Atkinson 1995,)¹¹.

Di Eropa Barat, BI telah menjadi bahan kajian dan perdebatan di kalangan akademisi, pengambil kebijakan dan kelompok-kelompok aktivis sosial selama 15 tahun lebih. Bahkan, tidak saja diajukan sebagai solusi di tingkat nasional, BI juga telah digadagadag untuk diterapkan di Uni Eropa (Atkinson, 1998, van der Veen dan Groet, 2000). Di negara negara berkembang, Afrika Selatan¹², Brazil¹³ dan Argentina, BI juga tengah ditimbang timbang menjadi salah satu pilar bagi sistem kesejahteraan mereka. Dengan adanya BI, seorang warga negara memperoleh pendapatan dari dua sumber: (a) pendapatan dari pasar kerja karena partisipasinya dalam pasar kerja atau pasar modal, dan (b) pendapatan dari negara yang bersifat

tidak bersyarat. Van Parijs berpendapat, gagasan BI merupakan kulminasi dari sistem *welfare state*, dan bukan penghapusan *welfare state*¹⁴. Kesadaran akan kelemahan dari berbagai program dan kebijakan yang ada – bantuan sosial oleh komunitas, sistem asuransi sosial dan jaminan pendapatan minimum bersyarat, telah mendorong pemikiran perlunya skema BI.¹⁵

Di Eropa Barat, menurut Ingrid Robeyns (2007), sebagian proposal tentang Basic Income ini mengajukan besaran antara 500 sampai 1000 euro per bulan. Contoh lain dari penerapan BI ini yang sering disebut adalah pembagian “*social dividend*” tahunan di negara bagian Alaska (Alaska Permanent Fund), yang berasal dari dana bagi hasil minyak dan gas (Guy Standing, 2004). Di Alaska, sejak tahun 1976, setiap tahun warga negara menerima dana “*dividen*” atau “bagi hasil” yang dikirim langsung ke rekening para penerimanya sesuai dengan pilihan mereka.¹⁶

Skema BI ini sedikit berbeda dengan skema *Stakeholders Grant* (SG)

oleh Bruce Ackerman dan Anne Alstott dari Universitas Yale. Skema SG juga meneruskan ide “*inheritance for all*” ala Thomas Paine. Diberikan secara tunai dalam bentuk lumpsum (bukan bulanan atau tahunan), sekali, dalam jumlah yang cukup besar kepada semua warga yang telah berusia 21 tahun. Ackerman dan Alstott (2006) dalam konteks Amerika, mengusulkan hibah tunai sebesar 80 ribu dollar. Ini senilai dengan biaya 4 tahun kuliah di AS. Kebijakan untuk memajukan dua hal yang selama ini secara keliru dianggap saling bertentangan, yakni antara kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*):

“the distribution of material resources crucially shapes this background. If citizen are to begin adult life under fair conditions, it is wrong to deprive them of their just share of wealth created by prior generations. In a liberal society, this commitment should be chased out in terms of private property – since property provides an essential tool for effective self definition...It fol-

10 Pada tahun 1796, Paine juga menerbitkan bukunya *The Rights of Man*. 4 Tahun kemudian, dia melansir buku *Agrarian Justice*. Harta benda yang ada di dunia ini, kata Paine adalah milik bersama, dan hak milik pribadi (*private property*), menurut dia merupakan pengambil-alihan (*expropriation*). Karena itu, memikirkan cara untuk membuat kompensasi atas ini, Paine mengusulkan agar dibentuk *National Fund*, dan dari dana itu setiap warga negara laki-laki dan perempuan diberi dana sebesar 15 pound ketika berusia 21 tahun. Sementara mereka yang diatas 50 tahun akan diberikan dana pensiun setiap tahun sebesar 10 pound (Keane, 1995, dalam Fitzpatrick, 1999, h. 40-41). Lihat, Tony Fitzpatrick, *Freedom and Security: Introduction to the Basic Income Debate*, 1999, London: Macmillan Press LTD.

11 Bruce Ackerman, Anne Alstott and Philippe Van Parijs, *Redesigning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grant As Cornerstones for An Egalitarian Capitalism*, 2006, London: Verso.

12 Di Afrika Selatan, tidak kurang agamawan terkemuka, Kardinal Desmond Tutu dan Kardinal Njongonkulu Ndungane mendukung diadopsinya skema *Basic Income Grant* atau *Solidarity Grant* di Afrika Selatan sebagai jalan mengatasi kepapaan (*destitute*) dan ketimpangan sosial. Usul BI juga dianjurkan oleh serikat pekerja terbesar di sana, COSATU. Lihat juga Van Parijs (2006, “*Basic Income in South Africa*,” dalam *BIEN News Flash*, November 2006).

13 Di Brazil, Senator dan ekonom Eduardo Suplicy (PT) telah lama mengusulkan UU tentang BI. Usul ini juga yang memberi pengaruh kepada berbagai program tunjangan/transfer tunai seperti *Bolsa Familia*. Li-

hat Eduardo Suplicy, “*Citizen Basic Income*” *Latin American Program Special Report*, Woodrow Wilson International Center for Scholars. March 2007

14 Philippe Van Parijs, “*Basic Income Capitalism*” *Ethics*, 102, April, hal 465-484. Chicago University Press.

15 Penganjur BI berasal dari berbagai tradisi dan spektrum pemikiran, termasuk mereka yang hendak menghapus *welfare state*. Adalah Charles Murray, pemikir kanan/konservatif AS dari *American Enterprise Institute*, belakangan juga mengusulkan skema yang serupa dengan BI untuk mengatasi kemiskinan di AS (36 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan 45 juta penduduk tidak memiliki asuransi kesehatan). Dalam buku terakhirnya, *In Our Hands* (2006), Murray mengusulkan tunjangan tunai kepada setiap warga negara sebesar 10.000 dolar per tahun. Dari jumlah itu, 3000 dolar harus digunakan untuk biaya asuransi kesehatan. Proposal Murray ini ditujukan untuk mengganti/menghapus berbagai jaminan sosial seperti *social security*, *Medicare*, *Medicaid*, *welfare* and *corporate subsidies*.

16 Untuk analisa lebih lengkap tentang asal usul “*Bagi Hasil Sosial*” (*Social Dividen*) model Alaska ini, lihat J. Patrick O'Brien dan Dennis O. Olson, “*The Alaska Permanent Fund and Dividen Distribution Program*”, dalam *BIRG Bulletin*, no 12 January 1991, *BIRG*: London). Untuk liputan populer dan kritis tentang bagi hasil Alaska ini, Lihat juga *The Economist*, “*One State Free Lunch*” (December 24th, 2004).

laws that a grant of private property should be recognized as the birth-right of every liberal citizen—not a scarce commodity to be doled out by community as a reward for proper behaviour... Stakeholding and basic income both express this commitment, albeit in different ways. (Ackerman dan Alstott, 2006, hal 43).¹⁷

Secara konseptual-etis, BI dipandang memiliki keunggulan karena alasan-alasan berikut ini : Pertama, BI akan memenuhi kriteria keadilan sosial Rawlsian¹⁸ yang menekankan kebebasan sebagai dua kebebasan : kebebasan formal dan kebebasan substantif dalam arti kesejahteraan. Dan agar institusi sosial ekonomi termasuk kebijakan sosial disusun untuk memperbaiki kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung "Social and economic inequality are to be arranged so that they both (a) to the greatest benefit of the least advantage and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity. BI juga akan memenuhi tiga kriteria yang diajukan oleh Standing di awal makalah dalam mengatasi kemiskinan dalam arti economic insecurity (a) mengurangi atau membatasi risiko-risiko sosial ekonomi baik yang berasal dari guncangan sosial ekonomi maupun bencana alam; (b)

meninggikan kemampuan mengelola dan mengatasi risiko-risiko dan ketidakpastian; (c) meninggikan kemampuan untuk memulihkan diri secara sosial dan ekonomi.

Kedua, BI akan memperbaiki derajat kesejahteraan mereka yang bekerja tetapi memiliki pendapatan yang rendah (working poor), dan bagaimana memperkuat daya tawar tenaga kerja di tengah trend praktek kerja yang fleksible. Fleksibilitas disini berarti lebih banyak orang yang dipekerjakan dalam kontrak kerja pendek, tidak stabil atau tidak ada jaminan. Dengan BI, maka pekerja yang bergaji rendah akan memiliki tambahan pendapatan, dan pekerja akan memiliki jaminan dan kemandirian pendapatan, dengan atau tanpa pekerjaan upahan. *Ketiga*, BI akan memulihkan kebebasan¹⁹. Yakni bagaimana warga negara tidak dipaksa untuk hanya memiliki satu tujuan dan konsepsi "hidup yang baik", yakni bekerja dalam satu jalur kerja upahan (*paid work*) saja, atau, bahkan hanya kepada pekerjaan yang merendahkan martabat, eksploitatif dan mengasingkan sekadar untuk bertahan hidup (*survive*). Di sini, sangat relevan apa yang dikatakan oleh Greetje Lubbi (1991), dari FNV, serikat pekerja makanan dan pertanian Belanda, "*Whithin the existing economic system, the value of work is decided by market forces. Paid*

work provides those who do with an income, whereas unpaid work have no income and no social status, and the work they do is undervalued. Yet for society as a whole, much unpaid work is extremely important".²⁰ *Keempat*, BI akan memperbaiki/mengoreksi kesenjangan kewargaaan (*citizenship*) sebagai akibat kesenjangan sosial ekonomi. Dengan kata lain, memulihkan kesetaraan dan solidaritas antara warganegara. Setiap warga negara diakui sama dan pengakuan itu terwujud dalam bentuk jaminan pendapatan minimal yang sama untuk seluruh warga. Ketimpangan ekonomi akan menjadi menurun atau dikurangi. BI akan menjadi sarana untuk redistribusi kekayaan masyarakat tetapi dijalankan dengan tanpa melanggar hak asasi dan hak milik pribadi. Kewargaaan negaraan akan menjadi substantif tidak sekadar formal seperti dalam hak untuk memilih dalam pemilu atau hak hukum di depan pengadilan.

Di Indonesia paska-reformasi, di satu sisi, sistem demokrasinya masih belia dan kanak-kanak, dan masih memerlukan pertumbuhan, pematangan dan pendalaman. Di sisi lain, tantangan dan ancaman terhadap sistem demokrasi multipartai tidak pernah surut. Terutama dari godaan kembali ke era masa lalu. Di satu sisi, kebebasan sipil dan politik dijamin, tetapi

17 Posisi ini berbeda dengan utilitarianisme dan libertarianisme. Menurut Ackerman dan Alstott, yang pertama, memang progresive untuk memaksimalkan kesejahteraan sebanyak orang dan memberikan bantuan khusus kepada mereka yang lemah, tetapi mereka mengabaikan individu dan kebebasan. Sementara libertarianisme sekadar membenarkan ketimpangan yang ada atau menerima status quo sebagai konsekuensi dari kebebasan dan menolak tindakan publik.

18 Prinsip kebebasan pertama Rawls (prinsip kebebasan), menyatakan, "Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with liberty for others, hal 51). Sementara Prinsip Perbedaan (difference principle) menyatakan, "Social and economic inequality are to be arranged so that they both (a) to the greatest benefit of the least advantage and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity" (Rawls, 1972, dalam Barr, 1998)

19 "Kebebasan" di sini diartikan tidak saja "kebebasan formal atau prose-

dural," ala Hayek dan Buchanan dan Nozick, tetapi juga "kebebasan substantif," seperti dimenegerti oleh Amartya Sen and Van Parijs, dan John Rawls dalam Justice as Fairness, diantaranya. Untuk Sen, lihat Development As Freedom, (2000) dan Van Parijs, Real Freedom For All (1995). Sen (2000) menulis "Development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as sytematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of repressive state" (hal 3). Bandingkan dengan pengertian "kebebasan formal" ala Hayek dan Buchanan, yang menafsirkan kebebasan lebih sebagai hak atau jaminan formal untuk tidak dipaksa oleh perorangan atau institusi atau sebagai "negative freedom", sedangkan bagi Sen dan Van Parijs, kebebasan adalah kemampuan (capability), atau sarana-sarana yang memungkinkan dia memiliki daya dan kemampuan untuk melaksanakan konsepsi hidupnya.

20 Greetje Lubbi, "Towards A Full BI", dalam BIRG Bulletin, no 12 Januari 1991.London. hal 15-16.

di sisi lain, di sisi lain, opini umum makin jelas merindukan kesejahteraan yang lebih baik ketimbang masa lalu. Dalam konteks semacam ini, BI merupakan calon kuat yang layak dipertimbangkan. Seandainya skema BI, diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan sosial ekonomi yang positif dan membebaskan, antara lain (i) Cakupan penerima sistem jaminan sosial Indonesia akan meluas dan makin universal sifatnya meliputi sekurangnya 70 juta-100 juta jiwa,. Ini berarti bawah sistem jaminan sosial Indonesia

akan memiliki basis sosial yang luas. Jauh lebih luas ketimbang yang ada di dalam program program PKH maupun Askeskin yang ada sekarang ini; (ii) BI akan menciptakan basis sosial yang luas bagi demokrasi yang kini sedang tumbuh dan meluas. Kewargaan (citizenship) dan kegotong-royongan (cohesiveness) akan menjadi praktek hidup bagi semua orang Indonesia. Lebih jauh, justifikasi perlunya BI dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, mesin pertumbuhan ekonomi, seberapa pun tinggi bisa dipacu,

memiliki keterbatasan dalam meneteskan hasil-hasilnya bagi kelompok miskin dan kelompok sosial yang rentan dengan kemiskinan dan risiko sosial (penyakit, PHK, bencana alam, hari tua, anak anak). Logika produktivis yang ditempuh tanpa diimbangi dengan belanja sosial, sebagai mekanisme protektif (mencegah pewarisan kemiskinan, mencegah risiko-risiko sosial dan alam) dan transformatif (penciptaan kesempatan sosial dan ekonomi, dan aset aset manusia dan masyarakat). Bung Hatta telah menu-



lis "Pendapatan nasional yang merata yang dikemukakan di sini berlainan dengan paham "national income" dalam kupasan secara "agregate thinking" cara berpikir berdasarkan keseluruhannya. Sebab pendapatan nasional secara keseluruhan bisa bertambah sedangkan pendapatan rakyat masing-masing ditekan serendah-rendahnya. Ini tidak sesuai dengan cita-cita memperbesar kemakmuran rakyat yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar kita" dikutip dari Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, 1988, Jakarta: LP3ES. Hal 42. [cetak miring SB].

Kedua, sistem demokrasi multi-partai memerlukan legitimasi sosial ekonomi. Legitimasi etis dan moral. Tanpa adanya legitimasi ini, maka demokrasi akan terus didera oleh krisis legitimasi atau yang sering disebut sebagai defisit demokrasi. Dengan singkat, bagaimana demokrasi dewasa ini bisa menjadi demokrasi yang lebih superior ketimbang demokrasi masa lalu. Sebuah demokrasi yang makin berkomitmen dan mampu menghilangkan "sumber-sumber ketidakbebasan seperti kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan" (Sen). Maka demokrasi perlu dilengkapi dengan kelembagaan sosial ekonomi yang memiliki ciri-ciri (a) memastikan semua warga memiliki kebebasan substantif, dengan berbagai jaminan sosial dan ekonomi dalam menghadapi berbagai gejolak dan risiko hidup (economic security). Kebebasan substantif dan jaminan ekonomi ini hanya bisa diraih bila ada kelembagaan non-pasar yang memastikan pendapatan minimum untuk semua; (b) merawat sentimen positif ke-wargaan, bahwa semua warga negara memiliki perasaan senasib sepenanggungan sebagai sesama warga negara (meaningful citizenship) dalam proyek bersama elite dan non elite, untuk meraih kesejahteraan di masa kini dan masa depan. Skema BI yang didanai

oleh pajak dan APBN dapat memenuhi syarat-syarat ini.

Ketiga, Birokrasi pemerintahan. Indonesia memiliki kemampuan manajemen dan birokrasi, meski pada tingkat minimum-medium. Dan belum pada tingkat tinggi dan canggih. Secara birokratis dan manajemen, BI tidak lain merupakan usaha mengirim dana tunai kepada kelompok sasaran berdasarkan data base yang ada. Dengan kemauan dan kepemimpinan politik, birokrasi bisa diubah. Indonesia telah memiliki pengalaman, dengan semua kelemahan dan kelebihannya, menyelenggarakan program transfer tunai seperti BLT, dan kini PKH. Di samping itu, manajemen dan birokrasi Indonesia juga telah memiliki pengalaman dalam melakukan pembayaran gaji kepada semua PNS, dan para pensiunan, sekitar 4 juta lebih penerima, termasuk kepada para pegawai dan pensiunan di pelosok tanah air yang jauh dari jangkauan. Sehingga, dengan perkembangan teknologi, dan berbagai perbaikan manajemen dan administrasi, Indonesia mampu juga melaksanakan program semacam BI.

Keempat, Ketidacukupan skema kebijakan sosial yang ada. Jaminan sosial yang ada di Indonesia sekarang hanya mencakup "small minority of the population" (Lindhental, 2004). Lindhental mencatat bahwa dari 210 juta total penduduk, hanya 8,1 juta yang menerima tunjangan sosial sesuai dengan standard ILO dan sekitar 80 juta tidak memiliki jaminan sosial apapun. Dari jumlah 8,4 juta pekerja sektor swasta yang menjadi anggota JAMSOSTEK, pun ternyata, ternyata hanya menerima tunjangan yang parsial, ketika mereka memerlukannya yang tidak sesuai dengan ketentuan ILO (ibid, hal 19-20). Lebih jauh, kebijakan sosial di Indonesia juga ditandai minimnya pendanaan dalam bidang kesehatan dan kekurangan/kemiskinan pelayanan kesehatan Indonesia. Indonesia tampaknya sedang menderita "Robin Hood Paradox" yakni "belanja

sosial pemerintah rendah justru ketika negara-negara itu sangat memerlukan belanja sosial yang tinggi, sementara di sisi lain negara-negara yang kaya justru mengadakan belanja sosial yang luas" (Peter Lindert, 2004).

Kelima. Tunjangan Tunai (cash transfer) atau Barang dan Jasa Kesejahteraan (In kind)? Pendekatan kebijakan sosial dominan menyatakan bahwa yang lebih diperlukan adalah penyediaan barang dan jasa (in kind) ketimbang tunjangan tunai (cash transfer). Logika yang sama - barang dan jasa lebih unggul ketimbang transfer tunai -- menjelaskan mengapa, di Indonesia, dana subsidi pupuk untuk membantu petani, dilakukan dengan cara mengirim dananya ke produsen pupuk ketimbang ke petani. Namun demikian, pengalaman Indonesia dan banyak negara lain menunjukkan hambatan dan kendala melekat kuat dalam skema semacam ini. Setidaknya ada 3 "penyakit" mengapa penyediaan barang dan jasa dapat menjadi buruk dan mengecewakan, meski tujuan kebijakan baik. (i) sumberdana yang ada lebih banyak jatuh ke tangan intermediaries ketimbang untuk para penerima yang menjadi sasaran. (ii) memerlukan biaya yang tinggi yang mungkin gagal dipenuhi atau tidak mungkin dipenuhi untuk memastikan hasil yang baik dan dengan jumlah peserta yang luas. Contohnya adalah program jaminan kerja (job guarantee) dengan upah minimum atau separuh upah minimum pada proyek-proyek padat karya. (iii) mengganggu mekanisme pasar (crowding out effect), ini misalnya terjadi pada program-program pangan murah yang membuat harga produk tertentu menjadi jatuh harganya atau mendistorsi pasar yang ada. Akibatnya merugikan kaum produsen lokal/petani yang akan lebih sejahtera jika harga jual produknya sesuai dengan harga jual pasar (market-clearing).

Keenam, Indonesia pada kenyataannya mampu mendanai skema BI.

Table : Komposisi Belanja - APBN 2008

	Nominal/Rp	% PDB
1. Belanja Pegawai	129 triliun	3,0
2. Belanja Barang	52 triliun	1,2
3. Belanja modal	101 triliun	2,4
4. Pembayaran Bunga Utang	91 triliun	2,1
5. Subsidi	92 triliun	2,2
6. Hibah		
7. Bantuan sosial	67 triliun	1,6
8. Belanja lain-lain	29 trilliun	0,7
9. Belanja Daerah	262 triliun	6,3
Total	836 triliun	17,7

Sumber: Depkeu.

Perhitungan konservatif menunjukkan bahwa pada kenyataannya, Indonesia mampu untuk mengalokasikan 2-4 persen PDB untuk mendanai skema BI. Angka-angka yang konkret dan nyata dalam APBN 2008 adalah sebagai berikut :

- Total belanja pemerintah tahun 2008 dipatok sebesar Rp. 836 triliun lebih atau 19.4 % PDB. Dari jumlah itu, Rp. 564 triliun atau 13.1% PDB dibelanjakan pemerintah pusat, dan 262 triliun atau 6.3% PDB belanja ke pemerintah daerah. Dari 13,1 % PDB itu alokasi terbesar adalah (i) belanja pegawai (Rp.129 triliun atau 3,0% PDB) dan (ii) belanja modal pemerintah pusat (Rp. 101 triliun atau 2,4% PDB) dan subsidi (Rp. 92 triliun atau 2,2% PDB).
- Alokasi Subsidi 92 triliun ini yang terbesar terdiri dari (i) BBM (Rp.46 trilliun atau 1,1%), listrik (Rp. 27 triliun atau 0,6%), pupuk (Rp. 8,7 triliun atau 0,2%), dan pangan (Rp. 5 trilliun atau 0,1%). Bantuan sosial menduduki porsi yang lumayan besar yakni 67 triliun, atau 1,6% PDB, selama ini dialokasikan untuk penanggulangan bencana dalam

berbagai bentuknya oleh berbagai lembaga dan dinas pemerintah. Belanja subsidi dan bantuan sosial bisa dipandang sebagai belanja sosial, jumlah totalnya mencapai 3,8% PDB (atau 159 triliun rupiah). Dari besaran ini, skema BI dapat dilaksanakan dengan cara realokasi pada (i) belanja subsidi dan bantuan sosial; (iii) belanja barang, subsidi dan bantuan.

4. Penutup

Kebebasan bagi warga negara pada akhirnya juga berarti kemampuan dan daya sosial untuk menjalani hidup yang layak dan bermartabat. Orang tentu tidak perlu korupsi, mencuri, merampok atau menjual narkoba untuk bisa hidup layak. Karena itu, kebebasan semestinya tidak saja bermakna "bebas dari paksaan, kekerasan dan aturan orang lain". Ingvar Carlson and Anne-Marie Lindgren (1996) dari Partai Sosial-demokrat Swedia, berpendapat bahwa kebebasan dan kesetaraan merupakan kawan seiring, bahwa tidak ada kebebasan tanpa kesetaraan kesempatan (sosial-ekonomi). Sebaliknya, hanya di masyarakat yang setara akan lahir dan

tumbuh kebebasan. Tetapi, kesetaraan itu bukan kesetaraan hasil (equality of outcome), tetapi kesetaraan kesempatan (equality of opportunity). Carlson dan Lindgren menulis bahwa "it is very often stated, at least among conservatives debaters, that freedom and equality are – generally speaking – opposites. This thesis is based on the mistaken interpretation of the demand for equality as one involving identical outcome...".²¹

Capaian-capaian sistem welfare state selama 40 tahun di Eropa dan Skandinavia – de-komodifikasi tenaga kerja dan memperkuat suara pekerja—tidak lain adalah kemampuan mengawinkan dua hal yang seringkali dipandang bertentangan, yaitu efisiensi dan keadilan sosial. Kemampuan untuk menyeimbangkan antara pasar dan usaha swasta di satu sisi, dan pemenuhan dan jaminan hak-hak dan sosial ekonomi warga negara secara luas di sisi lainnya. Kemampuan seperti akan makin diperlukan ketika demokrasi dan ekonomi nasional makin lama makin mendapat tekanan berat dari internasionalisasi ekonomi, perkembangan teknologi dan era paska-industri yang menekankan fleksibilitas kerja.

Dalam jaman yang berubah, daya masyarakat (enhancing social power) perlu menjadi perhatian untuk dirawat dan diperluas agar mampu mewujudkan cita-cita ideal sosial-demokrasi. Di dunia ketiga seperti Indonesia, dengan belanja sosial yang rendah dan jaminan sosial yang minimal, skema BI dapat menjadi salah satu pilar penting pendalaman demokrasi, untuk memperluas kesejahteraan warga dan untuk memperkuat daya masyarakat Indonesia dalam era paska-industrialisasi dan flexible labour market (Standing, 2004).

21 Lihat, Ingvar Carlsson dan Anne-Marie Lindgren, 1996, What is Social Democracy? Stockholm: Swedish Social Democratuc Party.



Inisiatif Lokal dalam Kebijakan Sosial: Pelajaran dari Makasar¹



Arie Sujito²



Reformasi telah berlangsung hampir satu dekade. Dalam prosesnya sejauh ini telah menghasilkan perubahan-perubahan mendasar, paling tidak secara formal, perangkat kebijakan dan regulasi telah diwarnai spirit reformasi. Meskipun begitu, sejumlah keraguan bermunculan, mensinyalir demokratisasi mulai terjebak dalam kesesatan,

mandeg, bahkan buntu. Sejumlah analisis disebutkan, bahwa persoalan mendasar buntutnya demokratisasi di Indonesia lebih bersumber masih kuatnya oligarki (Demos, 2004) politik lama dalam hampir semua institusi kenegaraan (birokrasi, parlemen, parpol), maupun masyarakat (ormas), sehingga yang terjadi adalah demokrasi semu dan –meminjam istilah Sorensen (2002)-- kebekuan demokrasi (frozen democracy). Tak kurang dari itu, beratnya fase transisi demokrasi Indonesia, meskipun secara formal rezim otoriter telah luluh, namun tindakan sabotase birokrasi berhaluan orbaisme masih saja menjadi hambatan reformasi (Klinken, 2007).

Meski demikian, betapapun belitan masalah itu selalu menyertai proses politik dan ekonomi, bermacam tinda-

kan dan langkah strategis para pegiat demokrasi selalu diupayakan agar mampu menerobos tembok konservatisme. Tujuannya agar perubahan dimajukan secara lebih jelas dan nyata. Hal ini terlihat pada makin maraknya inisiatif-inisiatif perubahan dan perbaikan di aras lokal. Apa yang bisa diperlihatkan dari dinamika politik lokal memberikan isyarat nyata, betapa daerah-daerah saat ini makin membenahi diri melalui skema pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebut saja misalnya, ide-ide kebijakan pro kaum miskin (pro poor) yang sebagian besar disuarakan para aktivis NGO, juga intelektual kampus telah berkembang luas bahkan secara praksis diadaptasi oleh pemerintah di berbagai daerah pada masa kebijakan otonomi. Berbagai cara ditempuh oleh aktor-aktor lokal

1 Tulisan ini memetik beberapa bagian pemikiran dari riset dalam bentuk Background Paper yang ditulis Arie Sujito, "Peta Aktor dan Kontestasi Kepentingan dalam Arena Politik Perencanaan dan Penganggaran di Kota Makasar", (Background Paper, program: Lord of the Arena: Analyzing the Power Play among Local Actors that Shapes the Pro Poor

Reform in Eastern Indonesia's Two District after Decentralization". Per-kumpulan Prakarsa-Oxfam GB, 2008)

2 Arie Sujito adalah Sosiolog UGM, saat ini menjadi aktivis Pergerakan Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal, dan peneliti di IRE Yogyakarta.

untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya, baik melalui program sektoral maupun kegiatan-kegiatan terintegrasi dalam skema pembangunan daerah. Penanggulangan kemiskinan dan langkah-langkah mereduksi keterbelakangan, khususnya perbaikan sistem pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar warga, nampaknya makin populer mengatasi defisit perubahan di hampir semua lini.

Tulisan ini akan menyajikan gambaran mengenai inisiatif kebijakan populis oleh pemerintah daerah di Makasar, di dalam menset-up kebijakan pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan gratis. Sebagai tulisan ringkas, diharapkan menjadi pelajaran berharga pengalaman lokal menginisiasi kebijakan sosial, serta bagaimana dinamika respon masyarakat sipil atas kebijakan sejauh ini.

Mencari jalan populisme

Semenjak 3 tahun terakhir ini, inisiatif pemerintah daerah, termasuk di Makasar, bermunculan dalam rangka menjawab problem pelayanan hak-hak dasar warga, seperti pembenahan kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun ada kecenderungan model duplikasi, tetapi tidak sedikit pula model-model inovasi kebijakan populis bermaksud membuat kebijakan sosial pro kaum miskin (pro poor). Hal ini jelas merupakan khabar gembira, karena dengan cara itulah, peluang perbaikan kualitas hidup warga di aras lokal besar kemungkinan dicapai.

Dalam sketsa politik, kebijakan-

kebijakan sosial populis, seperti penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis, menjadi konstruksi politik baru para pemimpin daerah. Dorongan ini mencerminkan keyakinan bahwa kesempatan mempromosikan kebijakan-kebijakan pro poor sangat terbuka di masa otonomi daerah. Pemimpin daerah berpeluang menjadi motor perubahan di daerahnya. Secara empirik anggaran daerah (APBD) menjadi sasaran paling utama dan konkret ukuran reformasi kebijakan sosial, dengan cara mengukur dan memeriksa mengenai orientasi pembangunan dan alokasi anggaran yang dialamatkan demi menopang atau menyelenggarakan program pengurangan kemiskinan.³

Di Makasar, sejak tahun 2003 hingga 2007, wacana kebijakan pro kaum miskin makin menggema. Ukuran elementer yang bisa dirujuk adalah Walikota Makasar, tahun 2003 telah membuat langkah baru inovasi kebijakan pada bidang kesehatan yakni membuat skema pelayanan rawat jalan bagi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu (pustu) secara gratis. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan (SK) Walikota No: 704/ Kep/ 445/ 2003 tentang pembebasan biaya pengobatan rawat jalan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tertanggal 1 Nopember 2003.⁴ Empat tahun berikutnya, tahun 2007 Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin menerbitkan surat keputusan (SK) Walikota No. 396/ Kep/ 420/ 2007 tentang Penetapan Penyelenggaraan Sekolah Gratis Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Makassar.⁵

Sejumlah pihak menilai, langkah penerbitan 2 SK walikota tersebut dianggap progresif, sekaligus populer, karena merupakan bagian cerminan “keberpihakan” pada kaum miskin. Isu ini mendapat perhatian, kendatipun sempat terjadi tarik menarik sifatnya kontroversial. Meski demikian, dalam proses berikutnya jika kita kaitkan dengan perkembangan politik kontemporer, misalnya pasca Pilkada Sulsel, gagasan kebijakan sosial yang pro kaum miskin justru kian bergema. Mengapa? Karena, Gubernur baru yang memenangkan Pilkada Sulsel 2008-2013 (Syahsul Yasin Limpo) menjadikan isu pendidikan dan kesehatan gratis sebagai “merek politik” yang disampaikan ke publik saat kampanye lalu.

Dalam konteks itu semua, gagasan penerbitan SK walikota terutama dari sisi konteks dan bagaimana berproses sampai dengan munculnya regulasi itu tentu menarik dipelajari, paling tidak dapat dijadikan bahan berharga untuk mendorong dan mempromosikan kebijakan sosial pro populis.

Layanan Kesehatan Gratis

Inisiasi kebijakan kesehatan gratis pada pelayanan kesehatan dasar (pembebasan biaya pelayanan rawat jalan) dimulai sejak Nopember 2003, yang sebagian besar atas dorongan kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM)⁶, yang memberi perhatian pada isu-isu pemberdayaan.⁷ Sebagai layaknya kebijakan yang dianggap baru

3 Arie Sujito, “Peta Aktor dan Kontestasi Kepentingan dalam Arena Politik Perencanaan dan Penganggaran di Kota Makasar”, (Background Paper, program: Lord of the Arena: Analyzing the Power Play among Local Actors that Shapes the Pro Poor Reform in Eastern Indonesia’s Two District after Decentralization”. Perkumpulan Prakarsa-Oxfam GB, 2008)

4 Kebijakan tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat yang ada di kota Makassar dapat mengakses sarana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan asumsi tidak boleh ada warga masyarakat kota Makassar yang tidak terlayani di Puskesmas dan Pustu khususnya karena alasan ekonomi. (Analisis proses kebijakan ini dapat dilihat dari Laporan Hasil “Riset Efektivitas Inisiatif Kebijakan Sekolah dan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Gratis di Kota Makassar”

FIK ORNOP Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa, th. 2007).

5 Ibid, FIK ORNOP – Prakarsa, 2007)

6 Dilihat dari pilihan isunya, pemikiran di kalangan NGO di Makasar memilih masalah ini diangkat agar menjadi bagian kebijakan, karena munculnya sejumlah pengalaman di lapangan menunjukkan beberapa fenomena menarik dalam konteks layanan kesehatan. Misalnya, kunjungan ke Puskesmas dan Pustu sebagian besar oleh masyarakat tidak mampu baik prasejahtera maupun keluarga sejahtera satu.

7 Hal tersebut semakin menguat pada saat dilakukan pengobatan secara gratis oleh beberapa LSM bersama kelompok masyarakat lainnya pada bulan September 2003 yang bertempat di Mesjid Raya Kota Makassar.

di Makassar, semua itu lahir dari proses-proses informal, dan melalui pendekatan personal antar agencies. Secara responsif, pemerintah lalu mendiskusikan usulan itu bersama LSM, juga dengan lembaga politik strategis seperti DPRD dengan maksud mendapatkan bahan pendalaman, bahkan dukungan politik atas pemikiran awal mengenai kebijakan kesehatan gratis tersebut. Proses waktunya begitu cepat, lalu dilakukan perhitungan dan rasionalisasi, tanpa pembahasan bertele-tele akhirnya Walikota menyepakati hal tersebut, dengan kemunculan surat keputusan (SK). Dalam relasi antar aktor politik yang sifatnya informal semacam ini, nampaknya menjadi bagian tradisi awal perumusan kebijakan yang belum terinstitusionalisasi.⁸

SK mencakup pembebasan biaya pengobatan rawat jalan, khususnya biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Pustu yang ada di kota Makassar. Cakupan pelayanan kesehatan dasar adalah layanan diluar Puskesmas seperti penyuluhan kesehatan, UKS, distribusi abate dll, dan di dalam puskesmas seperti unit layanan registrasi pasien (kartu), pemeriksaan dokter, pemeriksaan mulut dan gigi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Obat-obatan (Apotek), pemeriksaan laboratorium rutin, dan kamar tindakan seperti jahit luka (hecting) ganti verban, suntik, operasi kecil.

Jika dikaitkan dengan problem-problem yang sifatnya struktural, menyangkut hak-hak dasar seperti kebutuhan kesehatan, memang terbitnya kebijakan kesehatan gratis sangat beralasan. Selama itu, telah banyak bermunculan keluhan masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu (katagori prasejahtera) bahwa bermacam biaya pengobatan sangat ma-

hal. Kelas marginal seringkali gagal mengakses layanan kesehatan yang memadai, sehingga menjadi korban mahalnya biaya obat yang tak terjangkau. Disamping itu, pada banyak kasus ditemukan pula berbagai peristiwa kematian yang disebabkan justru oleh karena tidak tertolongnya atau terlambatnya mendapatkan pelayanan kesehatan dengan alasan faktor biaya. Peristiwa ini jelas kontraproduktif dengan bermacam laporan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inisiatif pembangunan daerah. Sementara, pada sisi lain sejumlah masukan, dorongan serta partisipasi kritis LSM dan kelompok masyarakat yang makin gencar.⁹ Atas dukungan, promisi, masukan kritis berbagai pihak khususnya di kalangan masyarakat sipil itulah, serta inisiasi Dinas Kesehatan Kota Makassar yang merintis agenda pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Pustu, lalu diformulasikan oleh pemerintah kota dalam bentuk kebijakan strategis.¹⁰ Lepas dari sejumlah problem-problem kelembagaan yang mengitarinya, kebijakan walikota ini dapat menjadi titik tolak sekaligus indikator nyata perhatian negara pada hak-hak dasar warga negara. Sebuah terobosan menarik.

Pendidikan untuk Kaum Miskin

Pada 4 tahun berikutnya sejak terjadi reformasi pelayanan kesehatan, muncul terobosan sektor pendidikan. Terbitnya SK Walikota Makassar mengenai sekolah gratis tahun 2007, dilandasi oleh beberapa alasan penting, diantaranya: a) fakta mengenai ketimpangan/ketidakmerataan akses pelayanan pendidikan di kota Makassar, diukur dari segi kualitas layanan dan kemampuan memperoleh layanan antara golongan menengah atas dan bawah; b) kecenderungan makin tingginya angka putus

sekolah terutama di pulau-pulau yang dapat dikategorikan daerah miskin; c) keresahan masyarakat akibat tingginya biaya pendidikan ditengah kesulitan ekonomi, yang semua ini berdampak pada sulitnya kemampuan masyarakat kelas bawah untuk menyekolahkan anak-anak mereka; d) adanya good will, komitmen pemerintah kota untuk mendorong pemerataan layanan pendidikan di Makassar.

Jika ditelusur proses awalnya, kebijakan sekolah gratis di kota Makassar diwacanakan oleh pemerintah kota Makassar di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, kira-kira tahun 2006. Namun, jauh sebelum itu pada aras masyarakat sipil, isu dan gagasan pendidikan gratis sendiri sejak 2002 hingga 2003 menjadi wacana kajian pada kelompok mahasiswa di Makassar. Beberapa kelompok mahasiswa yang menginisiasi ini tergabung dalam organisasi ekstra kampus maupun intra kampus. Sedangkan komite atau organisasi masyarakat juga responsif menanggapi soal-soal keterbelakangan dan keterbatasan akses struktural bidang pendidikan ini, misalnya masyarakat miskin kota, buruh dan beberapa LSM, juga merespon soal ini.

Pendidikan gratis, dikalangan para aktivis, juga masyarakat yang sadar secara kritis pada umumnya dianggap sebagai suatu keharusan untuk dijalankan oleh negara kepada rakyat Indonesia, sebagaimana mandat dalam konstitusi (UUD'45), sekaligus tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Gagasan tersebut muncul dalam bentuk wacana di media massa, maupun tuntutan ke parlemen. Namun pada umumnya, tahun-tahun awal tahun 2000-an, kecenderungan para birokrat dan politisi masih saja mempertahankan "paradigma" lama, bahwa

8 Laporan FIK ORNOP- Prakarsa, 2007

9 Sekadar contoh misalnya, adanya dukungan kelompok masyarakat pada saat pengobatan gratis di Masjid Raya Makassar, kian memperkuat argumen pentingnya pemerintah memperhatikan soal pemenuhan hak dasar bidang kesehatan. (Background paper Dinas Kesehatan Kota Makassar,

Background paper Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, lih. FIK ORNOP Sulsei - Prakarsa, 2007).

10 Op cit, FIK ORNOP - Prakarsa, 2007

soal pendidikan masyarakat adalah mahal.

Menurut Mulyadi (2007), perhatian pada pendidikan gratis, sampai pro poor budgeting awalnya dari isu anak. Advokasi akte kelahiran gratis menjadi konteks lahirnya kebijakan pro poor,¹¹ diantaranya perjuangan 9 hak dasar anak untuk daerah-daerah miskin. Formula yang diinginkan NGO adalah agar kebijakan yang dalam alokasi anggarannya bisa diukur secara konkrit. Dalam prosesnya, pemerintah sudah buat strategi penanganan dampak kemiskinan pada anak dengan kegiatan-kegiatan yang relevan.¹²

Pada hal, jika di tengok ke samping, di luar Kota Makassar, kebijakan sekolah gratis ini juga telah diterapkan daerah lain kabupaten Sinjai dan di beberapa daerah di luar Sulawesi Selatan.¹³ Kunci inisiasi kebijakan tersebut, beberapa kabupaten lain adalah kepala daerahnya (bupati). Kebijakan politik Bupati tersebut kemudian semakin membuat masyarakat sipil optimis, mengenai perlunya mendorong inisiatif membuat kebijakan yang berpihak pada kaum miskin.¹⁴

Pada berbagai dialog sekitar 2005-2006 yang banyak difasilitasi oleh Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK) bersama organisasi masyarakat sipil (CSO) lainnya seperti pedagang kaki lima, komite perjuangan rakyat miskin (KPRM) kota Makassar, serta beberapa NGO lainnya senantiasa mendorong secara aktif agar pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar, Walikota, DPRD untuk mengupayakan untuk dibuat skema kebijakan pendidikan gratis melalui

prinsip efisiensi anggaran.¹⁵ Proses pendekatan personal lingkaran elit yang memiliki relasi dengan Walikota, saat itu, kian mampu meyakinkan agar inisiasi itu dapat diwujudkan. Dari sanalah perencanaan anggaran akhirnya dirasionalisasi sehingga Walikota berhasil menerbitkan SK pendidikan gratis. Bagaimana prosesnya? Walikota Makassar memulai sosialisasi kebijakan sekolah gratis ini melalui media cetak, untuk mendapatkan tanggapan publik, khususnya kalangan masyarakat sipil seperti LSM, intelektual serta tokoh-tokoh masyarakat lokal. Alasan mendasar dan argumen mengapa kebijakan ini lahir, adalah keinginan Walikota untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah hanya karena faktor biaya. Sebagai terobosan awal, pada mulanya dipatoklah anggaran sebesar Rp. 2 M untuk rintisan (tahun pertama).¹⁶

Secara teknis, Dinas pendidikan kota Makassar diminta oleh walikota agar segera membuat konsep kelembagaan dalam menjalankan inisiatif kebijakan pendidikan gratis. Berbagai perdebatan terjadi di legislatif antara panitia anggaran (DPRD) terutama yang berasal dari komisi D/kesejahteraan rakyat (kesra) dan tim anggaran (Eksekutif) tentang konsep pendidikan gratis termasuk anggaran, jumlah dan sekolah apa saja yang akan digratiskan. Jumlah sekolah semula ada 89 sekolah (SD dan SMP) yang diumumkan melalui media cetak. Dengan berbagai pertimbangan kelembagaan dan anggaran yang tersedia, termasuk problem data akhirnya mengkerucut hingga 36 sekolah. Pada awal tahun 2007, Walikota

dan dinas pendidikan kota makassar mengumumkan, jumlah sekolah yang digratiskan sekitar 18 sekolah dengan lebih banyak berlokasi di pulau karena alasan di pulau aksesnya sangat terbatas sehingga perlu perhatian khusus.¹⁷

Sekolah-sekolah yang dijadikan pilot project kemudian diundang kepala sekolahnya untuk sosialisasi atas program tersebut. Inti penyiapan kelembagaan ini adalah, bagaimana kepala sekolah bisa mensosialisasikan kepada guru terutama panitia penerimaan siswa baru. Guru kemudian menginformasikan hal tersebut kepada siswa agar tidak membeli dulu alat sekolah (buku dan alat tulis) karena adanya program tersebut. Selain itu, sekolah juga diminta menyiapkan sistem dan kerangka perencanaan implementasi menyangkut program, seperti penerbit buku cetak berikut harganya sehingga, serta akumulasi kebutuhan anggaran yang akan diserahkan kepada sekolah sendiri untuk membeli.¹⁸

Isi program pendidikan garis tersebut adalah menggratiskan alat tulis dan buku cetak pada siswa dimana menjadi bagian sekolah yang ditentukan, termasuk insentif bagi guru yang mengajar. Program ini mulai berlangsung sejak tahun ajaran baru 2007 agar sasarannya tepat/sebelum siswa membeli alat tulis dan buku cetak untuk kebutuhan sekolah. Alat tulis dan buku cetak merupakan item yang diprioritaskan untuk disubsidi karena dianggap hal tersebut merupakan masalah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hanya saja hingga ajaran baru program tersebut belum mulai di-

11 Wawancara Mulyadi (JARI), Nop. 2007.

12 Muncul komisi perlindungan anak (kota) dibiayai APBD. Anggaran 14 juta menjadi 200 juta. Berobat untuk anak gratis. Biasanya anak miskin dan urban.

Sebagian besar anak-anak yang miskin, jalanan, dari luar kota. Biasanya saat musim tanam selesai, maka terjadi urbanisasi. Misalnya dari Jeneponto, Takalar.

13 Kabupaten Sinjai, jika merujuk APBDnya, justru jauh lebih rendah dibandingkan kota Makassar (sekitar 300 M lebih).

14 Laporan FIK ORNOP-Prakarsa, 2007

15 Hal ini tentu saja sesuai dengan kapasitas beliau sebagai ahli ekonomi yang banyak memberikan masukan pada setiap penyusunan APBD Kota Makassar maupun Propinsi Sulawesi Selatan.

16 Dilandasi oleh desakan waktu untuk menyelesaikan pembahasan APBD, maka hanya diputuskan bahwa anggaran untuk pendidikan gratis ditetapkan sebesar Rp. 2 M (FIK ORNOP-Prakarsa, 2007).

17 Selain itu, juga karena banyaknya masyarakat miskin yang berprofesi nelayan di pulau, juga di beberapa komunitas masyarakat kumuh dan miskin di wilayah pesisir.

18 Wawancara Siswan, 2007

jalankan. Dinas pendidikan dan walikota mengatakan karena adanya regulasi nasional seperti Kepmen no. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang perlu tender untuk anggaran tersebut. Maka diundanglah kembali kepala sekolah sekaligus untuk meminta jenis buku yang dipakai.

Berdasarkan *background paper* dinas pendidikan kota Makassar bahwa yang dimaksud dengan program Rintisan Sekolah Gratis adalah sebuah atau beberapa SD/SLTP dalam wilayah kota Makassar yang dijadikan percontohan/ pelopor penyelenggaraan sekolah gratis yang menyediakan layanan pendidikan secara optimal berdasarkan standar pelayanan minimal persekolahan dalam konteks wajib belajar 9 tahun. Sekolah ini ditetapkan siswanya dibebaskan dari segala bentuk pembayaran/iuran. Sumber pendanaan dalam kebijakan ini adalah dibebankan kepada APBD kota Makasar dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Program rintisan sekolah gratis awalnya ada tiga konsep yang diajukan oleh dinas pendidikan untuk dipilih salah satunya. Ketiga konsep tersebut antara lain: a) Sekolah Gratis Penuh. Sekolah gratis dipersiapkan oleh pemerintah kota Makassar berupa SD dan SMP dalam wilayah kota Makasar dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat SD dan SMP secara gratis penuh dan tetap melaksanakan pelayanan operasional persekolahan secara maksimal dengan tidak memungut biaya apapun dari siswa. b) Sekolah Gratis Terbatas. Sekolah gratis terbatas dipersiapkan oleh pemerintah Kota Makasar berupa SD dan SMP dalam wilayah Kota Makassar dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat SD

dan SMP secara gratis terbatas pada warga kurang mampu, artinya sekolah ini dipersiapkan oleh pemerintah kota Makassar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara optimal dengan memberlakukan system subsidi silang sehingga siswa/ murid yang kurang mampu benar-benar dibebaskan dari semua bentuk pembayaran, sedang bagi siswa/ murid yang berkecukupan dapat memberikan kontribusinya kepada sekolah secara sukarela. c) Sekolah Gratis Bagi Siswa Tertentu. Sekolah gratis bagi siswa tertentu dipersiapkan oleh pemerintah kota Makassar berupa SD dan SMP dalam wilayah Kota Makasar dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat SD dan SMP yang gratis, untuk siswa tertentu berdasarkan analisa bahwa sebagian siswa pada sekolah tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dapat diberikan beasiswa untuk menutupi semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan siswa lainnya tetap dapat memberikan kontribusinya kepada sekolah secara sukarela.²⁰

Program sekolah gratis di Makasar, diterapkan pada sekolah yang sudah ada, sesuai dengan konteks daerah miskin. Kebijakan ini mencari alasan-alasan mendasar, bahwa pemerintah berupaya mengurangi pungutan, memberikan konsesi berupa insentif tambahan kepada guru dan kepala sekolah untuk membantu mereka. Siswa diberikan bantuan cuma-cuma, yang di dalamnya meliputi buku, alat tulis dan referensi buku pelajaran. Dalam skema pemerintah, semua sekolah gratis perlakuan sama. Sebagai catatan, di Makasar berbeda dengan daerah lain, karena biaya sekolah, buku, dan insentif guru semua diatur dipenuhi.²¹

Problem Pelembagaan

Sketsa kebijakan sosial dengan visi populis, sebagaimana dijelaskan di depan mengutip pelajaran dari Makasar tentu dapat dianggap sebagai terobosan berharga ditengah kegelisahan publik menjawab masalah-masalah struktural yang dialami masyarakat miskin. Kita harus akui, langkah pemerintah kota Makasar dengan membuat kebijakan kesehatan dan pendidikan gratis cukup berarti, dan dianggap langkah strategis dan nyata buat kaum miskin. Tentu inisiatif lokal di Makasar semacam ini lebih progresif dan perlu diapresiasi, dibandingkan kebijakan nasional yang selama ini justru memarginalisasi kaum miskin.

Meski banyak kelebihan ditemukan dari kebijakan sosial di Makasar ini, namun bukan berarti kesemua itu absen dari sejumlah kelemahan. Pertama, sejauh ini bermacam upaya mendorong agar pemerintah lebih responsif didalam memenuhi tanggungjawabnya mengatasi masalah kemiskinan cenderung mengekspresikan reaksi atas tuntutan masyarakat sipil, dibanding gagasan besar dari para pemegang kekuasaan. Karena itu, pengalaman Makasar, begitu pula daerah lain, masih diliputi reaksi-reaksi sang pemegang kekuasaan lokal dan masih bergantung juga pada "niatan baik pemimpin lokal" dan belum tersistematisasi dalam kerangka kebijakan dalam landasan konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga terpenuhi. Tak ayal jika, pergantian kekuasaanpun bisa menjadi ancaman bagi ketidakberlanjutan kebijakan populis.

Kedua, sebagaimana diilustrasikan secara singkat diatas, proses pembuatan kebijakan sosial seperti kesehatan dan pendidikan gratis masih dirintis

19 FIK ORNOP, 2007

20 Atas pengertian program di atas, ditetapkanlah konsep sekolah gratis dinas pendidikan kota Makassar bahwa sekolah gratis dipersiapkan oleh pemerintah kota Makassar pada sejumlah SD/SLTP di wilayah kota Makassar dengan penyelenggaraan pendidikan secara gratis penuh dan

tetap melaksanakan pelayanan operasional persekolahan secara maksimal dengan tidak memungut biaya apapun dari siswa diluar kebutuhan siswa lainnya yang meliputi pakaian seragam sekolah, baju olah raga, sepatu, topi, dasi, tas, serta transportasi siswa.

21 Wawancara Mahmud, Kasubdin Dikdas. Dinas Pendidikan (Nop. 2007)

dan ditandai mekanisme informal (lobbying), kendatipun dapat ditafsir "siasat" itu mampu menjangkau kepentingan aktor dan langsung mempengaruhi kebijakan secara langsung. Namun, kesemua itu potensial besar dan kerawanan terjadinya distorsi, dan belum terjamin keberlanjutannya.

Ketiga, betapun proses kebijakan sosial di Makasar berupaya memadukan antara partisipasi dan teknokrasi, namun sayangnya hal itu tanpa ditopang tata kelembagaan yang solid, misalnya antar sektor, serta perangkat lain yang memadai. Tata regulasi dan kelembagaan yang berkenaan dengan agenda-agenda untuk kaum miskin belum terintegrasi dengan baik. Banyak program satu sama lain dikerjakan oleh dinas, misalnya soal pengentasan kemiskinan, namun diantara program itu memiliki irama masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Baik mengenai konsep, basis data, dan strategi serta indikatornya. Akibatnya, implementasi kebijakan populis tidak bisa signifikan menghasilkan perbaikan jika dibandingkan besaran alokasi dana yang dikeluarkan.

Jika ditarik pada sketsa makro, implikasi atas masalah tata kebijakan untuk kasus di Makasar, arus kebijakan formal kebijakan publik pada umumnya tidak berlangsung efektif, serta mekanisme-mekanisme informal yang memungkinkan kegiatan berjalan, keduanya itu cenderung luput menghadirkan aspirasi dan kepentingan masyarakat kecil.²² Kondisi semacam ini jelas, makin menguatnya oligarkhis dalam dua sirkuit perumusan kebijakan dimana resikonya makin memarginalisasi kaum miskin dari proses perencanaan sampai implementasi, yang akan terus berlanjut dikemudian hari, tanpa inter-



vensi sistemik. Ruang-ruang advokasi yang banyak dimanfaatkan CSO (civil society organisation), seperti pemberdayaan oleh LSM, ormas dan gerakan mahasiswa cenderung terblokir oleh kekuatan formal yang kurang memihak kelompok miskin, terlebih persekutuan oligarkhis elit lokal yang pragmatis makin mengalami institusionalisasi (pelembagaan) yang akhirnya dianggap "biasa dan dimaklumi". Bahkan, pada sisi yang lain kalangan CSO sendiri sejauh ini masih mengalami beban fragmentasi yang membuat energi mereka tidak terakumulasi untuk memperjuangkan kaum miskin secara bersama-sama.²³

Dari sejumlah temuan riset menunjukkan, arus politik anggaran untuk mendorong perubahan di Makasar bergerak dalam dua lintasan, atau sirkuit; antara nalar-nalar dan logika

yang sifatnya formal bersandingan dengan cara-cara informal berbasis pertemanan, jaringan atau persekutuan kelompok. Pada aras formal, betapun basis regulasi dan kelembagaan bekerja namun semua itu tidak dapat disebut efektif mampu menjadi rujukan dalam ukuran yang disebut pelembagaan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai modal good governance. Sebaliknya, dibawah mekanisme formal yang tidak efektif itu beroperasi pendekatan informal yang oleh sebagian besar kalangan dianggap sebagai "pilihan yang visible" karena proses kebijakan formal tidak bisa diharapkan.

Semoga capaian positif, dan sejumlah kelemahan sebagaimana diulas di atas menjadi pelajaran berharga untuk membenahi langkah baru didalam mengembangkan kebijakan sosial di kemudian hari.***

22 Arie Sujito, op cit, 2008.

23 Nampaknya, desentralisasi dan otonomi dalam kelola anggaran belum mampu bekerja efektif karena berproses bukan dengan cara-cara demokratis (partisipatif), tetapi justru oligarkhis dan elitis, sehingga

kesempatan mendorong perubahan agar kebijakan pembangunan dan penganggaran bisa berpihak kaum miskin masih menghadapi tantangan cukup berat. Ibid.



(Wawancara dengan Romo Sandyawan)

Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia:

Perjuangan Melawan Kekuasaan

Pengantar Redaksi

Persoalan kemiskinan di Indonesia demikian kompleks, dan penyelesaiannya memerlukan tindakan konkret baik dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada orang-orang miskin ataupun tindakan konkret yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat itu sendiri. Atas alasan ini, tim jurnal Demokrasi Sosial melakukan wawancara dengan Romo Sandyawan sebagai salah seorang tokoh yang concern terhadap usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Pengalaman-pengalaman Romo ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi berbagai pihak yang ingin turut serta dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kita menganggap Romo, dan kami kira banyak masyarakat Indonesia mengenal Romo sebagai orang yang banyak bergelut di lapangan untuk menghadapi problem-problem kerakyatan kita, termasuk di dalamnya mengenai kemiskinan. Menurut Romo, bagaimana potret empirik kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini?

Setidak-tidaknya, yang saya alami baik lewat perjumpaan langsung dalam pergaulan sehari-hari karena saya tinggal di wilayah yang bisa dibilang sebagai perkampungan miskin di slum area Bukit Duri, Kampung Pulau, dekat perbatasan antara Tebet dan Jatinegara maupun dengan membaca literatur, mengamati dan melihat dalam berita termasuk keterlibatan saya dalam Board di Institute for Ecosob Right (suatu lembaga penelitian yang meneliti tentang fenomena busung lapar di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur) ternyata orang miskin di Indonesia

Jurnal Demokrasi Sosial



kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang netral. Saya mengatakan demikian karena di bumi ini terdapat kekuasaan yang tidak netral seperti kekuasaan bisnis, birokrasi negara, teknologi, militerisme, agama-agama, dan sebagainya. Mestinya, kekuasaan-kekuasaan tersebut saling bekerja sama secara sinergis dalam mengatur kehidupan bersama. Itulah yang disebut menyejahterakan masyarakat.

Tujuan manajemen kekuasaan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, *de facto*, kekuasaan bisnis ekonomilah melalui World Bank, IMF ataupun Multinasional Corporation yang berkuasa. Bahkan, kekuasaannya menyandera kekuasaan-kekuasaan yang lain. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi contoh konkret.

Begitu superlatifnya kondisi kekuasaan bisnis ekonomi membuat, rasanya, orang miskin di Indonesia semakin jauh dari segala akses. Ini terjadi karena kapitalisme di Indonesia dijalankan secara brutal. Kalau pertarungan dibiarkan secara alamiah menurut hukum pasar bebas seperti sekarang maka segalanya akan rusak. Saya menyaksikan yang paling sederhana, misalnya, realitas kaum miskin urban di Jakarta dengan sistem pembangunan kota super blog. Dampaknya mengerikan sekali kalau dilihat dari orientasi tata kotanya. Belum lama saya di undang oleh dinas tata kota DKI, diminta bicara untuk menanggapi konsep pembangunan tata kota tua di Jakarta, yang sekali lagi saya bertemu dengan Prof. Dr. Danisworo yang menjadi konseptor pembangunan Jakarta yang sangat berpengaruh sesudah zaman Husni Tamrin. Itu betul-betul mengerikan. Tentu saja, kalau kita melihat desainnya tampak hebat, tetapi di situ tidak ada tempat untuk kampung orang miskin. Padahal,

¼ wilayah Kota Jakarta adalah perkampungan orang miskin, seperti pinggiran kereta api, sungai, daerah-daerah Bukit Duri atau di lembah-lembah utara yang lain adalah ¼ wilayah Jakarta. Orang-orang yang berdiam di wilayah-wilayah tersebut adalah orang-orang yang sangat miskin yang kebanyakan bekerja di sektor informal.

Sebagai contoh, di tempat saya, 7 RT penduduknya bekerja di sektor informal. Mereka tinggal di pinggir kali dengan kondisi rumah huni yang hanya berukuran kurang lebih 2X3. Bahkan, ada yang 1X3 untuk dua keluarga. Saya membangun rumah terbuka untuk pendidikan anak-anak atau perpustakaan dengan luas 8X7. Tempat tersebut menjadi public space di 7 RT tersebut, dan saya telah tinggal di kawasan tersebut selama kurang lebih sembilan tahun. Di kawasan tersebut, juga tumbuh pekerjaan sektor informal yang merujuk pada pembagian etnis. Misalnya, dari daerah Madiun, Jawa Timur, terkenal dengan potong ayam yang langsung dicuci di Sungai Ciliwung. Pedagang kelontong yang banyak dari Cirebon. Kemudian, tukang membuat sapu dan kerajinan-kerajinan lain yang sebagian besar dari Betawi. Orang-orang Madura membuat kerajinan mebel dengan kayu-kayu murah, kayu peti. Ada juga pemulung air. Mereka mengambil sampah-sampah yang masih berguna di air yang biasanya menggunakan ban atau getek yang dipakai untuk menjaring sampah. Sebagian besar mereka berasal dari Indramayu. Lalu, ada pedagang minyak dari Batak. Di wilayah tersebut, tidak kurang dari 35 jenis pekerjaan informal yang dikerjakan kebanyakan di dalam rumah. Jadi, biasanya, rumah mereka dibangun bertingkat; atas untuk huni, bawah untuk bekerja sehingga omong kosong kalau, misalnya, dibangun rumah susun alternatif dari pemerintah. Mereka tidak akan menggunakan karena praktis pekerjaan mereka hilang karena mereka bekerja di dalam rumah



jumlahnya terus meningkat. Dalam hal ini, para ahli dan para peneliti yang berusaha merumuskan problem kemiskinan seperti halnya tidak mengenal mereka dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam realitasnya, orang miskin berada dalam keseharian hidup kita. Namun, apakah kita sungguh-sungguh mengenal mereka? Menurut hemat saya, tidak. Ini karena kita semakin jauh dari realitas kemiskinan yang sebetulnya sangat dekat.

Dalam konstelasi sosial-politik negara neoliberalisme seperti sekarang ini, demokrasi pada dasarnya manajemen kekuasaan, yakni bagaimana mengatur kekuasaan karena kita tahu bahwa kekuasaanlah yang secara *de facto* menggerakkan manusia. Konflik atau bersolidaritas adalah kekuasaan. Kita mengatakan sesuatu yang suci, misalnya, tentang cinta kasih ataupun solidaritas, tetapi sebetulnya adalah

jika tidak dikasih pasar dan sebagainya. Bahkan, di bawah jembatan, ada ruangan yang menjadi tempat sektor informal yang sangat sibuk, pemulung dan sebagainya. Itu mereka gunakan sebagai tempat kediaman karena tidak ada alternatif lain. Saya berbicara seperti itu karena begitulah realitasnya.

Mereka adalah warga masyarakat yang selalu digeser-geser hidupnya. Sejak tahun '90 sampai sekarang, antara 3 ribu sampai 7 ribu KK digusur paksa tanpa diberi alternatif setiap tahun kecuali mungkin uang kerokhiman yang besarnya antara 300-500 ribu.

Sekitar tahun '92, saya mendampingi warga di Pulo Mas. Ada sekitar 75 KK warga yang tinggal di tanah dekat Coca Cola, daerah rawa-rawa dan rumah warga pemulung yang sangat miskin. Rumahnya sedikit lebih tinggi dari meja. Jadi, mereka harus membungkuk untuk dapat masuk ke dalam rumah, mirip kandang hewan. Di situ, saya mengusahakan memelihara lele dan sebagainya. Akan tetapi, pemerintah meratakan tempat tersebut. Awalnya, milik sekneg. Kemudian, dijual ke Duta Pertiwi milik Probo-soetodjo. Caranya dengan menggusur paksa dan dibakar. Dulu, petugas yang melakukan penggusuran adalah gabungan, yakni trantip, polisi, tentara, dan preman bersenjata. Sekarang, mungkin tentara sudah berkurang, tetapi polisi, tramtib dan preman bersenjata tetap. Bahkan, sekarang ini, trantip dibuat lebih menyeramkan. Oleh karena itu, laporan saya awal tahun ini atau akhir tahun lalu banyak menyoroti perilaku atau tindakan-tindakan pelanggaran hak azazi oleh aparat tramtib bukan hanya di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah ibu kota atau pemprop DKI terang-terangan membela para pemilik modal ketimbang warga masyarakatnya. Cara memandang mereka sebagai manusia jauh berbeda, dan mengalami ketimpangan yang luar biasa. Ini terjadi baik di bidang ekonomi maupun di bidang

hukum. Perda-perda selalu dibuat untuk melayani kepentingan para pemilik modal. Perda No. 11 Tahun '88, misalnya, yang mengatur bahwa orang tidak boleh sembarang berjualan di pinggir jalan, di pinggir kali, dan sebagainya. Penggusuran paksa pun terjadi dimana-mana, dan dilakukan secara brutal. Namun ironisnya, kita juga melihat bagaimana pembangunan pantai indah kapuk diberi ijin. Bahkan, diijinkannya hotel di atas air. Daerah-daerah hijau juga mendapatkan perlakuan yang sangat timpang. Asal pemodal menghendaki tanah, bahkan tanah yang ada orangnya pun dapat dilakukan penggusuran kapan saja. Di Jakarta ini, masyarakat kelas menengah ke bawah tidak akan tenang memiliki tanah. Jika para pemilik modal menghendaki, maka kita harus siap-siap menyingkir karena yang mengambil tanah-tanah tersebut bisa pemda atau aparat keamanan terlebih dahulu baru nanti diserahkan kepada pemodal. Kasus Alas Tlogo juga dapat disaksikan di Jakarta. Angkatan darat, laut, dan udara ataupun kepolisian dapat mengambil tanah-tanah tersebut untuk kepentingan latihan militer atau yang lain. Namun, satu-dua tahun diserahkan kepada pemilik modal. Ini modus yang jamak dikerjakan, yakni dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa saya mengatakan bahwa kekuasaan ekonomi telah menyandera kekuasaan-kekuasaan lain.

Kadang kala, kita menyaksikan bahwa gerakan-gerakan protes yang ditujukan untuk menuntut keadilan salah alamat. Kita begitu tergilagila mengejar aparat birokrasi dan bupati yang melakukan korupsi kecil-kecilan. Namun, kita tenang-tenang saja ketika menghadapi para pengemplang BLBI sampai 53 trilyun. Lantas, ada seorang pejabat militer pada akhir tahun '99 atau awal 2000 mengatakan, "Berapa utangmu, sisa utangmu? Berikan 10-20% dari sisa utangmu kepada saya untuk membiayai operasi militer di

Aceh". Ironisnya, itu tidak dibagikan kepada semua aparatnya, tetapi hanya para perwira tingkat atas sehingga kroco-kroco (prajurit rendahan, red.) tetap "ngobyek" di lapangan. Bayangkan 20% dari 35 trilyun dimakan sendiri oleh para perwira tersebut, dan dialah yang menjamin lewat birokrasi negara untuk mengadakan release and discharge (pembebasan bersyarat). Presiden juga membuka "karpet merah" untuk para pengemplang ini. Konon, jumlah utang BLBI yang harus dikembalikan sebesar kurang lebih 144 trilyun. Sekarang, bandingkan dengan eksistensi kaum miskin yang jumlahnya semakin besar baik yang berada di lingkungan pertanian, kaum miskin kota, nelayan, dan juga anak-anak pinggir-giran. Anak-anak di wilayah ini tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Sekitar bulan Agustus, saya mengadakan festival anak-anak jalanan di Jakarta, termasuk di dalamnya anak-anak korban lumpur Lapindo. Mereka dengan sangat cerdas bisa merumuskan bahwa di negeri ini tidak ada pemerintahan yang mampu melindungi mereka. Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dari negara. Jikapun ada, maka jumlahnya sangat sedikit.

Semacam BOS ya Romo?

Macam-macam, tetapi itu omong kosong semua. Saya sering mendengar hal itu, tetapi hanya menjadi formalisme. Ini terjadi bukan hanya karena disunat oleh aparat birokrasi, tetapi juga secara substansi tidak benar-benar untuk membantu orang-orang miskin. Sebaliknya, hanya menjadi alat kampanye partai-partai politik. Kondisinya menjadi lebih parah jika dilihat bahwa bantuan tersebut sifatnya jangka pendek. Belum pernah ada bantuan yang sustainable (jangka panjang). Saya kira ini merupakan persoalan yang serius.

Di tempat saya tinggal terdapat sekretariat Paguyuban Warga Anti



Pengusuran. Peguyuban ini merupakan komunitas-komunitas miskin dari beberapa komunitas eks warga gusuran. Mereka sering digunakan untuk live in dan penelitian oleh para wartawan dan mahasiswa, seperti mahasiswa dari perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah, Sanata Dharma, UI, dan lain-lain.

Saya ingat salah satu bentuk live in yang pernah dilakukan oleh sebuah surat kabar nasional terkemuka, media ini mempunyai tradisi rekrutmen atau screening yang luar biasa, dari ribuan yang mendaftar ke media ini tiga bulan kemudian di-screening hingga tinggal 20 orang saja. Selama hampir kurang lebih lima hari mereka melakukan live in di tempat saya. Selanjutnya, salah satu peserta tersebut adalah calon wartawan perempuan yang pintar dan kritis, dia anak orang kaya. Nah, begitu ayahnya tahu dia akan ditempatkan di Ciliwung, di kolong jembatan, ayahnya malah takut sekali. Ayahnya takut jika nanti anaknya diperkosa. Ketakutan semacam ini terjadi karena kuatnya pandangan terhadap orang miskin sebagai kriminal. Itu sudah terstigma. Padahal, anak ini sudah melalui screening yang luar biasa selama 3 bulan dan akhirnya lulus.

Sekarang, saya ingin menceritakan wartawan muda tadi. Dia berdiri di atas kolong jembatan dan melihat dari atas kolong jembatan lantas berucap, "Wah, itu pasti menyeramkan. Kumuh, kotor, airnya kental, kuning hitam dan kecoklat-coklatan. Masak tinggal di kolong jembatan yang basah dan kotor. Pekerjaannya mayoritas sebagai pemulung dan mereka biasanya mencuri/membocori air PAM". Pandangan dan stereotype semacam itu sudah sedemikian lekat. Bukankah hal biasa jika masyarakat menengah ke atas memandang masyarakat miskin seperti itu?

Dengan satu temannya, akhirnya ia masuk dan harus tinggal di kampung tersebut. Pada waktu itu, saya bilang, "Kita ke sini tujuannya bukan untuk mengajar, tetapi belajar". Begitu masuk dia bingung karena melihat komunitas yang sangat terbuka dan ramah. Mereka mempersilakan mahasiswa yang mau belajar dan bahkan ikut kerja. Dia juga kaget ketika melihat bahwa ternyata perempuan yang seusianya sangat dihargai meskipun kumuh. Ketika dia bekerja ternyata upahnya juga sama, tidak dibedakan antara yang laki-laki dengan perempuan. Namun, berdasarkan prestasi kerja. Kemudian,

ada dana solidaritas untuk orang yang sakit yang mereka kumpulkan dengan cara bantingan.

Wartawan muda tadi juga belajar bahwa jangan mempertanyakan privacy di lingkungan orang miskin. Di lingkungan kelas menengah, privacy merupakan sesuatu yang sakral, sangat penting. Bahkan, mungkin menyakutkan hidup dan mati. Di komnas HAM, pernah ada kejadian ketika terjadi pengusuran tahun 2003. Banyak korban pengusuran tersebut mengungsi ke Komnas HAM. Namun, mereka hanya diberi satu kamar mandi sehingga saling berebut. Kemudian, mulailah mereka menggantung beberapa pakaian. Melihat hal tersebut, teman-teman Komnas HAM Perempuan marah-marah. Jawaban mereka sederhana, "Aduh Bu, kami tahu kalau perbuatan ini tidak sopan, tetapi masalahnya tidak ada alternatif lain bagi kami. Ini persoalan hidup dan mati, bukan soal sopan dan tidak sopan, makanya minta tolong lah ini bagaimana."

Dari banyak literatur tentang kemiskinan, jika saya boleh melanjutkan Romo, ada banyak dimensi yang bisa menyebabkan kemiskinan. Secara umum, ada dua paradigma dalam melihat kemiskinan, yakni struktural dan kultural. Dalam kaca mata orang Barat, kita dianggap sebagai bangsa malas sehingga kita menjadi bangsa yang miskin. Namun, banyak ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya kita bukanlah bangsa malas, tetapi memang karena tidak ada kesempatan. Kita memang tidak diberikan akses sebagaimana telah Romo singgung. Menurut pengalaman empirik Romo, kita ini sebenarnya miskin karena faktor kultural atau karena memang ada hambatan-hambatan struktural sehingga kita tetap menjadi bangsa miskin?

Jelas struktural. Kebetulan, saya baru berkeliling dari Amerika. Selain juga ke Washington, Atlanta, saya juga

ke Florida, daerah bekas bencana badai Katrina. Di situ, saya juga ke slum-slum area di pantai. Terus terang, saya protes keras dengan sistem mereka yang, menurut saya, terlalu memanjakan orang. Di sana, pengangguran tidak mempunyai rumah (homeless) dibayar asal ada bukti bahwa mereka telah ditolak ketika mencari kerja. Selanjutnya, mereka mencari kerja yang pasti di tolak. Akhirnya, mereka mendapatkan bukti, dan dengan bukti tersebut mereka mendapatkan tunjangan. Kondisi ini menjadi objek belas kasih karikatif orang-orang di gereja. Oleh karena itu, saya menyatakan tidak setuju dengan program homeless tadi.

Fakta lain yang saya temukan di sana adalah tidak benar jika di AS tidak ada korupsi. Di daerah tersebut, juga banyak korupsi, termasuk dalam pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat badai. Saya bertemu dengan orang kulit hitam, dan mereka protes keras mengenai hal tersebut. Namun, ada perbedaan yang cukup mendasar antara yang terjadi di Katrina dengan di Indonesia. Di sana, hukumnya berjalan, dan hukum tersebut yang melakukan kontrol atas tindakan korupsi sehingga korupsi terjadi dengan lebih canggih, terutama di tingkat atas. Di tingkat bawah, kontrol masyarakat sangat kuat sekali. Di Indonesia, yang terjadi sebaliknya, tidak ada hukum. Hukum justru digunakan untuk memerangi orang-orang miskin. Perda yang baru, yang digunakan untuk melakukan pengusuran bahkan lebih mengerikan, dan secara frontal memerangi orang-orang miskin. Menurut analisis seorang teman, 70 persen dari kasus kebakaran di perkampungan miskin dilakukan dengan sengaja sebagai sebuah bentuk sistem pengusuran. Masyarakat yang berusaha membongkar sendiri dengan membawa linggis justru ditangkap dengan tuduhan membawa senjata tajam. Lantas, mereka dimasukkan ke penjara. Dalam hal ini, orang miskin digunakan untuk

bermain-main, untuk guyon. Padahal, bagi masyarakat miskin yang terkena hal tersebut, merupakan tragedi.

Bagaimana pandangan warga negara yang ada di luar terhadap Indonesia?

Ketika saya pulang dari Hongkong, saya duduk bersebelahan dengan orang Indonesia. Ia berasal dari Pulau Natuna dan bekerja di Hongkong sebagai buruh migran. Ia kawin dengan orang Philipina yang juga seorang migran. Pada waktu itu, dia bilang, "Pak, jika dibandingkan dengan hasil kerja saya di Indonesia, maka yang saya dapatkan di Hongkong adalah 10 kali lebih besar. Begitu parahnya negara kita". Lebih lanjut, ia bilang, "Saya memang hanya lulusan SMA, tetapi sekarang saya membuka internet sehingga saya mempunyai kesempatan membaca banyak informasi. Dari situ, saya tahu bahwa ternyata Pulau Natuna merupakan sumber gas alam terbesar". Akhirnya, dia mengetahui hal itu, dan saya juga tahu apa yang terjadi di Freeport. Bayangkan, kita hanya mendapatkan 1% dari hasil tambang emas karena pejabat-pejabat birokrasi kita doyan uang receh. Asalkan bisa masuk kantong sendiri, mereka bersedia dibayar kecil. Mumpung masih berkuasa maka diberilah ijin pengusaha asing untuk mengeruk sumber tambang emas terbesar di dunia, Freeport. Saya kira modulus untuk minyak juga seperti itu.

Lebih lanjut, teman duduk yang dari Natuna tadi mengatakan bahwa sekarang ini kita bukan hanya diremehkan oleh Amerika Serikat dan Negara-Negara Eropa, tetapi juga negara kecil Singapura. Dia tampak sangat jengkel sekali. Ia mengatakan mengapa pasir kita dibiarkan diambil oleh Singapura? Sekarang ini, ia melanjutkan, "Kita kalah dengan semua negara tetangga. Kita sudah kalah. Kita dibeli dengan uang receh, dan implikasinya saudara-saudara saya yang nelayan menjadi

hancur hidupnya".

Baru-baru ini, media memberitakan orang-orang miskin yang berada di daerah Sumba, NTT dan sentra-sentra busung lapar adalah daerah-daerah yang tidak ada air atau tak memiliki akses atas air. sementara di kawasan tersebut, sekarang banyak daerah pariwisata, dan karenanya banyak sekali kita temukan hotel-hotel mewah yang dilengkapi dengan kolam renang.

Secara de facto, kita kaya raya dan semua mengakui hal tersebut. Bahkan, orang-orang Amerika bilang bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan luar biasa besarnya. Sumber daya yang berada di Papua merupakan yang terbanyak di dunia. Saya sendiri hampir dua tahun di Aceh ketika terjadi tsunami, yakni di Aceh Barat, Meulaboh. Sumber daya ikan di daerah tersebut dahsyat sekali. Dulu, sebelum tsunami, pendapatan nelayan di kawasan tersebut jika tidak diganggu dapat mencapai 750 ribu -1 juta per hari.

Nah, kalau kami simak pernyataan-pernyataan Romo, maka tampak betapa buruknya persoalan kemiskinan dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Tentu saja, ini tidak dapat dibiarkan. Oleh karena itu, menurut Romo apakah yang harus dikerjakan oleh rakyat dalam rangka mengatasi kemiskinan mengingat pemerintah tampaknya tidak berbuat apapun yang signifikan untuk mengatasi kemiskinan?

Mengubah pendekatan yang digunakan! Kita tidak dapat menggunakan pendekatan pasar bebas dalam mengatasi kemiskinan karena hasilnya akan hancur. Pendekatan yang kita gunakan bersandar pada human right, pendekatan hak azazi. Kita harus memandang mereka sebagai masyarakat yang mempunyai hak yang sama. Minimal, dalam pikiran saya, seandainya kita tidak memberi akses atau memberi pertolongan dalam bentuk apapun maka jan-

ganlah sekali-kali mengganggu mereka. Ini karena problema yang sering kita hadapi adalah sektor informal yang menjadi sumber kehidupan masyarakat miskin tersebut bukan hanya difasilitasi, tetapi juga diganggu, digusur, dan juga diperangi.

Orientasi pembangunan kota super blok sebagaimana telah direncanakan adalah kota-kota seperti New York dan Singapura, yang tidak akan ada kampung dan orang miskin. Orang-orang miskin diprediksikan hanya sementara, dan mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal di kota. Itu benar-benar diartikulasikan oleh konseptor. Padahal, sebetulnya, ada alternatif lain dan sekarang sudah banyak yang mengkritik sistem tersebut dengan mengatakan bahwa kota kampung masih sangat mungkin untuk dibangun. Tokyo menjadi contoh kota kampung. Di sana, tetap terdapat mall ataupun perkantoran, tetapi kampung untuk orang miskin tetap ada. Bedanya, jika di situ ada ruang publik setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menggunakan ruang publik tersebut. Dengan demikian, Sogo tidak bisa disebut ruang publik karena orang miskin yang tidak memakai sandal tidak boleh masuk ke dalam. Di sini, terdapat diskriminasi. Di Tokyo, jelas kota kampung semacam itu dapat kita lihat. Di Korea juga demikian, begitu indah dan aksesibilitasnya beberapa kota yang sekaligus sebagai kampung. Jakarta, dalam pemahaman saya, sangat potensial dijadikan sistem kota kampung.

Ini berarti bahwa orang miskin tidak harus pergi dari sini. Pembangunan tidak hanya untuk perumahan orang kaya. Tidak harus begitu. Kita tidak dapat mengatakan kepada orang-orang miskin yang digusur tersebut seperti ini, "Mau pergi kemana terserah kamu. Pokoknya, kamu saya kasih uang kerugian 350 ribu atau 500 ribu". Padahal, sekarang ini, uang 500 ribu itu tidak cukup untuk menyewa mobil untuk

mengangkut alat-alat rumah tangga!

Apakah ini berarti bahwa kita harus menyelesaikan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan human right?

Iya, memang harus demikian. Ini karena problemnya bukan pada tidak tersedianya sumber daya, bukan pula pada ketiadaan modal karena begitu banyak lembaga donor yang mau mendanai kita. PBB juga mau mendanai. Namun, problemnya terletak pada kemauan politik. Ketidadaan political will. Kasus-kasus busung lapar di Indonesia Timur sebagian besar terjadi karena ketiadaan air. Padahal, di wilayah tersebut, banyak dibangun hotel-hotel mewah dengan kolam renang yang berkelimpahan air. Namun ironisnya, di dekat situ juga, orang mati busung lapar karena ketiadaan air. Persoalan akses mengangkat air dari ketinggian menyangkut political will. Teknologi tersedia dan dapat digunakan jika political will-nya kuat. New York, misalnya, merupakan kota tandus, tidak ada air. Ini tidak lebih ringan dibandingkan dengan daerah di Flores atau Wonosari. Biaya yang digunakan untuk membiayai akses air juga tidak mahal dibandingkan dengan jumlah utang. Namun sayangnya, kemauan politiknya tidak ada.

Problem pengentasan kemiskinan juga menyangkut solidaritas sosial. Di kota besar, misalnya, ini menjadi persoalan. Seringkali terjadi, diantara kita bilang begini, "Ya, gimana kita mau bilang miskin kan mall tetap penuh, tempat-tempat hiburan tetap penuh, harga makanan naik, BBM naik," Di negara-negara lain jika tidak salah ada solidaritas dari kelas menengah terhadap nasib saudara-saudaranya hidup di bawah mereka. Kalau fenomena Indonesia menurut Romo bagaimana?

Agak susah jika dikatakan demiki-

an. Pengalaman saya sejak 27 Juli '96 mulai dari tragedi Mei, bom Bali, dan tsunami, saya mendapatkan dana dari masyarakat, mulai dari ibu-ibu di Ciputat yang hanya mengirim 7 bungkus nasi dan uang 25 ribu sampai dengan yang memberikan spontan 50 juta. Pada waktu tsunami, saya bisa mendapatkan 2 milyar dari masyarakat umum. Oleh karena itu, jika kita mengatakan tidak ada solidaritas, maka jelas hal tersebut tidak mungkin. Faktanya, saya mampu mengumpulkan dana dari masyarakat umum dan juga mampu menggerakkan relawan yang berjumlah kurang lebih 280 relawan. Ini tidak hanya dari Jakarta, tetapi dari seluruh Indonesia. Mereka berangkat ke Aceh secara bergilir. Diantara relawan tersebut, terdapat dokter, lawyer, ataupun pekerja sosial dan antusiasmenya luar biasa. Jika kita bandingkan dengan di Amerika, Eropa, dan juga Australia, maka di negara-negara tersebut yang namanya volunteer orang-orang yang sudah pensiun, kebanyakan orang-orang muda. Ditinjau dari segi pengalaman dan kerja profesional, mungkin memang mereka lebih baik, tetapi dilihat dari segi mobilitas, kesiapsiagaan, ketekatan, dan kegilaan maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika tsunami Aceh tanggal 26 tsunami, pada tanggal 27 kami telah berkumpul, dan tanggal 28 kami sudah mengirim orang ke tempat-tempat yang paling parah. Menurut saya, itu sungguh luar biasa jika dilihat dari kerjanya karena waktu itu masih ada gempa susulan, gelombang masih tinggi, jalan pecah, dan mereka harus berjalan kaki. Ini berarti bahwa solidaritas sosial masih ada dan kuat.

Terkait dengan solidaritas yang lebih tinggi seharusnya ada sebuah kesadaran secara intrakelas kalau kita mau menganalisis soal kemiskinan dari aspek kelas. Artinya, ada kelas bawah yang memang untuk makan saja susah,

secara politis, harusnya muncul kesadaran bahwa pemerintah telah gagal. Bagaimana menurut Romo?

Sebenarnya, kalau kita bicara politik dalam arti perilaku pemimpin politik mestinya yang pertama-tama dipikirkan adalah kesejahteraan masyarakat. Namun, kalau praktik politik di Indonesia, menurut saya, sebagian besar parah sekali. Politik lebih untuk mencari kekuasaan, kekuasaan jangka pendek. Dalam hal ini, orientasi kekuasaan bukan untuk kepentingan nasional. Kasus Lapindo menjadi contoh suatu bentuk pelanggaran hak asasi jelas pelanggaran hak azazi, dan menjadi cermin betapa orientasi kekuasaan tidak untuk kesejahteraan rakyat. Ketika saya berada Washinton DC bertemu dengan salah seorang pengusaha Indonesia yang mempunyai perusahaan pengeboran minyak secara profesional. Ia dia disewa oleh perusahaan-perusahaan minyak besar, perusahaan migas, dsb hanya khusus untuk melakukan pengeboran minyak. Dia mengebor di Alaska, di Afrika, dan di tempat-tempat lain. ironisnya, ia malahan tidak bekerja di Indonesia. Pada waktu itu, ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Lapindo adalah kesalahan manusia, dan bukan bencana alam. Padahal, efeknya di masyarakat luar biasa. Ketika saya mengurus tsunami di Aceh, Yoyga dilanda gempa dan rumah saya rata tanah. Sampai sekarang, rumah tersebut belum bisa dibangun. Meskipun demikian, saya masih bisa melihat bekasnya dan sistem sosial masyarakatnya masih hidup. Di Sidoharjo, tidak ada satupun yang masih tersisa. Bukan hanya tempat tinggal yang ditenggelamkan oleh lumpur Lapindo, tetapi juga semua pranata sosialnya ikut tenggelam. Itupun masih dibohongi dengan diberi uang untuk sewa rumah dengan janji harus tanda tangan. Media asing telah menyoroiti hal tersebut. Namun, pemimpin di sini tidak berani mengkritik dan mengatakan itu salah

karena masih mengharapkan dipilih kembali pada pemilihan tahun 2009. Mereka masih membutuhkan dana dari Abu Rizal Bakrie. Orientasinya sangat kekuasaan. DPR juga demikian.

Menurut Romo, bagaimana strategi advokasi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia sehingga persoalan ini dapat segera diselesaikan?

Menurut saya, unsur independensi orang-orang muda, calon-calon pemimpin muda harus semakin kuat. Mereka yang bekerja misalnya, di perusahaan Bakrie, Liem Sio Liong, Gunawan Yusuf, apapun terserah, tetapi tetap harus mempunyai kebebasan hati untuk membuat project kroyokan. Lima puluh persen orang-orang muda mestinya bisa membantu pemecahan Lapindo atau membantu kasus sesuatu, tidak harus semua menjadi orang lapangan atau orang LSM. Masing-masing anak muda dapat menyumbangkan tenaganya sesuai keahlian yang dimiliki. Mungkin ada yang jago Information technology, mempunyai kemampuan untuk melakukan lobby ke lembaga donor, dan lain sebagainya. Anak-anak muda mestinya bisa menyumbangkan sesuatu. Namun menurut saya, kebebasan hati anak-anak muda tersebut tidak benar-benar penuh. Sebaliknya, gampang terikat oleh lembaga donor yang mendanainya, tergantung pesanan.

Menurut saya, ekspresi yang paling konyol karena sendirian dan mati adalah Munir. Kalau kita biarkan seseorang berjuang sendirian, maka jadinya seperti Munir. Pada tahun 2003, saya pernah membawa orang-orang ke DPR, dan waktu itu ada Sutiyoso. Dalam setiap penggusuarn bukankah menjadi biasa untuk menggunakan pejabat negara guna cuci tangan, bersih diri, yang pada akhirnya justru meneguhkan pemerintahannya. Itu juga yang terjadi ketika kita mengundang Wiranto

atau Prabowo. Akhirnya, malah mereka yang justru menjadi pahlawan. Kita sudah sangat hafal dengan ritus upacara semacam itu. Pada waktu Sutiyoso membesarkan namanya, dan berusaha mencuci tangan dengan membawa 50 aparatnya ke Komisi II maka saya secara diam-diam, kebetulan ada Pawang (Paguyuban Warga Anti Penggusuran) yang mengenal beberapa anggota DPR sehingga mereka juga diundang. Padahal, Pawang selain warga miskin urban di komunitas-komunitas juga terdapat profesor-profesor. Kebetulan, saya mengundang para profesor perguruan tinggi tersebut dalam suatu seminar seperti Prof. Paskah Suseno, Prof Soecipto Raharjo, dan lain-lain. Mereka berbicara mengenai penggusuran dan mencari alternatif. Saya undang dalam pertemuan itu, termasuk juga warga. DPR dan Sutiyoso kaget. Pada waktu itu, ia marah sekali karena tidak tahu kalau yang duduk di atas adalah orang-orang tersebut. Orang-orang selama ini menjadi arsitek dan concern terhadap persoalan tersebut.

Lantas, pada kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa pada tahun '89 pernah ada penjarahan massal dan sekarang juga barusan ada penjarahan tanah di Jakarta. Orang-orang yang digusur disebut sebagai penjarah. Pada waktu itu, ada dosen hukum, Widodo namanya, yang langsung berdiri. Kemudian, ia memberikan pelajaran tentang hukum, perda, dan mengatakan bahwa perda tersebut melanggar UUD '45. Sebagai dosen, ia mengeluarkan semua ilmunya. Nur Syahbani juga marah pada waktu itu, tetapi sayangnya wartawan tidak ada yang berani memuat.

Saya juga membawa data-data penggusuran warga sekitar 800 KK di Cengkareng Timur. Pada waktu itu, ada yang meninggal satu dan ada yang diperkosa satu. Nah, kondisi semacam itu selalu dibilang ekses, oknum. Padahal, bukan itu masalahnya, tapi substansinya yang penting.

Tiga hari kemudian, saya mendengar Sutiyoso marah karena pertemuan itu, dan mengirim seorang katolik dari DPRD ke saya. Utusan tersebut bilang, "Romo kami diutus membantu Romo. Silahkan Romo membuat proposal, dan kami akan membantu". Dia berbicara seperti itu, dan ia tahu bahwa saya tidak bisa menerima menerima uang tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan bukan untuk saya, tetapi untuk warga di Ciliwung. Waktu itu, lantas saya menjawab, "Oh, terima kasih kalau mau dibangun Ciliwung ini". Saya sudah tahu bahwa ini sogokan, sekitar 900 juta sehingga saya bilang ke dia, "Saya tidak mau buat". Dia jawab lagi, "Oh, kalau tidak mau maka sudah kami buat". Dia sudah menyiapkan dua setengah halaman, dan saya tinggal tanda tangan. Begitu gampang. Lalu saya bilang, "Kalau saya mau hidup enak Pak, saya tidak akan tinggal di sini, bapak nggak kenal dengan saya". Beginilah caranya bagaimana mereka menyuap agar kita diam. Seandainya saya mengambil maka sebenarnya tidak akan ada orang yang tahu, tetapi begitu nanti saya teriak-teriak maka mereka tinggal mengatakan bahwa saya telah menerima sejumlah uang. Matilah saya. Menurut saya, bahasa kekuasaan sistem ekonomi itu sungguh luar biasa. Berapa orang yang sudah kena seperti itu. Begitu sulitnya. Dalam kondisi kepepet, orang akan hilang akal. Moral begitu susah.

Menurut saya, orang muda mestinya bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut jika mereka berkumpul untuk membahasnya. Bagaimana sikap moral yang harus kita buat dan bahkan sikap praktis sebagai sikap manusia yang melihat lingkungan.

Pertanyaan terakhir Romo, dari pengalaman Romo bergelut dengan orang-orang miskin, adakah solusi yang mungkin bisa ditawarkan?

Terus terang, kita bingung harus mulai dari mana menghadapi situasi ko-kar kacir semacam ini. Oleh karena itu, mungkin lebih baik jika kita mulai dari yang ada, dari kecil terlebih dahulu. Di sini, di Bukit Duri ini, kami sedang punya program pengolahan sampah. Kita ini sering dituduh sebagai penyebab banjir karena membuang sampah ke sungai. Sekarang, warga tidak membuang sampah di sungai, tetapi jusru mengambil sampah dari sungai. Selanjutnya, kita mengolahnya menjadi kompos. Warga berkeliling untuk mengambil sampah dari sungai. Hasilnya yang berupa kompos bisa dijual untuk meningkatkan ekonomi warga.

Selain itu, ada juga program air bersih. Di pinggir kali, sebetulnya, tidaklah mungkin air dicek di laboratoriu untuk diminum. Oleh karena itu, kita membangun bukan hanya MCK, tetapi juga tabung-tabung. Kita membangun dua di setiap RT, dan bisa untuk 12 KK sebagai alat penyaring air bersih.

Lalu, ada program seperti posyandu. Namun, bukan untuk mengulang masa lampau, tetapi untuk melakukan perbaikan gizi. Tampaknya seperti karikatif, tetapi kami menganggap hal tersebut sebagai pemberdayaan karena yang penting bukan bagaimana program ini dilaksanakan oleh NGO. Namun yang lebih penting, program tersebut mampu melibatkan warga sebanyak mungkin. Kita melakukannya secara partisipatif karena penelitian kami menemukan bahwa akses untuk berpartisipasi warga masyarakat di Jakarta hampir tidak ada sama sekali.

Kita juga membuat klinik untuk warga, namanya Rumah Sehat Ciliwung Merdeka. Klinik ini didirikan untuk pengelolaan dan pemberdayaan kesehatan swadaya warga. Lalu, ada program pendidikan lingkungan hidup, terutama untuk anak-anak dan remaja.

Terus sekolah-sekolah untuk warga

miskin bagaimana Romo?

Sekolah-sekolah untuk mereka sudah kami laksanakan lama. Kami menyelenggarakannya di rumah terbuka setiap hari mulai dari jam empat sampai jam sembilan malam, bergantian kelompok-kelompok pendidikan. Hanya saja, saya tidak mengandalkan para volunteer guru dan mahasiswa dari luar, tetapi saya mengandalkan yang SMP untuk ngajari yang SD, dan yang SMA mengajari SMP. Koordinator kegiatan tersebut adalah mahasiswa yang dulu belajar di situ sejak kelas dua SD. Sekarang, ia sudah mulai kuliah dan mendapatkan beasiswa Biologi di UNAS.

Jadi, jam 4 dan jam 6 sore mereka belajar dan jika magrib mereka pulang untuk mandi dan sholat, makan lalu balik lagi sampai jam 9 malam. Setiap hari mereka melakukannya seperti itu. Di tempat tersebut, ada bermacam-macam pendidikannya. Ada juga perpustakaan dan mereka mengelola sendiri. Saya mengutamakan mereka yang menjadi aktor. Sementara yang dari luar, hanya memfasilitasi saja. Cara semacam itu sudah terbukti bisa dikerjakan dengan baik. Bahkan, ketika banjir bulan Februari 2007, air setinggi empat meter dari tanah, dan kalau dari air stinggi tujuh meter. Namun, mereka bisa membantu 96 titik di Jabodetabek. Saya mempunyai perahu sehingga bukan hanya menjadi tim SAR, tetapi sekaligus melakukan distribusi bantuan. Sementara rumah mereka tenggelam.

Mereka adalah pekerja keras. Kalau kita memberi waktu kerja kepada orang yang disebut miskin ini, yang mereka berjuang itu, maka kalau dibandingkan dengan kita maka kita akan kalah. Jika tidak percaya, maka lihatlah pemulung di Bandar Gebang. Mereka bekerja dari pagi sampai pagi. Padahal, kita sukanya mengeluh.



HAKI: ALAT IMPERIALISME NEGARA-NEGARA MAJU?

Di tengah keterpurukan ekonomi karena kemiskinan, ternyata masih ada cerita gembira yang cukup membanggakan. Ini dimulai dari upaya Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk membuka konspirasi jahat negara maju dalam kasus Flu Burung. Buku Fadilah Supari yang berjudul *Saatnya Berubah! Tangan Tuhan Di Balik Virus Flu Burung* (versi Bahasa Inggrisnya diberi judul *It's Time for the World to Change*) konon katanya menuai protes dari World Health Organization (WHO). Bahkan, menurut banyak berita dan artikel yang beredar di dunia maya, Amerika Serikat (AS) mendesak SBY agar buku tersebut ditarik dari peredaran, dan sebagai imbalannya Indonesia akan diberi bantuan suku cadang militer yang selama ini diembargo.

Keberhasilan Menteri Kesehatan dalam mendobrak kekuatan konspiratif dan berbahaya AS dan badan dunia, WTO, menjadi catatan yang menarik. Pertama, keberhasilan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi perjuangan Bangsa Indonesia di tengah keterpurukan ekonomi dan politik. Dalam harian

Kompas (8 Maret 2008), Kartono Mo-hamad dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa kemenangan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam memperjuangkan Indonesia dalam penguasaan hak atas virus H5N1 akan menimbulkan rasa percaya diri bangsa Asia bahwa mereka dapat mengalahkan negara adidaya meskipun hanya berkenaan dengan virus. Kedua, perjuangan Menteri Kesehatan tersebut dapat dimaknai sebagai keberhasilan negara Dunia Ketiga dalam membongkar praktik yang timpang dalam hubungan ekonomi politik dengan negara-negara industri maju, terutama dalam HAKI.

Praktik yang selama ini terjadi, dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun, negara-negara maju mendapatkan virus gratis dari negara-negara Dunia Ketiga yang terserang wabah penyakit. Selanjutnya, mereka membuat vaksin untuk dijual dengan harga mahal ke seluruh dunia tanpa ijin dan kompensasi sedikitpun terhadap negara asal virus. Dalam konteks ini, mereka justru menarik keuntungan dari

negara-negara yang terkena wabah. Sungguh sebuah praktik yang timpang. Hubungan semacam ini jelas merugikan negara Dunia Ketiga. Negara maju akan tetap kaya dan semakin kaya, sedangkan negara miskin akan semakin miskin. Kondisi inilah yang berusaha didobrak oleh Menteri Kesehatan dalam kasus virus Flu Burung.

Untuk kali pertama, virus Flu Burung (Avian Influenza) menelan korban jiwa di Indonesia pada tahun 2005. Sejak itu, korban terus berjatuhan. Menyikapi penyebaran virus tersebut, WHO memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengirimkan spesimen melalui mekanisme Global Influenza Surveillance Network (GISN) ke WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hong Kong. Sebagaimana ditulis *Republika* online, selama lima puluh tahun, GISN ini telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirimkan spesimen virus tanpa bisa ditolak. Virus tersebut lantas menjadi hak milik mereka. Ilmuwan-ilmuwan lain bahkan tidak mampu mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan oleh WHO CC di Hong-

kong. Oleh karena itulah, Menteri Kesehatan menuntut WHO agar membuka data DNA H5N1, yang ternyata justru disimpan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico, AS, sebuah laboratorium di bawah kementerian energi AS, agar dibuka untuk publik. Selain itu, Menteri Kesehatan juga menuntut agar 58 spesimen yang pernah dikirim ke

Indonesia agar dikembalikan. Tidak hanya itu, Siti Fadilah Supari juga tidak bersedia mengirimkan spesimen virus H5N1 jika mekanisme G I S N yang imperialistik tersebut masih dipertahankan.

Seluruh perjuangan tersebut ternyata berhasil. Seperti ditulis Republikan-

line, tanggal 8 Agustus 2006 WHO mengirim data sequencing virus H5N1, dan pada International Government Meeting di J e n e w a

November 2007, sharing virus disetujui dan mekanisme GISN dihapuskan. Tentu saja, keberhasilan tersebut perlu mendapatkan apresiasi.

Selama ini, negara-negara industri maju telah mengambil keuntungan begitu banyak dari negara Dunia Ketiga, terutama melalui HAKI. Negara-negara Dunia Ketiga diharuskan membayar terlalu mahal atas penemuan-penemuan teknologi dari negara-negara maju meskipun, dalam kasus virus Flu Burung, misalnya, mereka mendapatkannya secara gratis dari negara Dunia Ketiga. Dalam kaitan ini, menarik ungkapan Iskandar Alisjahbana dalam suatu kesempatan wawancara dengan Warta Ekonomi, edisi 30/XI/13 Desember 1999, bahwa orang-orang di negara maju telah mencuri dan merampok copyright manusia di dunia. Lebih lanjut ia mengatakan, "Mereka membuat aturan perlindungan copyright, tetapi kita harus membayar lisensinya". Padahal, pembayaran tersebut sangat membebankan negara-negara berkembang.

Menurut Alisjahbana, pembajakan yang terjadi dewasa ini harus dilihat sebagai fenomena yang wajar. Itu terjadi karena adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sama dengan melarang pencurian. Ia mengemukakan bahwa gap antara si kaya dengan si miskin sebenarnya telah melawan kapitalisme. Sekarang ini, kapitalisme tengah mengalami krisis. Kapitalisme hanya bisa hidup jika terdapat demokrasi. Oleh karena itu, Alisjahbana dengan tegas menyatakan bahwa secara filosofis harus dijaga supaya tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok di dunia ini. Kesenjangan akan menggambarkan kegagalan kapitalisme. Sayangnya, perjanjian-perjanjian TRIPs yang selama ini berlangsung semakin mengukuhkan ketimpangan tersebut. Oleh karenanya, barangkali, masih dibutuhkan orang-orang yang mau berjuang seperti Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk mendobrak ketimpangan dan ketidakadilan tersebut.



Pengantar Redaksi:

Tahun 2001, sebuah studi kecil terkait gerakan sosial demokrasi di Indonesia, pernah dilakukan oleh tim peneliti dan asosiasi dari IDe (Indonesian Institute for Democracy Education) dengan dukungan dana dari FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) Jakarta. Para penelitiannya adalah Suchyar Effendi, Indah Nuritasari, Fadjoel Rachman dan Ivan Hadar.

Ada beberapa pertimbangan penting yang dijadikan alasan bagi pemilihan studi ini. Pertama, usai lengsernya Soeharto dan tumbanganya Orde Baru, bermunculan berbagai organisasi maupun perorangan yang secara terus terang menyatakan sebagai penganut ideologi sosial demokrasi.

Meskipun demikian, dan ini merupakan alasan

kedua studi adalah, kenyataan bahwa sebagian besar dari organisasi maupun pribadi tersebut, bergerak nyaris tanpa menjalin kontak satu dengan lainnya. Boleh jadi, hal tersebut disebabkan oleh jarang atau tidak pernah ada upaya untuk mendiskusikan pandangan masing-masing tentang apa sosdem itu sendiri dan platform apa yang bisa disepakati untuk mempersatukan gerakan dengan ideologi yang sama ini.

Serial tulisan ini, sebagian besar dan sedikit revisi berasal dari laporan studi tersebut. Dalam edisi kali ini, tulisan merupakan cuplikan pemikiran terkait proses pencarian “jalan ketiga” (antara kapitalisme dan sosialisme yang seringkali diidentikkan dengan sosdem) di Indonesia. Selamat membaca!

PENCARIAN “JALAN KETIGA” DI INDONESIA

Ivan A. Hadar

Berbagai program partai politik peserta pemilu 1999 dan 2004, belum menyentuh pertanyaan mendasar tentang tatanan sosial politik apa yang diinginkan bagi Indonesia masa depan. Mungkin, kebanyakan partai baru masih saja disibukkan oleh proses konsolidasi dan belum sempat berpikir kesitu. Sementara, partai lama yang diizinkan hidup di era Soeharto, masih membawa bias Orde Baru yang ‘anti-ideologi’.

Diskusi pencarian tatanan sosial-

politik ideal memang pernah berkembang, terutama pada era demokrasi parlementer, namun kemudian terhenti – terutama di masa Orde Baru. Tulisan ini, dalam konteks studi tentang gerakan sosial demokrasi di Indonesia, ingin merangsang kembali diskusi tentang hal tersebut agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama: membangun tanpa visi dan strategi yang terjadi selama tiga dekade terakhir.

Dalam membicarakan tatanan sosial-politik yang ideal, sering hadir kerinduan untuk menemukan “Jalan Ketiga” antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam catatan sejarah dunia, kita misalnya mengenal istilah-istilah sosialisme-demokratis atau sosialisme-pasar. Meski bukan “Jalan Ketiga”, di negeri ini, ada pula sosialisme dengan embel-embel religius. Lalu, mungkin karena takut digebuk, di masa pemerintahan Orde Baru, ada pula yang menyebut dirinya sosialis pancasilais.

Sosialisme pasar sebagai konsep, pernah diujicobakan di negara-negara Blok Timur era Perang Dingin, seperti di Yugoslavia dan Hongaria. Meski apa yang dihasilkannya, jauh dari memuaskan dan tetap menyisakan kerinduan akan "Jalan Ketiga" yang lain.

Pertanyaannya, apa mungkin ada "Jalan Ketiga" dan, bukan nantinya, hanya sekedar rakitan dua isme yang bertolak-belakang, sehingga dampaknya seakan mencampur minyak dan air? Sesuatu yang terkesa asalan, seperti yang pernah dituduhkan pada konsep "Ekonomi Pancasila". Pertanyaan tentang adakah "Jalan Ketiga" yang tidak sekedar rakitan, membutuhkan hasil pemikiran teoretis mendalam. Belum lagi uji-cobanya secara empiris dalam sebuah proses dialektis. Yang mungkin lebih mudah, adalah mengambil salah satu isme, kemudian direformasi agar sesuai dengan lahan tempatnya diterapkan.

Pertanyaan yang lebih konkret ialah, perlukah "Jalan Ketiga"? Jawaban mudahnya, perlu, yaitu agar sisi positif sosialisme sebagai perangkat analisis social yang tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan dengan tatanan politis demokratis yang menjadi persyaratan bagi berfungsinya sebuah ekonomi pasar.

Di negara-negara kapitalis modern yang maju, telah berlaku demokrasi politik. Tetapi, tidak demikian halnya dengan demokrasi ekonomi. Pencapaian demokrasi politik, secara historis tentu saja sangat penting, tetapi itu kurang lengkap. Ia sekedar merupakan demokrasi perwakilan yang pasif, di mana sebagian besar rakyat memilih orang lain untuk bertindak bagi mereka. Kadar partisipasi aktif sangatlah terbatas, bahkan di banyak negara, sentralisasi politik justru meningkat. Juga kekuatan ekonomi tetap terkonsentrasi dan demokrasi ekonomi masih menanti masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, 'eksperimen' sosia-

lisme negara-negara Blok Timur telah gagal. Tidak adanya demokrasi politik mengakibatkan krisis politik. Yang paling dramatis terjadi di Polandia tahun 1980, kemudian berujung pada tumbangnya Uni Soviet dan Blok Timur secara keseluruhan. Tidak adanya demokrasi politik-ekonomi di negara-negara komunis waktu itu, dikemas dalam konteks full employment yang dipaksakan dan perencanaan sentralistis, mengakibatkan stagnasi dan inefisiensi ekonomi serta lemahnya disiplin (tenaga) kerja.

Ketidakpuasan atas dua isme tersebut, memicu pencarian alternatif. Secara teoretis, hal itu telah memunculkan berbagai aliran sosialisme. Sosialisme-demokratis adalah salah satu bentuk sosialisme yang menumukan lahan berkembang di beberapa negara industri maju, seperti Jerman dan Swedia. Selain itu, kita pernah mendengar berbagai genre sosialisme, seperti sosialisme-non-Marxis, sosialisme-science-movement, sosialisme-utopis dan sebagainya.

Dalam catatan sejarah Indonesia, ada empat partai politik di Indonesia yang pernah menyandang nama "sosialis" sebagai nama dan ideology resmi partainya. Partai-partai itu adalah Partai Sosialis yang diketuai Amir Syarifuddin, Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan dan diketuai oleh Sutan Syahrir. Kemudian ada Partai Sosialis yang merupakan fusi dari kedua partai tersebut. Partai inilah yang sejak November 1945 menguasai kabinet Republik Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1947, ketika terjadi keretakan antara kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Syarifuddin. Sjahrir lalu membentuk partai baru yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI) awal tahun 1948 dan bertahan sampai tahun 1960, ketika dibubarkan Soekarno.

Dalam sejarah pergerakan ke-

merdekaan, kita mengenal sederetan tokoh, termasuk Soekarno dan Hatta, yang berkeyakinan membangun masyarakat dan negeri ini atas prinsip-prinsip sosialis. Namun, di antara tokoh-tokoh tersebut, barangkali bisa dikemukakan bahwa hanya Sjahrir yang paling tegas dan nyata dalam keyakinan dan perjuangannya. Ia bukan saja telah mendirikan partai politik (PSI) untuk mewujudkan keyakinan itu, tetapi jauh sebelum itu ia telah memikirkan secara mendalam tentang paham sosialisme apa yang paling cocok buat Indonesia.

Sjahrir dengan tegas membedakan paham sosialisme yang hendak diperjuangkannya di Indonesia dengan sosialisme yang terdapat di Eropa Barat maupun sosialisme yang ditawarkan pihak komunis. Pergumulannya atas paham-paham sosialisme di Eropa Barat dan kekhawatirannya akan komunisme yang totaliter, telah membawanya pada satu pemikirannya sendiri tentang sosialisme yang sesuai bagi Indonesia, yaitu sosialisme-kerakyatan. Bagi Sjahrir, perkataan kerakyatan adalah suatu penghayatan dan penegasan bahwa sosialisme seperti dipahaminya, selamanya menjunjung tinggi dasar persamaan derajat manusia.

Dalam catatan sejarah diketahui bahwa cita-cita sosialisme-kerakyatan dari Sjahrir ini tidak berhasil diwujudkan sebagaimana diharapkan. Tetapi ketidakberhasilan ini barangkali bukan semata-mata karena Sjahrir tergeser dari panggung politik atau karena PSI dibubarkan. Sosialisme, apa pun namanya, hanyalah suatu paham, suatu cita-cita yang masih berada di tingkat konsepsi. Untuk mewujudkan cita-cita itu, ia harus dibuat operasional dan harus didukung oleh seperangkat institusi dan mekanisme-mekanisme tertentu. Ini memang bukan hal yang mudah. Tetapi tanpa itu, ia hanya akan berhenti pada imbauan-imbauan moral atau etis, namun tidak membawa perubahan apa-apa.



UNISOSDEM

Anthony Giddens (1979) mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah unsur konstitutif dari berbagai praktik sosial. Manusia adalah pelintas ruang dan waktu. Pertama dengan Teknologi, ruang dimampatkan dan waktu diperpendek. kemudian dengan kedigdayaan nyaris-tak-tersentuh, hak milik pribadi dilepaskan dari tanggung jawab sosial. Dan kapital pun melintasi ruang dan waktu dengan volume dan kecepatan yang tak terbayangkan. Di satu sisi ia menawarkan segala kenikmatan, kenyamanan dan kemudahan yang bersifat ontologis, yang tidak dinikmati kakek-nenek moyang kita -handphone, internet, transportasi, komunikasi, listrik, dll. Tetapi di sisi lain, berbagai ancaman hidup yang sebelumnya tak pernah terbayangkan ada, juga semakin jelas mengintai dan sudah menerkam -meledaknya reaktor nuklir, file yang hilang di harddisk, rusaknya lingkungan hidup, pemanasan global, HIV/AIDS, dll. Sebuah juggernaut-truk raksasa yang berlari sangat kencang tanpa bisa dihentikan- dengan kita semua ada di dalamnya, menikmati segala kenyamanan itu, tetapi nyaris tak punya kuasa untuk menghentikan lajunya yang mungkin saja akan menabrak sesuatu dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Itulah gambaran duina dimana kita hidup saat ini. Dunia yang berlari tunggang langgang. A Runaway World, demikian pemikiran Giddens (1992) kembali mengatakannya.

Setelah bergerak beberapa tahun sebelumnya dengan kelompok diskusi kaum muda, pada tanggal 17 Agustus 1998 Uni Sosial Demokrat (UNISOSDEM) Jakarta berdiri. Dirintis dan ditopang oleh semangat muda dari para pendirinya yang mendapat dukungan penuh seorang aktivis kawakan, Bambang Warih Koesoema. Uni Sosial Demokrat adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat peduli politik yang berkedudukan di Indonesia. UNISOSDEM bertindak sebagai mitra masyarakat demokrasi bagi semua kelompok, baik yang berorientasi politik maupun non-politik yang peduli dan memperjuangkan terwujudnya demokrasi di segala bidang kehidupan. Unisosdem bersifat iterdependen, non-partisan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan politik kelompok tertentu. Cita-cita UNISOSDEM Jakarta dirumuskan dengan jelas: tatanan hidup bersama di kepulauan Nusantara yang lebih berkeadilan. Bukan hanya pada manusia tetapi juga pada alam. "Manusia tidak hanya harus berbagi hidup dengan 5 milyar penduduk bumi



Nama Organisasi: Uni Sosial Demokrat
Berdiri sejak: 17 Agustus 1998

Ketua Presidium : Bambang Warih Koesoema

Presidium : DR. Bambang Kiranadi, Charles Mangun Prawiro.

Presidium Yogyakarta : Edy Suharmanto
Sekretaris Jendral : Yanuar Nugroho (sedang menjalankan program paska doktoral di Inggris)

Wakil Sekjen : Any Sulistyowati
Bendahara : Srisanti Pujilestari
Koordinator : D.J. Patrick Pello
Volunteer : Andi, Bagus Nugroho, Anggirasti

Alamat: Jl. Berdikari Kav. 2,
Palmerah – Kebayoran Lama. 11540
Ph/fax: +62-21-534 9158
E-mail: office@unisosdem.or
Website: www.unisosdem.org

lainnya, tetapi juga dengan 50 juta spesies yang bersama-sama tinggal di bumi ini", itu semangatnya.

Berangkat dari kesadaran bahwa pada hakekatnya semua umat di muka bumi ini satu adanya, maka UNISOSDEM memperjuangkan terciptanya Peradaban Baru yang mengarah kepada upaya penegakkan Hak Asasi Manusia, keadilan, dan kesetaraan dalam persaudaraan. Peradaban Baru tersebut ditandai dengan peningkatan kualitas

kehidupan, tatanan masyarakat yang menghargai keragaman pilihan politik, ekonomi dan sosial, serta komitmen yang serius terhadap pelestarian lingkungan.

Namun, tampaknya tata-hidup bersama itu memang paradoksal. Di satu sisi, ia jauh bagaikan sebuah cita-cita. Namun, ia toh juga sebenarnya sudah mengada. Justru di sini persoalannya: tata-hidup bersama macam apa yang kini ada dan dihidupi?

Nampaknya ada banyak keruwetan yang dijumpai ketika berupaya mengurai soal- hidup bersama ini. Apakah perkaranya kebijakan politik? Pembangunan Ekonomi? Persoalan Budaya-Mental? Jawaban-jawaban yang diberikan acapkali lebih banyak membawa kebingungan baru daripada menjelaskan. Sementara, di satu sisi data-data ketidakadilan semakin bertumpuk, daftar korban semakin bertambah panjang, ledak tangis yang terpinggirkan makin tak berkesudahan. Di sisi lain, berbagai pelatihan analisis sosial, lokakarya, training, seminar, bahkan membangun jaringan antar NGO, dlsb yang juga banyak diupayakan seolah tak kunjung memberikan hasil yang konkrit.

Apa yang salah? Itulah yang mulai hendak diurai dalam dinamika di UNISOSDEM Jakarta.

Semenjak berdirinya, berbagai tulisan telah dirilis, upaya lobby dengan pengambil keputusan dilakukan, pelatihan dilaksanakan dan jaringan dengan berbagai NGO pun dilibati. Bahkan UNISOSDEM Jakarta mencoba menjejak eksistensi di dunia cyber dengan melaunch website www.unisosdem.org pada tahun 2000 sebagai penyeranta arsip dan informasi bagi sejawat aktivis. Tapi nampaknya hingga kini belum semuanya terasa optimal. Bagai tercebur dalam kubangan berisi jutaan data dan informasi tentang berbagai hal, tangannya menggapai-gapai, megap-megap, minta untuk dimaknai.

Setelah sejenak berefleksi, dibantu

dengan sepenuh hati oleh B. Herry Priyono, Ph.D., UNISOSDEM Jakarta mulai bisa memahami, bahwa apa yang nampaknya luput dari wacana – dan karenanya juga berakibat pada luputnya praksis-- adalah perkara adanya kekuasaan dalam tata hidup bersama ini. Bukan adanya kekuasaan itu yang menjadi soal, melainkan praktik kekuasaan itu yang mempunyai implikasi pada hidup bersama kita.

Kalau dulu (bahkan sampai sekarang) kita selalu merujuk pada negara sebagai pemegang kekuasaan, hal itu bukanlah salah. Namun, tidak lengkap. Negara bukanlah satu-satunya pemegang kekuasaan dalam hidup bersama kita saat ini. Ada yang lain, yaitu kekuasaan kelompok-kelompok dalam masyarakat (Komunitas yang tak tersentuh oleh kekuasaan negara. Dan jangan lupa, kekuasaan modal dan bisnis. Kekuasaan yang terakhir inilah yang justru meruap-menyeruak secara luar biasa. Komunitas dilibas dan digilas. Bahkan negara juga dicengkeram dan diambil alih oleh besarnya kekuasaan modal. Jika dulu Thomas Hobbes menyebut negara sebagai leviathan karena demikian kuatnya bagai monster, B. Herry-Priyono menegaskan bahwa kekuasaan modal saat ini adalah Leviathan Baru (Kompas, 3 Januari 2002; The Jakarta Post, 25 January 2002).

Maka UNISOSDEM Jakarta mencoba tanggap dengan wacana ini. Sebuah proses yang tidak mudah memang. Apalagi dengan konstruksi pikir yang sudah sedemikian dibentuk oleh para proponent dari Neo-Liberal yang selalu menhadapkan "politik vs ekonomi", "publik vs privat", bahkan lebih umum lagi "pro vs anti". Itulah mengapa misalnya persoalan menghadapi globalisasi, bagi UNISOSDEM Jakarta, bukanlah perkara menolak atau menerimanya. Melainkan, bagaimana menjadi peka dan tanggap akan dinamika praktik kekuasaan dalam globalisasi itu sendiri. Dan kami akui, ini bukanlah soal sederhana.

Menyederhanakannya demi prak-

sis lapangan, UNISOSDEM Jakarta menghembuskan dan menggencarkan apa yang disebut dengan "Paradigma Baru Demokratisasi & Pemberdayaan Masyarakat Sipil". Apanya yang baru? Satu, bahwa demokrasi itu bukanlah hanya perkara membuat akuntabelnya kekuasaan negara, tetapi juga berbagai kekuasaan yang lain –saat ini: kekuasaan modal dan bisnis. Dua, bahwa masyarakat sipil bukanlah sebuah tesis anti-negara, melainkan tesis anti-praktik kekuasaan yang tidak akuntabel: termasuk kekuasaan negara, komunitas dan bisnis.

Untuk mewujudkan visi tersebut UNISOSDEM mendorong secara kritis penyelenggaraan negara dan kebijakan yang menyertainya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, keadilan, kesetaraan dalam persaudaraan dan komitmen pada lingkungan hidup. Secara lebih konkrit, UNISOSDEM terlibat dalam upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar politik, mewujudkan komunitas sebagai tempat lahirnya gagasan-gagasan baru sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi, mendorong pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan membangkitkan rasa, karsa dan cipta masyarakat akan visi peradaban baru yang ingin dicapai melalui hubungan saling ketergantungan.

Kegiatan utama UNISOSDEM adalah diseminasi informasi dan pelatihan kesadaran berpolitik bagi kaum muda, yang sudah diselenggarakan sejak berdiri. Diseminasi informasi dilakukan melalui press-release, terbitan (komik, buku, terbitan populer) dan secara kontinu melalui website dihit lebih dari 1000 kali dalam sehari. Pelatihan kesadaran berpolitik bagi kaum muda dilakukan secara berkala dan diselenggarakan tidak hanya di Jakarta, melainkan di berbagai daerah dimana UNISOSDEM bermitra dengan banyak lembaga/institusi/wadah lokal lainnya. Dalam kurun 2001-2004, misalnya UNISOSDEM menyelenggarakan

lebih dari 7 kali pelatihan selama setahun di berbagai daerah. Selain kedua aktivitas tersebut, UNISOSDEM juga memberikan masukan kepada Negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) mengenai berbagai persoalan penting yang dirasa perlu untuk mendapatkan perhatian. Selengkapnya dapat dilihat di www.unisosdem.org/tentang.php.

Unisosdem bukan organisasi terpusat. Ada beberapa daerah dimana beberapa individu mendeklarasikan Unisosdem. Dalam hal ini, memang tidak serta merta selalu ada kaitan keorganisasian. Siapa saja yang meyakini nilai-nilai yang diperjuangkan UNISOSDEM bisa menggunakan nama yang sama. Yang mempersatukan UNISOSDEM ini adalah kesamaan nilai, visi dan misi. Sekretariat di Jakarta Hanya bertidak sebagai komunikator. Selain itu, tentu saja UNISOSDEM menjalin kemitraan dengan berbagai kelompok pro-demokrasi lainnya di berbagai daerah. Mitra-mitra UNISOSDEM tersebar di pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, Nusatenggara, Papua dan Timor Leste.

Selama sepuluh tahun terakhir ini pengalaman dalam jatuh-bangun bergelimang dalam problema organisasional adalah modal untuk bergerak lebih cermat, cerdas dan lincah. Dalam segala keterbatasannya, UNISOSDEM Jakarta harus berbenah diri. bukan hanya secara teknis administratif melainkan dalam menentukan arah.

Dan meski berat dan tidak mudah, arah itu sudah dicanangkan. Secara mendasar arah itu adalah mengenali berbagai pusat dan kausalitas kekuasaan yang ada dalam tata-hidup bersama masyarakat kita. Dan dalam kontingensi sejarah saat ini, pilihan kami adalah membidik Leviathan Baru itu.

Apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan UNISOSDEM Jakarta dalam waktu-waktu mendatang?

- a. Sejak Tawangmangu, Jawa tengah 25-27 November 2002 hingga Sanur Bali 12-14 Juli 2002, UNISOSDEM Jakarta (dan beberapa kali dibantu

oleh UNISOSDEM Solo) sudah mengorganisir sejumlah semi-loka di berbagai daerah yang diikuti oleh sejawat aktivis dari ujung barat Pulau Jawa hingga propinsi Nusa Tenggara Timur. Seluruhnya ada sekitar 70 (tujuh puluh) kelompok mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan merintis jaringan kerjasama. Semi-loka ini berfokus pada upaya menyebarkan gagasan "baru" di atas dan mencari kemungkinan kerjasama membidik Leviathan Baru itu. Sebuah Yayasan Jerman, FES (Friedrich-Ebert Stiftung) ikut mendanai sebagian kegiatan semi-loka ini..

- b. memberikan pengaruh kepada para pengambil keputusan di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif mengenai berbagai kebijakan di bidang sosial-ekonomi-politik. Pengaruh ini diberikan melalui lobby, siaran pers, kuliah publik dan media masa. Pada bulan Juli 2002, UNISOSDEM Jakarta memberikan pokok-pokok pikiran mengenai Format Baru Politik Indonesia di Gedung DPR/MPR RI.
- c. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dalam jaringan NGO/CSO lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan internasional yang diikuti seperti PrepCom IV di Bali Mei-Juni 2002 yang lalu, Asia-Pacific Network di Jakarta 22-24 Juli 2002, Young Progressive South East Asia di Jakarta Agustus 2005, dlsb.
- d. Meneruskan dan mengembangkan website, www.unisosdem.org untuk tiga fungsi dasar: Pertama, membangun database. Ada cukup banyak dan beragam data yang ada dalam dokumentasi UNISOSDEM Jakarta yang bisa diakses secara online di website. Namun masih ada banyak lainnya yang berupa hardcopy yang tersedia di kantor/sekretariat UNISOSDEM Jakarta. Menjadikan semuanya on-line adalah keinginan kami, namun kami harus realistis dengan konstelasi sumber daya yang ada pada kami. Kedua, membangun searchable archiving system dalam website kami, situs unisosdem.org adalah situs berbasis database-engine yang memungkinkan semua penunjung situs melakukan pencarian berbagai artikel yang dikliping oleh UNISOSDEM Jakarta dari berbagai sumber (majalah, koran, jurnal. dll). Ketiga, membangun reporting-system. UNISOSDEM Jakarta ingin menunjukkan bahwa transparansi dalam konteks 'good governance' di NGO itu mungkin dan bahkan harus dilakukan. Meskipun NGO tidak mendapatkan uangnya dari rakyat, namun NGO perlu mempertanggung jawabkan aktivitasnya bukan hanya kepada donatur, melainkan juga stake holder utamanya, yaitu rakyat.
- e. Memaintain Jaringan NGO yang sudah berpartisipasi dalam seluruh rangkaian semi-loka sampai dengan saat ini. Secara konkrit UNISOSDEM Jakarta bersama-sama dengan Yayasan SAMADI Solo memprakarsai berdirinya Business Watch Indonesia (BWI) yang berkedudukan di kota Solo, Jawa Tengah. UNISOSDEM Jakarta mendukung penuh kegiatan BWI dan mempromosikannya ke Jaringan Internasional yang dipunyai UNISOSDEM Jakarta.
- f. Tetap turut mempengaruhi kebijakan publik di bidang yudikatif, eksekutif dan legislatif melalui lobby dan diseminasi pikiran dan gagasan. Publikasi populer juga dilakukan melalui media massa umum maupun terbatas.
- g. berpartisipasi dalam kegiatan bersama NGO/CSO lain di dalam dan luar negeri.
- h. mengupdate arsip-database dan informasi yang ada dalam website yang telah diupgrade oleh Tim ELS dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2002.

Peluncuran Jurnal dan Diskusi, Pemimpin Tanpa Visi



Pada tanggal2007, Jurnal Demokrasi Sosial akhirnya diluncurkan di.....Menandai peluncuran tersebut, diselenggarakan pula diskusi dengan tema, sesuai yang diangkat di jurnal, Pemimpin Tanpa Visi. Hadir sebagai pembicara adalah Faisal Basri (Ketua Umum Pergerakan Indonesia), Agung Putri (direktur eksekutif Elsam), dan Bima Arya (Direktur Eksekutif Lead Institut), Univertas Paramadina. Acara tersebut didukung oleh kaum muda yang menamakan dirinya sebagai Jaringan Sosial Demokrasi. Jaringan ini terbentuk melalui seminar dan workshop, sekitar tanggal 3-5 Desember 2007, dan melibatkan aktivitas sosial demokrasi di seluruh Indonesia. Berbagai gagasan menarik diangkat dalam

diskusi bertajuk Pemimpin Tanpa Visi tersebut, baik dari pembicara diskusi maupun dari peserta diskusi.

Ari Sujito, yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan diskusi launching jurnal edisi perdana tersebut, mengatakan bahwa berdasarkan audit demokrasi atau dari perkembangan yang sudah tampak sejauh ini menunjukkan bahwa kepemimpinan baru yang muncul dan yang kita harapkan mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa ini ternyata masih jauh dari harapan. Faktanya, pemimpin yang diharapkan bisa membawa bangsa ini ke arah perbaikan secara signifikan, secara substansial, tidak pernah terjadi. Dalam kaitan ini, pergantian pemimpin tidak mempunyai korelasi

positif terhadap perbaikan substansi ekonomi di Indonesia.

Ada beberapa penyebab mengapa terjadi kepemimpinan semacam ini. Menurut Faisal Basri, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak lagi linear, tetapi nonlinear. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan problem-problem tersebut tidak lagi dapat dengan cara linear. Sebaliknya, Indonesia yang pola atau dinamikanya terbentuk nonlinear, maka cara berfikir, pendekatan dan strategi yang digunakan juga harus nonlinear. Sisi lain dari nonlinear ini adalah kita tidak mungkin selamat kalau sekedar berfikir bahwa hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Development in-

dek yang baru diterbitkan oleh UNDP baru-baru ini, misalnya, sebagaimana dicontohkan Faisal Basri, indeks Indonesia membaik. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Vietnam, misalnya, kita kalah jauh. Dibandingkan dengan negara-negara Asian lima" Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Vietnam, Indonesia sekarang sudah yang paling terbawah. Ini terjadi karena kebijakan yang dibangun pemerintah tidak pro-poor. Sejak tahun 2002, kebijakan nasional tidak berorientasi pada orang-orang miskin. Dilihat dari intensif structure, dilihat dari pola pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, cenderung membawa kepada kesenjangan yang makin lebar karena insentif lebih banyak diberikan kepada kelompok-kelompok yang sudah di atas rata-rata penduduk. Jadi, tidak pernah terjadi perubahan paradigma dalam mendekati problem-problem kebangsaan. Oleh karena itu, menjadi masuk akal jika pergantian pemimpin tidak mempunyai korelasi positif dengan perbaikan ekonomi warga negara karena pergantian hanya melibatkan orang, tidak pada visi dan paradigmanya.

Problem lain mengapa pergantian pemimpin tidak melahirkan perbaikan ekonomi karena reformasi ternyata hanya melahirkan pemimpin-pemimpin transaksional. Problem utama yang dihadapi oleh negeri ini, yaitu kepemimpinan. Oleh karenanya, kita harus mengkaji aktor-aktor mengingat kelembagaan kita masih lemah, selain juga masih paternalistik dan feodalistik sehingga pengaruh individu pemimpin-pemimpin itu masih luar biasa. Persoalannya adalah pemimpin seperti apakah yang kita butuhkan sekarang ini sehingga mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar, dan mampu menyelesaikan persoalan dengan cara pandang dan paradigma yang berbeda. Rekomendasi yang diberikan oleh Bima Arya adalah pemimpin transformatif, yakni pemimpin-pemimpin

yang mampu menawarkan nilai-nilai baru, pemimpin-pemimpin yang mampu mengubah cara pandang baru, menggairahkan publik untuk mencapai sesuatu. Inilah jenis ideal pemimpin yang kita harapkan sekarang ini. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkannya?

Masyarakat Indonesia, pada satu sisi, masih menginginkan tipe pemimpin yang kharismatis. Hasil berbagai survei yang dilansir Bima Arya menegaskan bahwa pemimpin yang kharismatik menempati urutan pertama yang dikendaki oleh masyarakat, dan baru setelah itu pemimpin yang mempunyai skill/kemampuan atau kecakapan. Dengan demikian, bagi Indonesia, pemimpin kharismatik tersebut tentulah yang transformatif. Pemimpin kharismatik yang transaksional atau otoriter tentu sangat berbahaya, dan terbukti telah gagal.

Tentu saja, terdapat perbedaan antara pemimpin kharismatik yang transformatif dengan pemimpin yang hanya mempunyai kharisma. Pemimpin kharismatik membangun visinya berdasarkan dirinya sendiri, tetapi kalau pemimpin transformatif membangun visinya berdasarkan apa maunya konstituentnya. Jadi, dia menyerap apa yang ada, merumuskan kebutuhan publik, kemudian menawarkan agenda bersama. Pemimpin kharismatik tidaklah demikian, dia merumuskan sendiri visinya dan mengajak rakyat ke arah yang dia mau tanpa penawaran, tanpa ada proses negosiasi. Tipe pemimpin kharismatis transformatif inilah yang tampaknya diperlukan Indonesia karena pemimpin-pemimpin tipe sekarang dan Orde Baru gagal dalam menyejahterakan rakyat.

Selanjutnya, jika Faisal Basri mengemukakan pentingnya perubahan paradigma dan Bima Arya menggagas pentingnya pemimpin kharismatik transformatif, Agung Putri mengintroduksi perlunya pendekatan Hak Asasi Manusia dalam mengembangkan

sistem pembangunan. Ini karena instrumentasi HAM tidak dapat dihindarkan lagi sejak konsensus internasional menetapkan hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi, sosial, budaya. Jika pasar sudah dianggap sangat mendominasi dan menguasai bahkan logika berfikir masyarakat, logika bernegara, maka seharusnya hak asasi manusia memiliki kekuasaan itu. Terlebih, kalau melihat perkembangan yang cepat dari rejim hak asasi manusia di tingkat internasional. Namun sayangnya, paradigma hak asasi manusia sering kali dimanipulasi untuk kepentingan pasar. Misalnya, kebebasan berusaha selalu dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia, padahal hak asasi manusia juga memerintahkan perlindungan hak kaum minoritas di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi manusia juga mengakui hak menentukan nasib sendiri, mengakui hak masyarakat untuk menentukan cara mereka untuk hidup, tapi seketika itu juga hak asasi manusia membebankan pada negara keharusan untuk membuat langkah-langkah progresif di bidang ekonomi baik sendiri maupun dalam sebuah kerja sama internasional.

Berbagai gagasan yang disampaikan dalam diskusi tersebut cukup menarik terutama dalam merespon kegagalan-kegagalan negara dalam mengatasi banyak persoalan yang kini dihadapi masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Pada intinya, perlu digunakannya pendekatan dan paradigma baru dalam mendekati persoalan Indonesia sekarang ini karena sifatnya yang sudah sangat berubah. Pendekatan baru, tentu saja, memerlukan tipe pemimpin baru, yang transformatif dan bukannya transaksional. Sementara pendekatan yang digunakan, haruslah tetap berpijak pada kebijakan pro-poor atau berpijak pada pendekatan HAM yang lebih menjamin hak-hak masyarakat dan kelompok minoritas.



Menggugat Sistem Pendidikan Model Sekolah

Tertulis dalam sebuah sepanduk di depan sekolah elit Jakarta, "Sekolah ini menerapkan kurikulum Singapura." Di lain sekolah yang bertaraf internasional, juga diiklankan bahwa sekolahnya menerapkan sistem pendidikan ala Amerika dan Australia. Kurikulum pendidikan seperti komoditas pangan dan tekstil yang selalu diimpor. Semua itu "teror" atas kearifan lokal.

Ironis, anak bangsa ini membanggakan sistem pendidikan asing di negeri sendiri. Adakah bangsa asing yang membanggakan sistem pendidikan kita



Bedah Buku : Sketsa Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Membangun Kembali Pendidikan Nasional
Penulis : Giat Wahyudi
Tebal : 170 halaman + xxvi
Penerbit : Sanggar Filsafat Muda Indonesia dan LKKM FISIP UNTAG '45 Jakarta
Tahun : Desember 2007
Oleh : Guruh Sukarno Putra (Budayawan, Ketua Gerakan Spirit Pancasila)

di negaranya? Ini pertanyaan kritis atas realitas kekinian kita di bidang pendidikan. Kita punya tokoh peletak dasar sistem pendidikan nasional sekaliber Ki Hajar Dewantara (KHD). Kita punya sejarah panjang pendidikan sekaligus konsepsinya yang menjunjung tinggi kearifan lokal-nasional. Sayangnya, kita tidak cukup bangga dengan itu.

Inilah saatnya kita mengenal dan memahami kembali konsepsi KHD di bidang pendidikan. Adalah Giat Wahyudi (GW) yang menyegarkan kembali ingatan kita pada konsepsi dan pemikiran KHD. Buku yang ia tulis ini, sebetulnya cermin kegelisahannya sekaligus perlawanannya atas pola pendidikan model sekolah. Ia sedang mengingatkan mereka yang lupa bahwa bangsa ini punya konsep dan tokoh pendidikan sendiri.

Mengapa GW menggugat model sekolah? Lalu apa model pendidikan yang ideal bagi Indonesia? Di sinilah pentingnya membaca buku ini. Walau berupa kumpulan makalah, tapi sesungguhnya buku ini lebih runut dan konfrehensif mengungkap konsep pendidikan yang ideal menurut KHD. Tidak hanya itu, di dalamnya juga kaya dengan terminologi berbagai istilah yang ditemukan dalam mengungkap sejarah pendidikan nasional.

"Janganlah orang mengira bahwa bangsa kita tidak memiliki sistem pengajaran sendiri." Inilah penegasan KHD yang sesungguhnya menohok kita, menohok mereka yang suka membanggakan sistem pendidikan asing, dan menohok para guru serta birokrat yang tidak mengenal pemikiran KHD. Sudah sejak lama KHD punya formulasi sistem pendidikan yang ideal bagi bangsa ini (hal.36).

Lewat Taman Siswa (TS), KHD menampilkan model pendidikan ideal. TS merupakan hasil penelitian dan penelusuran KHD bertahun-tahun atas ber-

bagai praktik dan khasanah model pendidikan di Nusantara. Ia membangun TS di tengah model sekolah yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Dan TS sendiri merupakan modifikasi dari model pondok pesantren (ponpes).

KHD melihat, model ponpes paling ideal bagi kaum pribumi saat itu. Dan model ponpes punya sejarah panjang di Nusantara. Bila menilik sejarahnya, ponpes tidak selalu identik dengan Islam. Model ponpes sama dengan sistem mandala, paguron, dan pawiyatan yang pernah ada pada masa feodalisme Hindu dan Budha (hal.18-19).

Sayang, pada sisi ini GW tidak menjelaskan lebih detil bagaimana perjalanan ponpes bisa menjadi identik dengan Islam di Nusantara. Ada mata rantai (transisi) yang terputus dari pemaparannya. Padahal, tidak hanya di Nusantara, hampir di seluruh kawasan Asia, model ponpes-lah yang berkembang dan mengakar. Lihat perguruan Shaolin di Tiongkok, Santi Niketan di India dan Qum di Iran --mirip dengan ponpes..

Bila di Timur ada model ponpes, di Barat ada model sekolah. Model terakhir inilah yang masuk ke Timur lewat penjajahan. Cak Nur mengungkapkan, bila tidak ada penjajahan, niscaya perguruan di Nusantara menerapkan model Tebuireng, Krpyak, atau Bangkalan. Bukan UI, ITB, atau UGM. Kehadiran penjajah kala itu, juga telah memencilkan ponpes ke desa-desa. Ia tidak tumbuh di pusat-pusat kota (hal.50-51).

Kembali pada konsep pendidikan KHD, ia melihat 3 faktor penting dalam model ponpes. Ada kyai sebagai guru, santri sebagai penimba ilmu, dan pondok sebagai sarana penginapan. Ketika ponpes sudah terlanjur identik dengan perguruan Islam, KHD "menyulap"nya dengan corak nasional. Para penghun-

inya tidak harus muslim dan materi pelajarannya tidak melulu menyangkut agama.

Model ponpes seperti TS yang dikembangkan KHD paling tepat dan efisien untuk sistem pendidikan kita. Di sini para murid datang dan menetap di rumah guru untuk menimba ilmu. Tidak hanya transfer ilmu, para murid juga bisa melihat keteladanan sang guru sehari-hari. Mereka dimomong dengan penuh kearifan tanpa ada paksaan dan hukuman saat guru mengajar dan mendidik di ruang kelas (hal.56-59).

Semua itu tidak didapat pada model sekolah. Pada model ini, guru dan murid datang ke sekolah. Setelah itu, pulang ramai-ramai tanpa ada interaksi yang intens antara guru dan murid. Pelajaran budi pekerti pada model ponpes lebih efektif, karena murid mendapatkannya langsung dari perilaku sang guru sehari-hari. Tidak terpaku pada numerik penilaian. Berbeda dengan model sekolah, kesuksesan budi pekerti selalu dikukur dengan numerik rapor. Itu tidak efektif.

Begitulah KHD dengan TS-nya telah memberikan ruang dialog dalam proses belajar-ajar agar peserta didik dapat berkembang secara wajar, selaras dengan lingkungannya. Saatnya kita lebih kritis saat mempelajari sejarah pendidikan nasional. Hari kelahiran KHD yang kini diperingati sebagai hari pendidikan nasional, jangan cuma serimonial belaka. Lebih dari itu, kita harus mengaktualkannya secara nyata untuk sistem pendidikan nasional.

* Resensi ini merupakan bahan dalam bedah buku Sketsa Pemikiran Ki Hajar Dewantara di Swangan Depok 31 Januari 2008, penyelenggara Persatuan Orang Tua Murid dan Guru Indonesia.



ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI: KESAKSIAN SEORANG AKTIVIS PERGERAKAN

Judul Buku : Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat

Penulis : M. Fadjroel Rachman

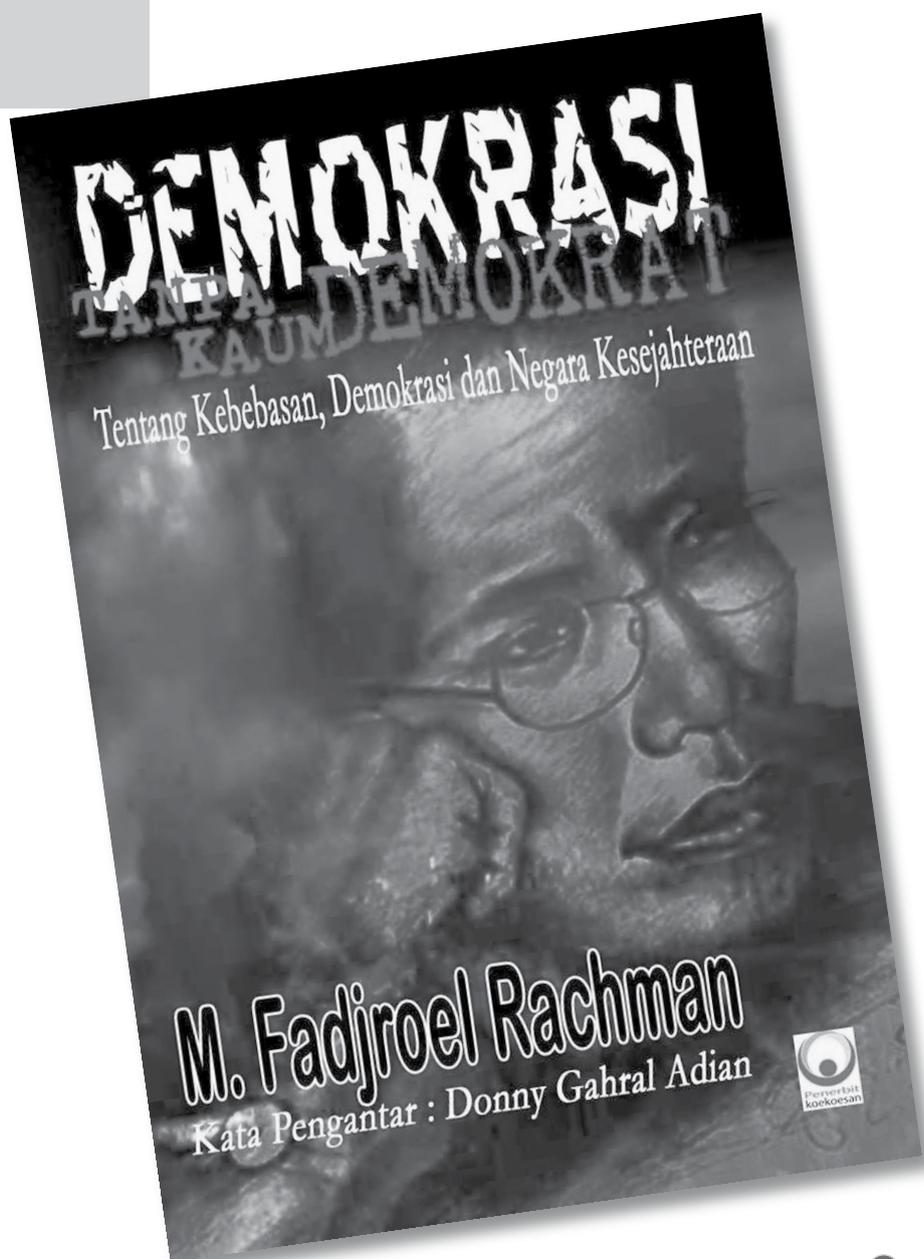
Penerbit : Penerbit Koekoesan, 2007

Tebal: xi + 364 halaman

Oleh Herdi Sahrasad^[1]

Pada tahun 1987, dalam aksi mahasiswa menentang rezim Orde Baru, seorang aktivis muda ITB ditahan Barkorstanasda Jawa Barat. Anak muda itu tak kapok jua dan tahun 1989, dengan bekas-bekas belasan jahitan di kepala, aktivis yang perkasa itu –walau bertubuh kurus- ditangkap lagi dalam Peristiwa Kaca Piring dan Peristiwa Long March Bandung-Badega. Puncaknya, dalam Gerakan 5 Agustus ITB, ia bersama kawan-kawannya menyerukan ABRI kembali ke barak dan ‘turunkan Soeharto’. Kali ini ia dan kawan-kawan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, berpindah-pindah di enam penjara termasuk Sukamiskin dan Nusakambangan. Ia juga dipecat dari ITB, alumnus historisnya, Tidak hanya itu, keluarganya diteror dan diancam, bahkan ia sendiri disiksa. Maka, perlahan-lahan, jiwanya semakin matang, akal budinya terasah dan kedigdayaannya menghadapi penderitaan semakin teruji. Juga kesabarannya untuk mencapai cita-cita yang diperjuangkan, semakin meluas dan mendalam.

Dialah M Fadjroel Rachman, sang penyair dan pemikir yang tajam, yang memberikan kesaksiannya atas keza-



liman Orde Baru dan Orde Reformasi dalam buku "Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat" ini. Saya, seperti halnya para sahabatnya, lebih suka menyebutnya Sjahrir muda, suatu julukan yang diberikan almarhum Soebadio Sastrosatomo, mantan tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia), kepadanya. Soebadio Sastrosatomo yang dipenjara di zaman Belanda, Jepang, Orde Lama maupun Orde Baru, menyebut Fadjoel sebagai "anak zaman" yang berani dan manusiawi.

Dewasa ini, sebagai inteligensia muda yang komited terhadap emansipasi sosial maupun emansipasi individual, Fadjoel sungguh kecewa atas praktik-praktik demokrasi era reformasi pasca jatuhnya Orde Baru Soeharto.

Fadjoel Rachman melihat reformasi mengalami distorsi dan penyelewengan. Seakan-akan kaum demokrat dengan lembaga demokrasi dan kaum anti-demokrat dengan lembaga anti-demokrasi itu sama saja, sami mawon. Tidak ada bedanya Soeharto, pengikut dan lembaga politik yang menopang kediktatoran fasis Orde Baru dengan kaum demokrat yang menggulingkannya. Seolah-olah tidak ada pertarungan politik (political struggle) bahkan perang demokrasi berkepanjangan (protracted democratic war) yang harus dicanangkan, yang melibatkan gagasan, kekuatan dan relasi kekuasaan. Seolah-olah gagasan demokrasi terlepas dari upaya membangun, memperjuangkan kekuatan dan relasi kekuasaan demokrasi. Seolah-olah tahap otoriter-totaliter, tahap transisi demokrasi dan tahap sistem demokrasi yang diperluas dan diperdalam itu, hanyalah ilusi para demokrat radikal saja.

Sudut pandang buku Fadjoel ini dengan tegas dan tandas membedakan bahwa kaum demokrat dan lembaga demokrasi itu berbeda secara distingtif dengan lawan-lawannya. Sebab, setelah reformasi total bergulir, signifikansi antara prodemokrasi dan anti-demokrasi makin penting dan menemukan makna baru. Namun,

sungguh suatu ilusi jika kita mengira, bisa membangun dan mempertahankan demokrasi tanpa kaum demokrat. (halaman 13-14)

Dalam pandangan Fadjoel, kemenangan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-Kalla) dalam pemilihan presiden yang demokratis, ternyata tidak mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tidak ada garis demarkasi yang tegas antara rezim reformasi dan rezim Orde Baru. Akibatnya, sistem lama dan mindset "Orbarian" tetap bercokol dalam institusi-institusi yang ada saat ini, meski sudah berganti dengan "baju demokrasi".

Fadjoel berasumsi, terbukanya ruang politik di era pasca-Soeharto tentunya akan memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan untuk mendesak kepentingan mereka. Namun, asumsi semacam itu terbukti keliru. Kelompok-kelompok semacam buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota pada dasarnya tetap hidup sulit dan tak mampu mengartikulasikan kepentingannya sekalipun terdapat ruang politik yang relatif lebih terbuka di era reformasi dibandingkan dengan era Soeharto. Tidak diragukan lagi, hal itu sebagian disebabkan oleh pengalaman depolitisasi, disorganisasi dan deideologisasi sistematis terhadap berbagai kekuatan masyarakat sipil di bawah kediktatoran Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa. Sementara gelombang reformasi ternyata juga tidak cukup memiliki kemampuan untuk menyapu bersih kelompok-kelompok dominan "eks" Orde Baru yang dengan cepat melakukan penataan diri kembali dan tetap memiliki akses yang sangat kuat atas proses-proses ekonomi-politik di Indonesia.

Fadjoel Rachman juga mengingatkan, kebijakan neoliberal oleh pemerintah yang mencabut subsidi demi membayar utang luar negeri (total utang negara dan swasta mencapai 134,362 milyar dollar AS) dan utang dalam

negeri (beban BLBI Rp650 trilyun), membuat hak-hak dasar sosial, politik dan ekonomi rakyat mengalami reduksi dan terabaikan. Hal ini ditambah lagi dengan pelbagai perilaku dan keputusan para penyelenggara negara yang tampak lemah dalam berhadapan dengan tekanan dan kepentingan asing (WTO, IMF, World Bank).

Fenomena Negara Dagang

Lebih dari itu, Fadjoel melihat kemenangan SBY-Kalla ternyata tetap dibaluri fenomena 'negara dagang' ala Indonesia, di mana kekuatan modal tetap menentukan wajah dan performance pemerintahan. Penundaan pengumuman kabinet oleh SBY mengenai susunan Kabinet Indonesia Bersatu yang dibentuknya, yang diumumkan setelah tertunda-tunda sekian jam, dan menimbulkan kesan yang oleh cendekiawan Muslim Yudi Latif dilihat sebagai "awal pemerintahan yang meragukan", membuktikan bahwa kaum kapitalis predator yang tumbuh subur sebagai oligarki di era Orde Baru Soeharto, kembali menunjukkan kedigdayaannya dengan memperoleh kursi kabinet sebagai kompensasi atas "peran modal" mereka dalam pemilihan presiden.

Hal ini mencerminkan pula betapa "kekuasaan" tidak hanya terletak di tangan aparat negara dan politisi, melainkan juga di tangan pemodal yang lebih digdaya secara modal. Kinerja para kapitalis (predator) ini di Indonesia mengindikasikan dengan terang bahwa kekuasaan "modal dan agendanya" mampu menundukkan "kekuasaan negara", seperti dalam kasus dominasi para pengusaha-pedagang (pemodal) ke dalam Kabinet SBY-Kalla.

Editorial Tempo dan Kompas, sebagaimana dirujuk oleh Fadjoel- setelah pengumuman Kabinet Indonesia Baru Oktober 2004, menyebut Kabinet SBY-Kalla sebagai "Kabinet Pedagang" yang menunjukkan menguatnya peran modal dan kalangan bisnis dalam politik Indonesia. Para intelektual Indo-

nesia sering melontarkan pernyataan bahwa akhirnya modal yang menentukan pertarungan kekuasaan. Sudah tentu modal dari kalangan pedagang-pengusaha Orde Barulah yang punya kemampuan untuk mendikte dan meminta harga yang harus dibayar dari presiden terpilih sebagai kompensasi atas pengerahan modal mereka dalam pertarungan politik yang demokratis.

Representasi Pemilik Kapital

Di Indonesia, M Fadjroel Rachman melihat dewasa ini negara bukan lagi sekadar eksekutif/representasi pemilik kapital, tetapi pemilik kapital sudah merepresentasi kepentingan mereka sendiri, langsung mengendalikan kebijakan negara melalui legislatif/eksekutif. Para politikus-pengusaha menyadari, eksekutif/birokrasi adalah real centers of state power. Ditambah penguasaan atas legislatif melengkapi pengendalian, kebijakan eksekutif tidak akan dibatalkan parlemen. Contoh pemilik kapital yang sudah membuktikan munculnya elemen politik baru: politisi-pengusaha (business-politician) dan entitas politik baru: negara-dagang (merchant-state), di antaranya Jusuf Kalla, Grup Bukaka, Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Presiden. Agung Laksono, mantan Presiden Direktur ANTV, Grup Hasmoda, Ketua DPR, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Aburizal Bakrie, Grup Bakrie dan Bumi Resources, Menteri Koordinator Perekonomian. Surya Paloh, Media Grup (Metro TV), Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Fahmi Idris, Grup Kodel, Ketua Partai Golkar, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kini Menteri Perindustrian). Tentu tidak sulit menyebut puluhan pengusaha dari beragam partai politik yang duduk di legislatif-eksekutif dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. (Halaman 140-141)

Dalam "Bangkitnya Negara -Dagang", demikian Fadjroel, datangnya "kesadaran subyektif" pengusaha mengendalikan negara dengan menjadi politisi-pengusaha terungkap sebagaimana kajian Richard Robison, In-

donesia: *The Rise of Capital* (1986), yang menjadi buku klasik ekonomi-politik yang meneliti fraksi kapital di bawah Orba, perkembangan, dan perannya dalam dinamika pembentukan politik totalitarisme Orba. Di dalam teks itu, Robison "menemukan" fraksi kapital dominan yang membentuk struktur ekonomi-politik Indonesia, tahun 1980-an. Dalam era Orba muncul konglomerat Sudono Salim, Prayogo Pangestu, Bob Hasan, Samsul Nursalim, Mochtar Riyadi dan seterusnya, selain keluarga dan anak-anak Soeharto sendiri yang terjun ke dunia bisnis dengan kelimpahan fasilitas, proteksi dan segala kemudahan dari negara (halaman 148-150). Adapun fraksi-fraksi itu antara lain:

Pertama, kapital internasional melalui utang (IGGI, IBRD, G to G Loans) dan foreign direct investment (Jepang, AS, Taiwan, Hongkong, Eropa). Kedua, kapital BUMN. Ketiga, kapital ABRI (TNI/Polri). Keempat, kapital konglomerasi pribumi dan nonpribumi. Kini, fraksi kapital dominan tetap serupa, meski ada pemain di dalam fraksi kapital berubah atau berganti nama, misalnya, IGGI menjadi CGI, ditopang IMF. Tahun 1980-an fraksi kapital yang bermuara ke Soeharto dan keluarga unggul, ditopang fraksi kapital ABRI. Kini, politisi-pengusaha yang mengendalikan negara dari fraksi kapital konglomerasi pribumi semi-Soeharto dan semi-ABRI, mengatasi fraksi kapital konglomerasi Soeharto, Tionghoa dan ABRI. (halaman 142-143)

Dan menurut Fadjroel, angka kapitalisasi dan kepemilikan golongan kroni Cendana ini terus bertambah besar hingga sekarang. Ilustrasi itu menggambarkan betapa kesenjangan ekonomi sangat sensitif dan tajam dalam era Orde Baru yang berlanjut ke era Orde Reformasi.

Para pedagang (kapitalis predator) itu bahkan mengerahkan "pleton-pleton intelektualnya" meminjam catatan Fadjroel Rachman - untuk mendukung kebijakan elite yang dominan. Fadjroel mencatat, misalnya, sekitar 36 in-

telektual mendukung kebijakan publik menaikkan harga BBM dengan memis-tifikasi kepentingan ekonomi-politik dominan yang berkuasa. Rizal Malarangeng, seorang pleton intelektual konglomerat pribumi Aburizal Bakrie dan lulusan Ohio State University, USA - mengatakan "Kami jelas berpihak, namun lebih pada gagasan dan kebijakan tertentu yang kami anggap baik," Publik pun bertanya, mengapa gagasan dan kebijakan publik yang lebih baik ditolak. Nampaknya hal ini hanya beberapa alternatif yang diajukan intelektual, akademisi, dan publik, tetapi tidak dijadikan pilihan kebijakan pemerintah karena tidak sesuai kepentingan kekuatan ekonomi-politik yang kini mendominasi birokrasi dan legislatif. (halaman 164-170)

Maka yang terjadi di Indonesia sesungguhnya adalah plutokrasi yakni pemerintahan yang dikuasai orang-orang kaya, kekuatan ekonomi-politik yang dominan. Plutokrasi ini menurut Fadjroel membentuk kelompok elite dengan menjadikan jabatan dan posisi sebagai status sosial untuk memperkaya diri dengan menggunakan legitimasi kekuasaan. Dengan kekayaan memudahkan untuk meraih pengaruh dan menentukan berbagai garis kebijakan yang menguntungkan posisi untuk berkorupsi dan berkolusi. Ciri tabiat mereka antara lain selalu ingin dekat dengan kekuasaan, kolusi secara profesional, dan kalau bisa menghindar bayar pajak, sementara di lain pihak mengembangkan berbagai usaha pribadi menggunakan legitimasinya di pemerintahan. Kelompok kaya ini mempengaruhi opini publik karena memiliki berbagai industri media baik cetak maupun elektronika, yang kesemuanya dapat mempengaruhi masyarakat luas untuk berpihak bagi kepentingannya.

Karena itu, masalah dan tantangan yang dihadapi kaum demokrat cukup berat mengingat kultur birokrasi dan rivalitas kekuasaan pasca Soeharto sejauh ini tidaklah berubah secara mendasar dibandingkan era Orde Baru Soeharto. Betapa tidak, tumbangnya

Orba Soeharto diiringi dengan makin kencangnya persaingan dan pergulatan antara aktor-aktor politik "lama" dan "baru". Maraknya KKN di lembaga eksekutif dan legislatif (selain yudikatif) dari daerah sampai pusat, menunjukkan arena negara, baik di pusat maupun di daerah, dimasuki oleh aktor yang beraneka ragam, mulai dari bekas aktivis kampus, LSM, koruptor, preman, pedagang/pengusaha, tokoh agama, bekas militer hingga "antek" Soeharto" yang sudah bermutasi. Dalam situasi ini, para aktor Orba dan bablasannya bahkan terus berkelit-kelindan, menguasai eksekutif, legislatif dan yudikatif serta dunia bisnis dengan jaringan dan struktur rahasia yang terus bekerja menggunakan institusi publik dan sumber daya publik guna mengakumulasi kapital privat. Akibatnya, negara masih dijadikan sebagai ajang "penjarahan" dan "pemerasan"

dari aktor-aktor politik dan para kapitalis predator di dalamnya.

Kesaksian M. Fadjroel Rachman atas Orde Baru dan Orde Reformasi dalam buku ini, akan membuka kesadaran pembaca, meski mungkin membuat pembaca kecewa, muak atau bosan terhadap pembaruan demokrasi pasca Soeharto, terutama terhadap para pedagang, politisi dan partai-partai politik. Seakan-akan masa depan bagi rakyat kebanyakan di Indonesia adalah suram lantaran tak ada cahaya di ujung terowongan. Namun demikian, Fadjroel juga menyampaikan fakta dan analisa serta jalan keluar dari kemelut ini, meski kadang samar dan tak pasti. Bagaimanapun, buku ini merupakan sumbangan berharga seorang "Sjahrir muda" dalam menyampaikan kesaksian atas rekam jejak demokratisasi dan para aktornya di Indonesia.***

Herdi Sahrasad, Associate Director Media Institute & Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina dan Fellow the Indonesian Institute Jakarta

[1] Tinjauan buku ini adalah revisi atas resensi Herdi Sahrasad yang semula berjudul "Menguak Penyelewengan Reformasi", Pustaka Loka, Kompas 9 april

Buku Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat ini juga telah diterjemahkan ke dalam dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kantor Perwakilan Indonesia. Buku versi Inggris ini tidak diperjual belikan, bila ada yang berminat untuk mendapatkan buku tersebut silahkan menghubungi FES, sejauh persediaan masih ada akan diberikan secara cuma-cuma.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Jalan Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta Selatan 12730
Tel: +62-21-7193711, 71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes.or.id

